



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan tahun 2015, disusun berdasarkan hasil Musrenbang Kecamatan, Forum Gabungan SKPD dan Musrenbang Penyusunan RKPD tahun 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
6. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
9. Pembangunan daerah adalah pembangunan yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Kubu Raya.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Bupati dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat.

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2014-2019 yang selanjutnya disebut Rencana Strategis SKPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah SKPD untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kubu Raya untuk periode perencanaan tahun 2015.
13. Visi Daerah adalah rumusan umum daerah mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi Daerah adalah rumusan umum daerah mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Daerah.
15. Strategi adalah langkah yang berisikan program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah.
16. Kebijakan Daerah adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) RKPD tahun 2015 merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) RKPD Tahun 2015, bertujuan:
 - a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
 - b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar tingkat pemerintahan;
 - c. mewujudkan keselarasan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
 - d. tercapainya pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
 - e. menjaga konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan proses sesuai dengan RPJMD;
 - f. menjamin komitmen bersama masyarakat terhadap program dan kegiatan yang telah disepakati oleh semua stakholder pembangunan daerah dalam Musrenbang Desa, Kecamatan hingga Kabupaten; dan
 - g. meningkatkan kinerja kelembagaan daerah dalam pelaksanaan pembangunnn sehingga dapat mempercepat proses peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam pencapaian Visi Kabupaten Kubu Raya yang Maju, Harmonis dan Berbudaya, serta memiliki Daya Saing.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:
 - a. SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD;
 - b. Pemerintahan Daerah dalam menyusun kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015; dan
 - c. Pemerintah Daerah dalam meyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belana Daerah Tahun 2015.

BAB III
SISTEMATIKA RKPD

Pasal 3

- (1) Sistematika RKPD Tahun 2015, sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaa RKPD Tahun 2013 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah;
 - c. BAB III Rancangan Keranga Ekonomi Daerah dan Kerangka Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV Sasaran Pembangunan Daerah;
 - e. BAB V Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2015;
 - f. BAB VI Penutup.
- (2) Isi dan Uraian RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Bupati melalui SKPD yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sepanjang pelaksanaan RKPD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun periode perencanaan sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

RKPD ini dapat dilaksanakan perubahan atau revisi menyesuaikan perkembangan dan dinamika penyelenggara Pemerintahan Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

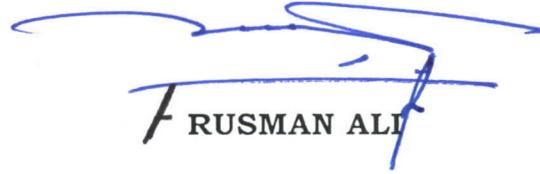
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 28 Mei 2014

BUPATI KUBU RAYA, *h*



RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 28 Mei 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



HUSEIN SYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2014 NOMOR 17

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR *17* TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2015

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Kekuatan yang diberikan sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015.

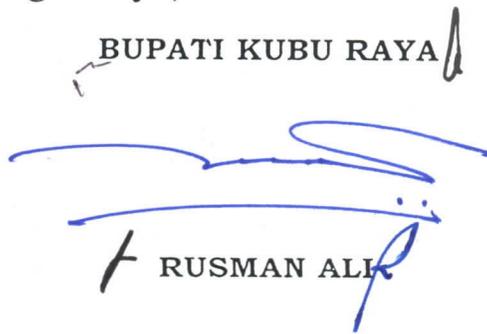
Dokumen RKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang dipersiapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagai instrumen perencanaan di tingkat daerah. Berbagai program/kegiatan yang terangkum dalam dokumen RKPD ini merupakan hasil koordinasi antar Instansi Pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui Forum Masyarakat Perencana Pembangunan yang dimulai dari tingkat Desa, Kecamatan hingga tingkat Kabupaten. Dokumen RKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya 2009-2014 serta mengacu pada RPJMD kedua Kabupaten Kubu Raya 2014-2019, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan memperhatikan RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015.

Dengan tersusunnya Dokumen RKPD ini diharapkan dapat mendukung kelancaran proses pembangunan di Kabupaten Kubu Raya secara keseluruhan, dan akhirnya dokumen ini diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai kegiatan pembangunan secara umum.

Sungai Raya,

2014

BUPATI KUBU RAYA



RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal... *28 Mei 2014* ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



HUSEIN STAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN... *2014* ...NOMOR... *17* ...

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	xiii
LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-7
1.4 Tujuan	I-8
1.5 Sistematika Penyusunan Dokumen RKPD	I-9
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2012 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH	II-1
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah.....	II-1
2.1.1 Aspek Administrasi dan Geografi	II-1
2.1.2 Aspek Kependudukan	II-2
2.1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-3
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum.....	II-20
2.1.5 Aspek Daya Saing dan Kemampuan Ekonomi Daerah ..	II-54
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2013.....	II-62
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah	II-63
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KERANGKA KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1 Kerangka Ekonomi daerah.....	III-1
3.1.1 Kondisi Ekonomi Makro Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2014	III-1
3.1.2 Analisis Lingkungan Eksternal dan Internal	II-9
3.1.3 Tantangan Pokok serta arah kebijakan dan sasaran ekonomi Makro Tahun 2015.....	II-10
3.2 Arah dan Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2015	III-13

3.2.1	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2015	III-17
3.2.2	Arah Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2015	III-27
3.3	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun 2014	III-34

BAB IV SASARAN PEMBANGUNAN DAERAHIV-1

4.1	Sasaran Makro Pembangunan Daerah.....	IV-1
4.2	Sasaran Menurut Bidang Pembangunan	IV-2
	a. Bidang Pendidikan.....	IV-2
	b. Bidang Kesehatan.....	IV-2
	c. Bidang Pekerjaan Umum.....	IV-2
	d. Bidang Perhubungan.....	IV-3
	e. Bidang Lingkungan Hidup	IV-3
	f. Bidang Perencanaan Pembangunan.....	IV-3
	g. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	IV-3
	h. Bidang Sosial.....	IV-3
	i. Bidang Ketenaga Kerjaan	IV-4
	j. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	IV-4
	k. Bidang Penanaman Modal.....	IV-4
	l. Bidang Kebudayaan.....	IV-4
	m. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga.....	IV-4
	n. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.....	IV-5
	o. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.....	IV-5
	p. Bidang Ketahanan Pangan.....	IV-6
	q. Bidang Komunikasi dan Informatika.....	IV-6
	r. Bidang Perustakaan.....	IV-7
	s. Bidang Pertanian.....	IV-7
	t. Bidang Kehutanan.....	IV-7
	u. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.....	IV-7
	v. Bidang Kelautan dan Perikanan.....	IV-8
	w. Bidang Perindustrian dan Perdagangan.....	IV-8

BAB V PRIORITAS DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN

2015.....	V-1
5.1 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2015.....	V-1
5.2 Program-program Prioritas Pembangunan Daerah.....	V-4
1.1 Pendidikan	V-4
1.2 Kesehatan	V-4
1.3 Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Penataan Ruang	V-6
1.3.1 Bina Marga dan Pengairan	V-6
1.3.2 Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan	V-6
1.4 Perencanaan Pembangunan.....	V-7
1.5 Perhubungan.....	V-7
1.6 Lingkungan Hidup.....	V-8
1.7 Kependudukan dan Catatan Sipil	V-8
1.8 Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	V-8
1.9 Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.....	V-9
1.10 Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.....	V-10
1.11 Penanaman Modal	V-10
1.12 Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.....	V-10
1.13 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.....	V-11
1.14 Pemerintahan Umum.....	V-11
1.14.1 Sekretariat Daerah	V-11
1.14.1.1 Bagian Pemerintahan	V-12
1.14.1.2 Bagian Hukum dan HAM.....	V-12
1.14.1.3 Bagian Pertanahan	V-12
1.14.1.4 Bagian Perencanaan dan Pembangunan	V-12
1.14.1.5 Bagian Kesejahteraan Sosial.....	V-12
1.14.1.6 Bagian Ketahanan Pangan.....	V-12
1.14.1.7 Bagian Organisasi	V-12
1.14.1.8 Bagian Hubungan Masyarakat	V-13
1.14.1.9 Bagian Administrasi	V-13
1.14.1.10 Bagian Umum	V-13
1.14.2 Sekretariat DPRD	V-13
1.14.3 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah.....	V-13

5.14.4	Inspektorat Daerah	V-13
5.14.5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	V-13
5.14.6	Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	V-13
5.14.7	Satuan Polisi Pamong Praja	V-14
5.15	Badan Kepegawaian Daerah	V-14
5.16	Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	V-14
5.17	Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	V-15
5.18	Komunikasi dan Informatika	V-15
5.19	Pertanian dan Perternakan	V-16
5.20	Perkebunan, Kehutanan, Energi, dan Sumberdaya Mineral	V-16
5.21	Perikanan dan Kelautan	V-17
5.22	Perindustrian dan Perdagangan	V-17
5.3	Rencana Program dan Kegiatan Indikatif Tahun 2015.....	V-18

BAB VI PENUTUP.....VI-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan rencana pembangunan yang mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasannya serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Selain itu juga dimaksudkan untuk menjamin penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan hal-hal tersebut, maka perencanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat di susun dalam tahapan-tahapan baik dalam jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RKPD yang disusun setiap tahunnya memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Selanjutnya, RKPD menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

RKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 merupakan pelaksanaan tahun terakhir RPJMD I Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2014 dan sekaligus tahun pertama pelaksanaan RPJMD II Kabupaten Kubu Raya tahun 2014 – 2019 atau Tahap II dari RPJPD Kabupaten Kubu Raya 2009-2029, dimana prioritas pembangunan masih dititik beratkan pada peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran, dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan tata kelola pemerintahan.

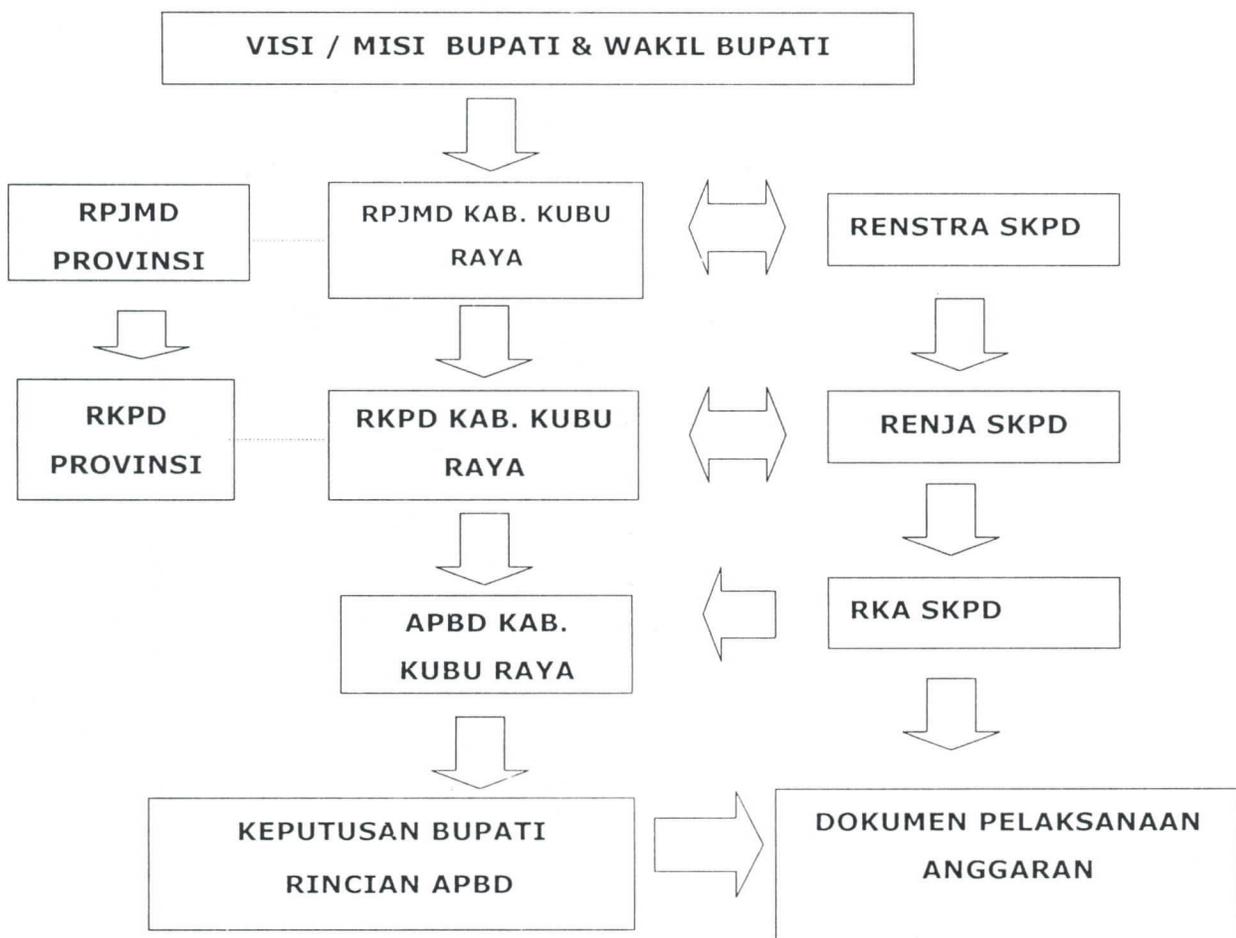
Penyusunan RKPD ini memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya, kondisi yang ada, isu strategis yang akan dihadapi dalam pelaksanaan RKPD, mempertimbangkan sinergi

antar sektor dan antar wilayah, memperhatikan koordinasi antar SKPD serta berbagai pihak, baik akademisi, DPRD, lembaga kemasyarakatan non Pemerintah, tokoh masyarakat serta para pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, proses penyusunan RKPD Tahun 2015 dilakukan melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga tingkat provinsi, serta memperhatikan hasil Musrenbang di tingkat Nasional, termasuk penyelenggaraan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD) yang menghasilkan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Dalam hubungannya dengan keterkaitan antar dokumen perencanaan serta konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dapat digambarkan melalui proses sebagai berikut :

Gambar 1.1

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



Penyusunan RKPD dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu: persiapan penyusunan RKPD; penyusunan rancangan awal RKPD; penyusunan rancangan RKPD; pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD; perumusan rancangan akhir RKPD; dan penetapan RKPD, dengan menggunakan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom-up* dan *top-down*.

Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk menyusun perencanaan pendapatan, perencanaan belanja dan perencanaan pembiayaan, termasuk melalui proses konsultasi dengan pemangku kepentingan di dalam penyusunan RKPD Tahun 2015.

Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan antara lain melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Proses *bottom-up* dilakukan secara berjenjang mulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Sedangkan proses *top-down* antara lain diimplementasikan dalam bentuk *Dedicated Program*.

1.2 Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan adanya penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran nasional, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan musyawarah perencanaan di tingkat pusat dan daerah. Ketiga peraturan perundang-undangan dimaksud mengamanatkan agar Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan.

Secara lengkap peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan RKPD Kabupaten Kubu Raya tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

24. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor: 28 tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor: PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 20134 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya.
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2014.
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029. (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 16);
31. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 85 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

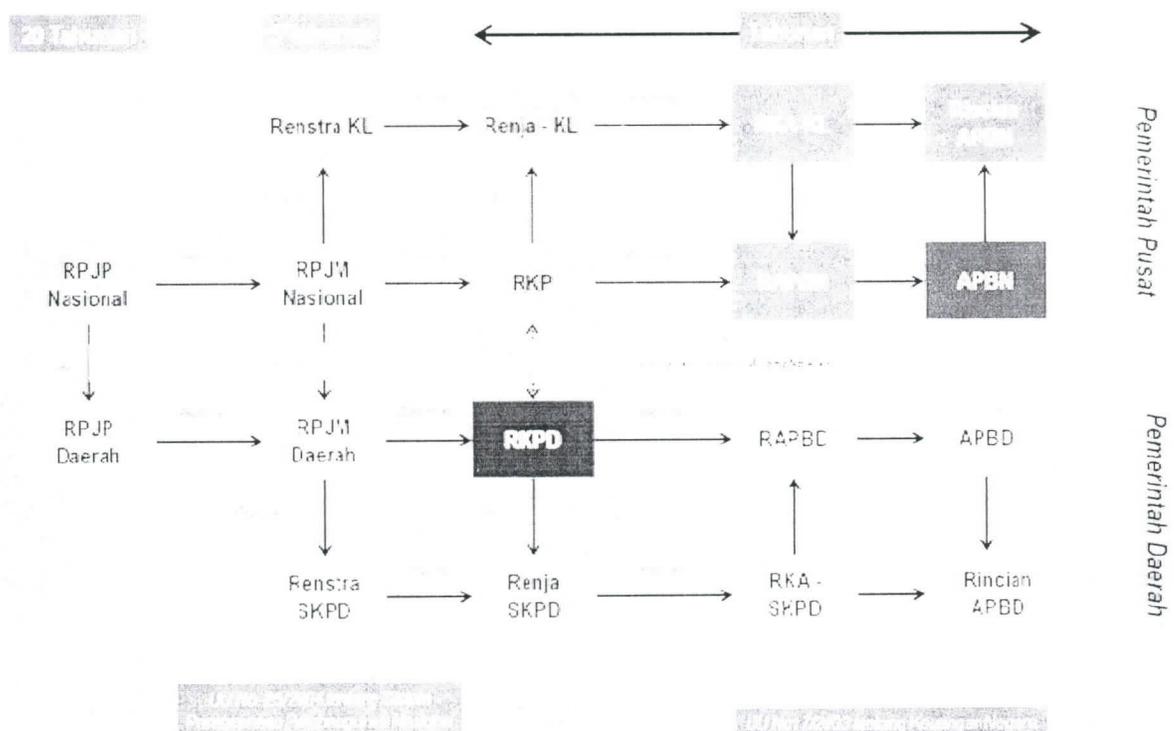
Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan penjabaran dari RPJMD. Dokumen RPJMD dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD. Selain itu RKPD terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah. Oleh karena itu, dalam penyusunannya RKPD Kabupaten Kubu Raya juga mengacu, memperhatikan, dan diserasikan dengan RKP Nasional dan RKPD Provinsi Kalimantan Barat, dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pusat melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Sinkronisasi yang dimaksud terutama dalam hal penetapan prioritas pembangunan daerah yang relevan dengan provinsi maupun pusat.

Hal ini merupakan perwujudan keterpaduan dan kesatuan perencanaan pembangunan secara nasional, dengan tetap memperhatikan kondisi, potensi serta dinamika perkembangan daerah, nasional dan global.

Penjabaran RPJPD kedalam RPJMD dan kemudian kedalam RKPD bertujuan untuk mewujudkan sistem perencanaan yang terpadu. Selanjutnya Dokumen RKPD menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD dan sebagai landasan dalam penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD. Dengan diacunya RKPD dalam penyusunan RAPBD dimaksudkan agar terwujudnya keterpaduan antara sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan negara.

Keterkaitan antar dokumen RKPD dan dokumen lainnya dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan negara dapat dilihat pada bagan berikut:

Gambar 1.2 Perencanaan dan Penganggaran dari RPJP sampai APBD



1.4 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 adalah:

1. Terwujudnya koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
3. Terwujudnya keselarasan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;

4. Tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
5. Mewujudkan dan menselaraskan arah perencanaan dengan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan pedoman RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019;
6. Menjamin komitmen bersama masyarakat terhadap program dan kegiatan yang telah disepakati oleh semua stakeholder pembangunan daerah dalam Musrenbang Desa, Kecamatan hingga Kabupaten;
7. Meningkatkan kinerja kelembagaan daerah dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempercepat proses peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam pencapaian Visi “Kabupaten Kubu Raya yang maju, harmonis dan berbudaya serta memiliki daya saing”
8. Menjadi acuan dan pedoman bagi SKPD dalam merencanakan dan menyusun Renja sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

1.5 Sistematika Penyusunan Dokumen RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Mengemukakan Pengertian ringka tentang RKPD, Proses Penyusunan RKPD, Kedudukan RKPD tahun 2015 dalam RPJMD, Keterkaitan antar dokumen RKPD dengan RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPDserta Tindak lanjutnya dalam proses penyusunan APBD.

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum

1.3 Hubungan Antar Dokumen

1.4 Tujuan

1.5 Sistematika Penyusunan Dokumen RKPD.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2013 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Menjelaskan tentang evaluasi kinerja pembangunan daerah dan evaluasi Pelaksanaan Program Tahun 2013 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah.

1.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

1.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2013

1.3 Permasalahan pembangunan Daerah

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kerangka ekonomi daerah beserta pendanaan mencakup kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun sebelumnya dan tahun berjalan, arah kebijakan ekonomi daerah dan analisis dan Perkiraan Sumber-sumber Pendanaan Daerah serta arah Kebijakan Keuangan Daerah.

1.1 Kerangka Ekonomi Daerah

Menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan yang memuat indikator pertumbuhan ekonomi daerah. Bab ini ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi kepala daerah, serta isi strategis daerah sebagai payung untuk perumusan program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

1.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Bab ini membahas proyeksi pendapatan dan belanja daerah tahun 2015 guna mendukung terwujudnya arah kebijakan pembangunan kabupaten Kubu Raya.

BAB IV SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015

Mengemukakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai tahun 2015 baik yang merupakan sasaran indikator makro pembangunan maupun sasaran-sasaran berdasarkan bidang-bidang pembangunan.

BAB V PRIORITAS DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, identifikasi isu dan masalah mendesak pembangunan daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan dalam rangka menetapkan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2015.

BAB VI PENUTUP

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2013 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1 Aspek Administrasi dan Geografi

Secara Geografi, Kabupaten Kubu Raya terletak disisi Barat Daya Provinsi Kalimantan Barat atau berada pada posisi 0° 13' 27" Lintang Utara sampai dengan 1° 00' 15" Lintang Selatan dan 109° 02' 47" sampai dengan 109° 58' 17" Bujur Timur. Batas wilayah Kabupaten Kubu Raya secara administratif dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kota Pontianak, Kabupaten Pontianak, dan Kabupaten Landak.
- b. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang.
- c. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Kayong Utara.
- d. Sebelah Barat : berbatasan dengan Laut Natuna

Kabupaten Kubu Raya terdiri dari 9 kecamatan dan 117 desa, dengan luas wilayah mencapai 6.985,24 km². Dari 9 kecamatan pada akhir tahun 2013, kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Batu Ampar, dengan luas ±2.002,70 Km² atau 28,67persen dari luas wilayah Kabupaten Kubu Raya, dan kecamatan dengan wilayah terkecil adalah Kecamatan Rasau Jaya yaitu ±111,07 Km² atau 1,59 persen dari luas wilayah Kabupaten Kubu Raya. Untuk lebih rincinya, dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini :

TABEL 2.1

Luas Wilayah Kabupaten Kubu Raya Dirinci Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Ibukota	Luas (Km ²)	Persentase (%)
1	Batu Ampar	Padang Tikar	2.002,70	28,67
2	Terentang	Terentang	786,40	11,26
3	Kubu	Kubu	1.211,60	17,35
4	Teluk Pakedai	Teluk Pakedai	291,90	4,18
5	Sungai Kakap	Sungai Kakap	453,17	6,49
6	Rasau Jaya	Rasau Jaya	111,07	1,59
7	Sungai Raya	Arang Limbung	929,30	13,30
8	Sungai Ambawang	Ambawang Kuala	726,10	10,39
9	Kuala Mandor B	Kuala Mandor	473,00	6,77
Kabupaten Kubu Raya			6.985,24	100

Sumber: Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka Tahun 2012

2.1.2 Kependudukan

Berdasarkan data BPS Kabupaten Kubu Raya, pada tahun 2012 penduduk Kabupaten Kubu Raya sebesar 522.174 jiwa, Jika dibagi dengan luas wilayah Kubu Raya yang cukup luas yakni 6.985,24 Km², maka kepadatan penduduk tercatat sebesar 75 jiwa per Km².

Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kubu Raya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Laju pertumbuhan Penduduk pada Tahun 2009 sebesar 1,64%, tahun 2010 sebesar 2,15%, tahun 2011 sebesar 2,05% dan tahun 2012 2,14%. Adapun rincian jumlah penduduk Kabupaten Kubu Raya tahun 2008-2012, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2

Jumlah Penduduk Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008-2012

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Orang/Jiwa)					Laju Pertumbuhan Ppenduduk/Tahun (%)			
		2008	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012
1	Batu Ampar	32.008	32.533	33.113	33.660	34.252	1,64	1,78	1,65	1,76
2	Terentang	9.832	10.011	10.177	10.375	10.584	1,82	1,66	1,95	2,01
3	Kubu	35.804	36.140	36.469	36.829	37.252	0,94	0,91	0,99	1,15
4	Teluk Pakedai	18.168	18.467	18.767	19.064	19.404	1,65	1,62	1,58	1,78
5	Sungai Kakap	97.026	99.084	101.200	103.966	106.846	2,12	2,14	2,73	2,77
6	Rasau Jaya	22.441	22.960	23.499	24.084	24.691	2,31	2,35	2,49	2,52
7	Sungai Raya	181.507	184.233	188.014	191.929	196.102	1,5	2,05	2,08	2,17
8	Sungai Ambawang	62.369	63.404	65.879*)	67.207*)	68.616	1,66	3,9	2,02	2,10
9	Kuala Mandor B	23.332	23.579	23.852	24.121	24.327	1,05	1,17	1,13	1,27
	Jumlah	482.487	490.408	500.970	511.235	522.174	1,64	2,15	2,05	2,14

Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya, 2013

*) Tidak Termasuk Warga Perumanas IV

2.1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.3.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. Pendapatan Domestik Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah/wilayah dalam suatu periode tertentu. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah (*Value added*) yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi dalam suatu daerah/wilayah. Secara kuantitatif PDRB merupakan agregate nilai tambah seluruh sektor ekonomi dalam jangka waktu 1 tahun, oleh karena itu PDRB dihitung atas dasar harga berlaku (*at current price*) dan PDRB atas dasar harga konstan (*at constant price*). PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat perubahan struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk melihat pertumbuhan riil.

Dalam pengertian lain, data PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah/wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Dengan demikian, nilai PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah/wilayah

sangat tergantung pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi (faktor produksi) di daerah/wilayah tersebut. Kondisi terbatasnya sumber daya alam dan penyediaan faktor-faktor produksi tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah/wilayah. Pada prinsipnya, ada tiga metode pendekatan untuk menghitung PDRB, yakni : pendekatan Produksi, pendekatan Pendapatan dan pendekatan Pengeluaran. Metode pendekatan Pengeluaran biasanya dikenal dengan PDRB menurut penggunaan. Dari tiga metode tersebut diatas, hasil perhitungan akan merupakan angka yang relatif sama. Dengan demikian, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan (pendekatan Produksi) dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan yang diterima dari balas jasa faktor-faktor produksi (pendekatan Pendapatan).

1. PDRB Atas Harga Berlaku

PDRB Kabupaten Kabupaten Kubu Raya pada Tahun 2013 atas dasar harga berlaku adalah sebesar Rp. 12.608.827,76 atau meningkat 12,29 % jika dibandingkan dengan tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 11.204.861,88. Nilai PDRB ini disusun berdasarkan 9 Kecamatan di wilayah Kabupaten Kubu Raya. Nilai dan kontribusi sektor yang memiliki nilai besar akan memberikan kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten begitupun sebaliknya.

Di lihat dari nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB Tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 atas dasar harga berlaku dapat digambarkan pada tabel 2.3 dan tabel 2.4 sebagai berikut di bawah ini:

Tabel 2.3

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2013 (jutaan)

No	Sektor / Subsektor	2009	2010	2011	2012	2013
		Jml (Rp)	Jml (Rp)	Jml (Rp)	Jml (Rp)	Jml (Rp)
1	Pertanian	1.582.139,42	1.661.105,83	1.862.353,78	2.016.346,74	2.159.491,12
2	Pertambangan dan Penggalian	39.285,27	45.528,55	51.888,00	62.806,30	71.247,00
3	Industri Pengolahan	3.467.052,55	4.160.676,97	4.548.793,81	4.958.894,72	5.566.211,02
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	36.750,15	39.400,86	57.228,00	65.639,04	80.394,28
5	Bangunan	77.365,70	137.148,04	284.830,24	359.860,00	456.713,31
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	1.405.902,36	1.539.344,30	1.687.227,52	1.921.944,68	2.105.405,59
7	Pengangkutan dan Komunikasi	531.880,35	686.827,69	849.153,36	1.039.745,69	1.272.500,14
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	169.175,82	187.366,35	234.380,12	281.158,28	330.401,55
9	Jasa jasa	305.021,69	343.132,94	392.746,34	498.466,43	566.463,75
	Jumlah Total	7.614.573,31	8.800.531,53	9.968.601,17	11.204.861,88	12.608.827,76

Sumber: BPS Kabupaten Kubu Raya, 2013

Tabel 2.4

Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2013

No	Sektor / Subsektor	2009	2010	2011	2012	2013
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	Pertanian	20,77	18,91	18,68	18,00	17,13
2	Pertambangan dan Penggalian	0,52	0,52	0,52	0,56	0,57
3	Industri Pengolahan	45,53	47,36	45,63	44,26	44,15
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	0,48	0,45	0,57	0,59	0,64
5	Bangunan	1,02	1,57	2,86	3,21	3,62
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	18,46	17,52	16,93	17,15	16,70
7	Pengangkutan dan Komunikasi	6,98	7,82	8,52	9,28	10,09
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	2,22	1,92	2,35	2,51	2,62
9	Jasa -jasa	4,00	3,90	3,94	4,45	4,49
	Jumlah Total	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Kubu Raya, 2013

Laju pertumbuhan PDRB menurut harga berlaku selama lima tahun terakhir cenderung berfluktuasi, demikian juga dengan sektor-sektornya. Berdasarkan tabel 2.3 dan tabel 2.4 di atas selama tahun 2009-2013, pada tahun 2013 sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku, yaitu sebesar Rp. 5.566.211,02 dengan nilai kontribusi sebesar 44,15% sedangkan PDRB terkecil adalah PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian yaitu sebesar Rp. 71.247,00 dengan nilai kontribusi 0,57%.

2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan

PDRB Kabupaten Kubu Raya atas dasar harga konstan tahun 2000 (Hk) tahun 2009-2013 mengalami tren peningkatan dari Rp. 4.647.308,00 pada tahun 2009 menjadi Rp 5.989.616,98 pada tahun 2013. Selama tahun 2009-2013, sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB atas dasar harga konstan, diikuti oleh sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan diikuti sektor jasa-jasa. Perkembangan nilai PDRB atas dasar harga konstan dan kontribusi dapat digambarkan pada tabel 2.5 dan tabel 2.6 sebagai berikut :

Tabel 2.5

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2013 (jutaan)

No	Sektor / Subsektor	2009	2010	2011	2012	2013
		Jml (Rp)	Jml (Rp)	Jml (Rp)	Jml (Rp)	Jml (Rp)
1	Pertanian	922.399,07	977.880,61	1.039.780,45	1.089.036,39	1.150.712,19

2	Pertambangan dan Penggalian	18.835,67	20.578,83	22.260,12	24.360,32	25.330,13
3	Industri Pengolahan	2.154.578,52	2.265.932,13	2.366.766,11	2.458.679,69	2.570.472,59
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	24.907,95	25.101,02	28.793,80	32.247,91	35.852,61
5	Bangunan	40.608,81	51.356,77	65.014,39	73.590,64	82.431,88
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	787.238,47	816.002,11	853.946,21	909.492,24	940.108,51
7	Pengangkutan dan Komunikasi	382.307,24	438.909,64	514.445,99	620.357,59	745.860,29
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	103.459,97	107.979,89	117.262,52	129.724,63	143.717,94
9	Jasa -jasa	212.982,30	229.911,99	249.759,52	272.301,85	295.130,85
	Jumlah Total	4.647.308,00	4.936.652,99	5.258.029,11	5.609.791,26	5.989.616,98

Sumber: BPS Kabupaten Kubu Raya, 2013

Tabel 2.6

Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2013

No	Sektor / Subsektor	2009	2010	2011	2012	2013
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	Pertanian	19,85	19,81	19,78	19,41	19,21
2	Pertambangan dan Penggalian	0,41	0,42	0,42	0,43	0,42
3	Industri Pengolahan	46,36	45,90	45,01	43,83	42,92
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	0,54	0,51	0,55	0,57	0,60
5	Bangunan	0,87	1,10	1,24	1,31	1,38
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	16,94	16,53	16,24	16,21	15,70
7	Pengangkutan dan Komunikasi	8,23	8,89	9,78	11,06	12,45
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	2,23	2,19	2,23	2,31	2,40
9	Jasa -jasa	4,58	4,66	4,75	4,85	4,93
	Jumlah Total	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Kubu Raya, 2013

Dari tabel 2.5 dan tabel 2.6 menggambarkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun belakangan ini telah terjadi peningkatan riil meskipun tidak terlalu besar tetapi cukup menunjukkan bahwa peningkatan yang terjadi bukan hanya peningkatan yang disebabkan oleh harga yang jauh meningkat atau tingkat inflasi yang terjadi.

Ada tiga kelompok sektor dalam PDRB menurut lapangan usaha, yaitu kelompok sektor Primer, kelompok Sektor Sekunder dan kelompok Sektor Tersier. Kelompok Sektor Primer terdiri dari sektor Pertanian dan Pertambangan, Kelompok sektor Sekunder terdiri dari sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih serta sektor konstruksi dan bangunan, sedangkan kelompok sektor tersier terdiri dari 4 (empat) sektor lainnya yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan

dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa lainnya.

Dari tabel di atas, kelompok sektor sekunder memegang dominasi paling kuat dalam struktur ekonomi Kabupaten Kubu Raya atau dapat dikatakan struktur ekonomi Kabupaten Kubu Raya adalah struktur ekonomi modern yang tidak lagi berbasis primer atau sektor tradisional.

3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

PDRB per kapita merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering dipergunakan dalam mengukur atau menilai tingkat kemakmuran/kescjahteraan masyarakat dalam suatu daerah secara makro. Nilai ini diperoleh dengan membagi jumlah total PDRB dalam satu waktu tertentu dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan.

Kondisi PDRB per kapita Kabupaten Kubu Raya selama tahun 2009-2012 cenderung selalu meningkat. PDRB perkapita Kabupaten Kubu Raya meningkat tajam sebagaimana terlihat pada tabel 2.7 berikut ini :

Tabel 2.7

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008-2012

Tahun	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	PDRB per kapita ADHb	PDRB per kapita ADHk
2008	482.487	1,71	13.915.200,51	8.061.812,01
2009	490.408	1,90	15.318.175,90	9.232.096,24
2010	500.970	2,15	17.566.983,11	9.854.188,85
2011	511.235	2,05	19.518.618,97	10.284.955,27
2012	522.174	2,14	21.458.099,94	10.743.145,50

Sumber: BPS Kabupaten Kubu Raya, 2013

B. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Penghitungan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2013 ini adalah yang keenam sejak terbentuk menjadi Kabupaten baru. Kabupaten Kubu Raya adalah merupakan pecahan dari Kabupaten Pontianak yang merupakan kabupaten induk, dimana Kabupaten Kubu Raya memiliki jumlah kecamatan 9 dan beribukota di Sungai Raya. Walaupun penghitungan PDRB kabupaten Kubu Raya baru dilakukan sebanyak empat kali namun tetap menggunakan tahun dasar 2000. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya tahun 2013 tercatat sebesar 6,77 persen yang sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 6,69 persen.

Berikut ditampilkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008-2013.

Tabel 2.8

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008-2013

Tahun	Kabupaten Kubu Raya (%)
2008	5,02
2009	5,87
2010	6,23
2011	6,51
2012	6,69
2013*	6,77

Sumber: BPS Kabupaten Kubu Raya, 2013. *) Data Sementara

C. Inflasi.

Inflasi di Kabupaten Kubu Raya dan Provinsi Kalimantan Barat sejak Tahun 2007 hingga Tahun 2011 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.9

Inflasi Kabupaten Kubu Raya dan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2013

Tahun	Kabupaten Kubu Raya (%)	Provinsi Kalimantan Barat (%)
2008	8,60	11,19
2009	4,35	4,91
2010	8,80	5,85
2011	6,46	4,91
2012	5,25*	6,62*
2013	5,39**	9,48**

Sumber: BPS Kabupaten Kubu Raya, 2013

*) Data Sementara

***) Data sangat sementara

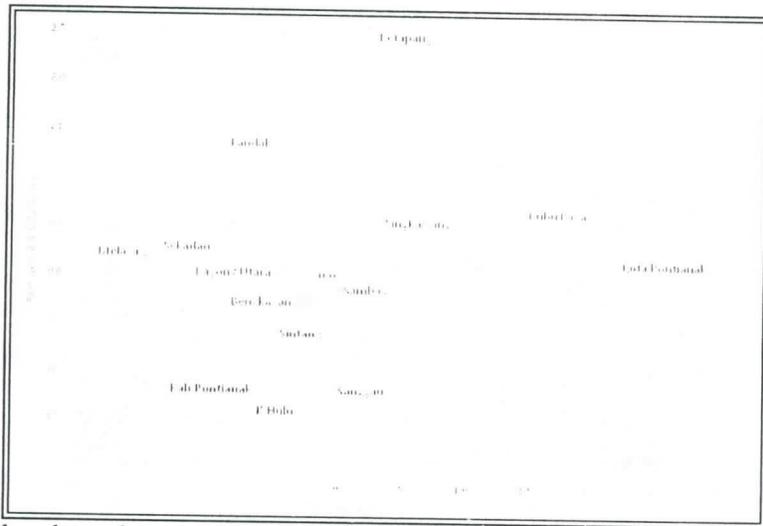
Laju Inflasi Atas Dasar Harga Produsen Tahun 2013 sebesar 5,39 persen menunjukkan angka lebih tinggi jika dibanding tahun 2012 yaitu sebesar 5,25 persen. Salah satu faktor yang mempengaruhi kenaikan angka inflasi antara lain kenaikan harga BBM yang berdampak pada tingginya harga-harga komoditas di Kabupaten Kubu Raya sebagai akibat meningkatkan biaya faktor produksi.

D. Indeks Williamson (Williamson Index)

Pengukuran kesenjangan regional melalui pendekatan indeks akan digunakan berdasarkan analisis CVw (CV Williamson). Indeks CVw digunakan untuk mengukur kesenjangan pendapatan regional, khususnya pendapatan dalam pengertian indikator PDRB per kapita. Kesenjangan ekonomi antar

wilayah menurut analisis CVw, menunjukkan kondisi kesenjangan wilayah dalam Provinsi Kalimantan Barat kecenderungan meningkat, hal tersebut diperlihatkan dengan nilai CVw dari tahun ke tahun.

Gambar 2.1 Indek Williamson



Berkembangnya kawasan Kabupaten Kubu Raya ini didukung oleh keberadaan pusat kota utama yang menjadi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Provinsi Kalimantan Barat. Poros Pontianak-Mempawah di utara berpotensi

berkembang lebih cepat dari sisi penduduk dan ekonomi dibandingkan dengan kabupaten lainnya, sebagian besar karena dorongan perkembangan konstruksi, manufaktur, perdagangan, jasa, pengeluaran pemerintah, dan bahan bangunan. Bahan bangunan adalah muatan utama dari Mempawah ke Pontianak. Rute itu kemungkinan besar calon yang kuat untuk jalan tol. Poros timur Pontianak-Tayan dilayani dengan baik sekali oleh angkutan sungai, serta koridor selatan Trans Kalimantan ke tenggara, dan koridor utara yang menghubungkan Kabupaten Sanggau dan kabupaten di wilayah hulu. Sehingga Kabupaten Kubu Raya menikmati manfaat dari dampak pendapatan akibat peningkatan permintaan akhir atas output seluruh sektor yang lalu lintas di Provinsi Kalimantan Barat. Dari analisis Klassen pada tahun 2011, Kabupaten Kubu Raya, Kota Pontianak, Kota Singkawang dan Kabupaten Ketapang masuk dalam klasifikasi daerah maju dan cepat tumbuh.

Posisi letak Kabupaten Kubu Raya pada kwadran II typologi Williamson, dapat dipahami mengingat Kabupaten Kubu Raya merupakan daerah baru pemekaran dan secara geografis berada pada daerah hinterland Kota Pontianak. Kondisi letak strategis tersebut menjadi Kabupaten Kubu Raya menjadi daerah perlintasan baik daratan maupun moda transportasi sungai, yang menjadi pembangkit kegiatan ekonomi ikutan di sektor perdagangan dan jasa serta aktivitas investasi baru lainnya yang menopang kegiatan ekonomi produktif di Kabupaten Kubu Raya. Sementara Kabupaten Melawi, Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Landak terletak di kuadran I, artinya secara ekonomi menjadi daerah berkembang cepat. Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kayong Utara terletak di kuadran IV, artinya secara ekonomi diklasifikasikan sebagai

daerah lambat berkembang/maju. Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sambas, terletak di kuadran III, artinya secara ekonomi diklasifikasikan sebagai daerah maju tapi tertekan.

2.1.3.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap beberapa indikator sosial, yang mencakup: (A) Indeks Pembangunan Manusia (IPM); (B) Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG); (C) Kemiskinan; dan (D) Rasio Penduduk yang Bekerja. Gambaran rincian terhadap fokus kesejahteraan sosial di Kabupaten Kubu Raya, secara umum adalah sebagai berikut:

A. Indek Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development* menurut UNDP didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk. IPM adalah salah satu alat untuk mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan yaitu :

- hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran
- Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa (bobotnya dua per tiga) dan kombinasi pendidikan dasar , menengah , atas gross enrollment ratio (bobot satu per tiga).
- standard kehidupan yang layak diukur dengan logaritma natural dari produk domestik bruto per kapita dalam paritasi daya beli.

Manfaat indeks ini adalah untuk mengetahui bahwa suatu wilayah tergolong wilayah yang maju, berkembang atau terbelakang, sekaligus mengukur pengaruh kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Semakin tinggi nilai IPM mencerminkan pencapaian pembangunan manusia semakin baik.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kubu Raya tahun 2012 menempati peringkat 11 dari 14 Kabupaten Kota di Kalimantan Barat. Gambaran rangking IPM Kabupaten Kubu Raya Dapat dilihat pada tabel 2.12 sebagai berikut :

Tabel 2.10

Rangking Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kubu Raya terhadap Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2012

Tahun	IPM Kabupaten Kubu Raya	Peringkat IPM di Propinsi Kalimantan Barat
2008	66,31	11
2009	66,77	11
2010	67,56	9
2011	68,06	10
2012	68,86	11

Sumbe: BPS Kabupaten Kubu Raya, 2013

Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia dan Komponennya di Kabupaten Kubu Raya terhadap Kabupaten Kota di Kalimantan Barat Tahun 2011-2012 digambarkan pada tabel 2.13 berikut :

Tabel 2.11

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Kota Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2011-2012

Provinsi	Angka Harapan Hidup		Angka Melek Huruf		Rata-Rata Lama Sekolah		Pengeluaran per Kapita disesuaikan		IPM	
	Tahun		Persen		Tahun		Ribu Rupiah		2011	2012
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012		
Kalimantan Barat	66,75	66,92	90,51	91,13	6,89	7,14	635,85	638,82	69,66	70,31
Sambas	61,48	61,69	91,55	91,57	6,20	6,21	627,35	630,69	65,80	66,19
Bengkayang	68,97	69,11	88,72	89,56	6,50	6,54	606,88	609,85	67,98	68,50
Landak	65,70	65,93	92,51	93,85	7,26	7,54	614,58	617,92	68,16	69,05
Pontianak	67,30	67,36	89,94	90,25	6,56	6,57	629,01	632,20	69,07	69,42
Sanggau	68,74	68,91	89,98	90,50	6,51	6,63	617,76	620,76	68,97	69,50
Ketapang	67,66	67,87	91,36	91,39	6,42	6,54	617,92	620,77	68,63	69,05
Sintang	68,53	68,74	90,54	90,55	6,65	6,68	613,68	616,69	68,77	69,14
Kapuas Hulu	66,67	66,75	92,64	92,64	7,18	7,18	636,89	638,05	70,38	70,52
Sekadau	67,37	67,39	90,15	91,61	6,34	6,83	609,84	613,16	67,52	68,47
Melawi	67,76	67,89	92,40	92,44	7,25	7,28	610,77	614,75	69,01	69,39
Kayaong Utara	66,28	66,00	88,31	88,34	5,73	5,84	609,13	612,56	65,75	66,19
Kubu Raya	66,37	66,43	88,30	89,07	6,68	7,11	626,22	629,72	68,06	68,86
Kota Pontianak	67,97	67,58	95,02	95,73	9,45	9,85	642,47	645,46	73,43	74,21
Kota Singkawang	67,66	67,46	89,69	90,25	7,44	7,59	622,81	626,14	69,21	69,77

Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya 2013

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Angka Harapan Hidup

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu negara. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui Puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya.

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup

yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Angka Harapan Hidup Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2012 sebesar 66,37 menempati urutan 11 dari 14 Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat, sementara pada tahun 2011 mengalami peningkatan menjadi 66,43 tetapi masih cukup rendah yaitu masih di posisi 11.

- Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) dewasa digunakan untuk mengetahui atau mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf terutama di daerah pedesaan, selain itu juga untuk menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media.

Angka Melek Huruf juga dapat menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis, sehingga AMH dapat dipakai sebagai dasar kabupaten untuk melihat potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Angka Melek Huruf Kabupaten Kubu Raya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 angka melek huruf sebesar 88,30%, artinya bahwa di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2011 masih ada 11,70% penduduk usia 15 tahun ke atas yang masih buta huruf dan pada tahun 2012 AMH yaitu sebesar 89,07% yang artinya masih ada 10,93 % penduduk usia 15 tahun ke atas yang buta huruf.

- Rata-Rata Lama Sekolah

Lamanya sekolah atau *years of schooling* merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan individu tersebut.

Dilihat dari rata-rata lama sekolah, tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2011 masih ditingkat pendidikan dasar ini dilihat dari rata-rata lama sekolah yaitu 6,68 dan kondisi ini secara kualitatif mengalami perubahan yang cukup berarti di tahun 2012 yaitu 7,11. Hal ini menunjukkan usaha yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk mendorong peningkatan jenjang pendidikan, dimana untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah membutuhkan berbagai komponen didalamnya.

Tabel 2.12

Indikator Makro Bidang Pendidikan Kab. Kubu Raya Tahun 2009-2013

No	Tolak Ukur	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Angka Melek Huruf (Thn)	86,66	95,5	97,3	97,84	97,86
2	Rata-Rata Lama Sekolah (Thn)	6,36	6,57	6,68	7,11	
3	Angka Partisipasi Kasar (APK)					
	a. APK SD	117,04	115,24	114,22	115,71	112,94
	b. APK SMP	80,86	82,89	85,92	89,04	90,89
	c. APK SMU	35,25	71,72	73,42	73,99	79,8
4	Angka Partisipasi Murni (APM)					
	a. APM SD	71,78	83,09	94,54	97,12	98,45
	b. APM SMP	59,21	63,13	69,8	73,07	75,71
	c. APM SLTA	17,65	28,09	53,52	53,96	65,54

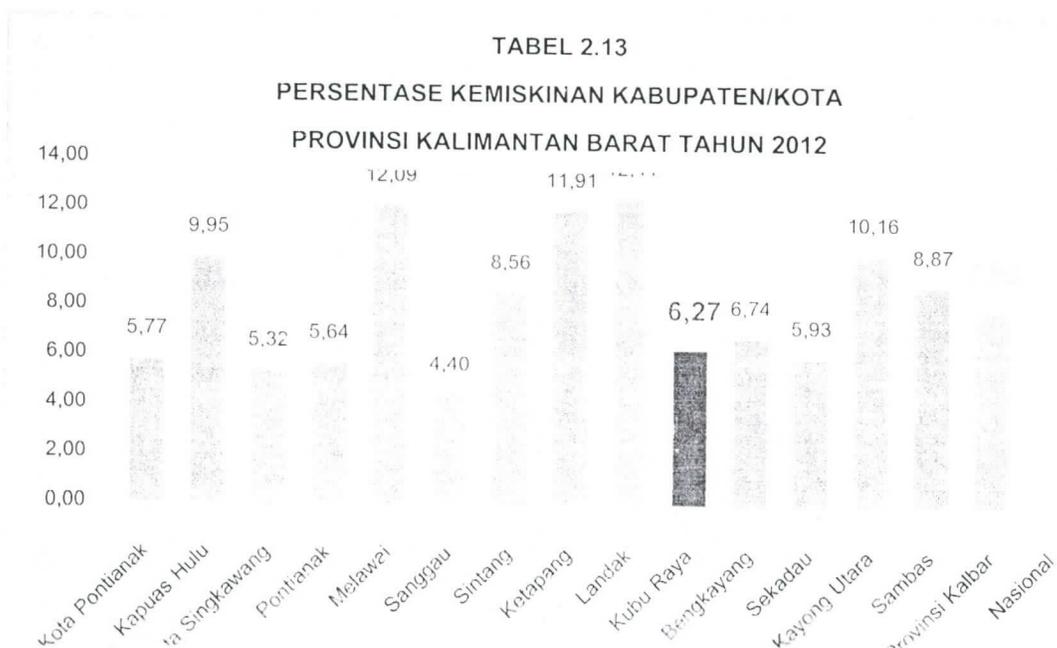
Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya 2013

- Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

Pengeluaran perkapita, PDRB riil perkapita yang telah disesuaikan untuk menggambarkan daya beli masyarakat. Standar UNDP maksimal Rp. 737.720,- yang merupakan proyeksi dari daya beli tertinggi. Pengeluaran per Kapita disesuaikan Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2011 menempati urutan 5 dari 14 Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat yaitu sebesar Rp. 626,220 (ribu) dan meningkat menjadi Rp. 629,72 (ribu) serta masih menempati urutan kelima di Kalimantan Barat.

B. Kemiskinan

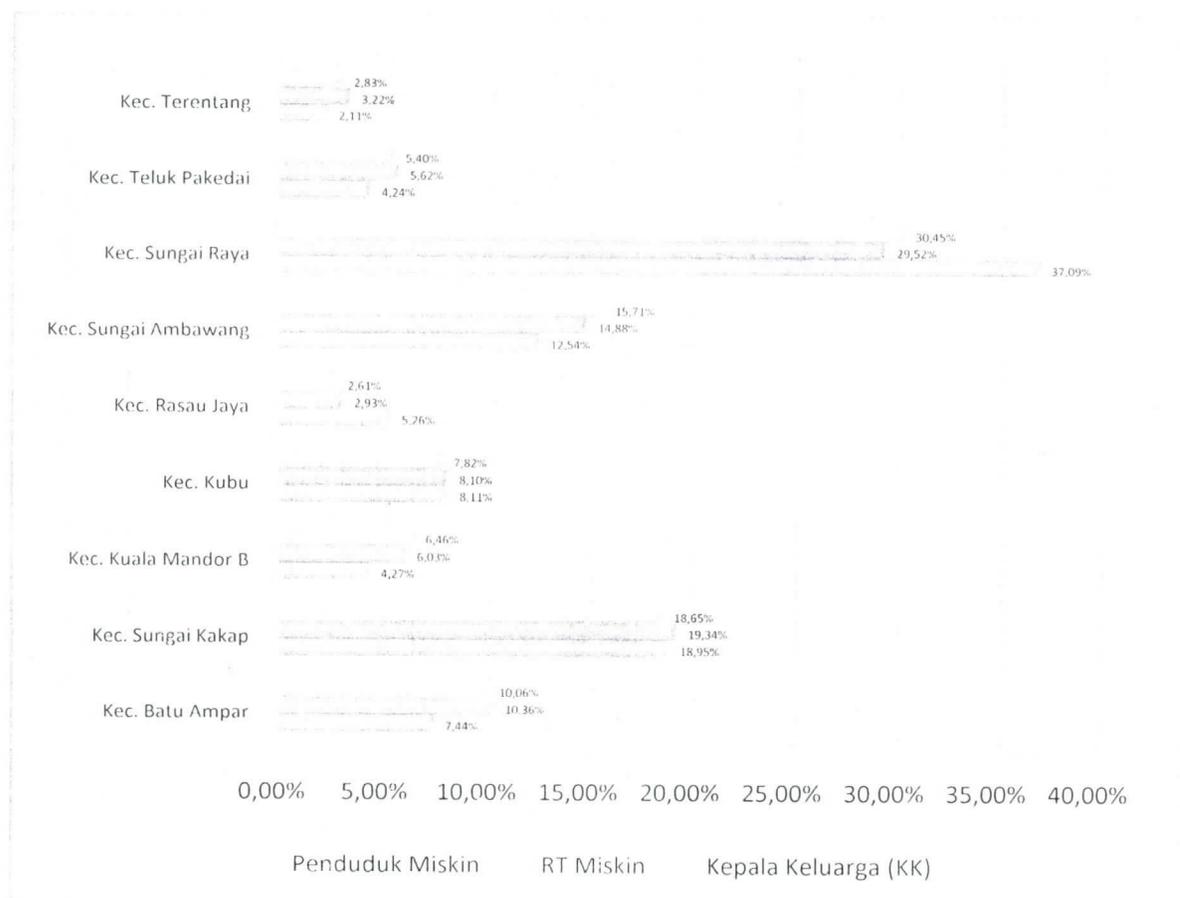
Masalah kemiskinan di Kabupaten Kubu Raya menjadi salah satu masalah yang perlu mendapatkan perhatian dalam pembangunan daerah. Tahun 2011 prosentase penduduk miskin Kabupaten Kubu Raya 6,67%, tahun 2012 mengalami penurunan dengan persentase 6,27%.



Persebaran penduduk miskin di Kabupaten Kubu Raya masih terpusat di perdesaan/pesisir. Penduduk miskin di perdesaan sebagian besar bekerja di sektor pertanian. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di perdesaan cenderung lebih tinggi dari perkotaan. Masyarakat miskin perdesaan dihadapkan pada masalah rendahnya mutu sumberdaya manusia, terbatasnya pemilikan lahan, banyaknya rumahtangga yang tidak memiliki asset, terbatasnya alternatif lapangan kerja, belum tercukupinya pelayanan publik, degradasi sumber daya alam dan lingkungan.

Umumnya masyarakat miskin di perkotaan bekerja sebagai buruh dan sektor informal yang tinggal di pemukiman yang tidak sehat. Penanganan kemiskinan di Kabupaten Kubu Raya terus mendapatkan perhatian yang serius, mengingat pada awal pembentukan Kabupaten Kubu Raya, kemiskinan menjadi isu strategis yang harus segera mendapatkan perhatian dalam pengentasannya. Hasil program pengentasan kemiskinan di kabupaten Kubu Raya berhasil menurunkan angka kemiskinan secara significant

Tabel 2.14
Persentase Persebaran Kemiskinan di Kab. Kubu Raya
Tahun 2011



Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya 2013

Sejak tahun 2011, diluncurkan peningkatan dan perluasan program yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan termarjinalkan. Program tersebut dituangkan dalam Klaster keempat, yaitu Program yang

diarahkan untuk melengkapi berbagai program dan kegiatan yang telah dijalankan melalui tiga klaster program penanggulangan kemiskinan dan diarahkan pada tiga kelompok masyarakat, yaitu masyarakat nelayan, masyarakat miskin perkotaan dan masyarakat daerah tertinggal yang dilaksanakan secara terpadu. Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan sangat tergantung dari upaya pelaksanaan pembangunan di bidang lainnya serta koordinasi dan sinkronisasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan. Terkait dengan pemberian perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, telah dilaksanakan berbagai program seperti RASKIN (program beras untuk masyarakat miskin), Jamkesmas (program jaminan kesehatan masyarakat), beasiswa siswa miskin, dan PKH (program keluarga harapan). Pada tahun 2011, melalui program RASKIN telah disalurkan beras bersubsidi sebanyak 7,36 ton bagi 49.986 rumah tangga sasaran. Sementara itu, pada tahun 2012, program RASKIN akan diarahkan bagi 27.180 rumah tangga sasaran (RTS-PM) dengan alokasi 15 kg per rumah tangga sasaran selama 12 bulan atau keseluruhan beras yang disalurkan sebanyak 40,7 ton. Di tahun 2013 direncanakan akan disalurkan beras kepada penduduk miskin sebanyak 39,3 ton yang akan diterima sebanyak 26.248 KK. Penurunan penyaluran raskin dari tahun ke tahun, disarkan oleh perubahan data penduduk miskin yang masih mengacu kepada data BPS.

C. Ketenagakerjaan dan Pengangguran

Kondisi ketenagakerjaan pada tahun 2011 menunjukkan peningkatan jumlah angkatan kerja sebesar 6,95% dibandingkan tahun 2010 sebesar 237.118 orang menjadi 253.598 orang pada tahun 2011 ini berbanding terbalik dengan pengangguran yang mengalami penurunan dari 14.713 orang di tahun 2010 menjadi 11.468 di tahun 2011, pada tahun 2012 terjadi penurunan jumlah angkatan kerja sebesar 227.891 orang akan tetapi terjadi peningkatan jumlah pengangguran sebesar 13.808 orang, Gambaran ketenagakerjaan di Kabupaten Kubu Raya tahun 2009-2012 dikemukakan pada tabel berikut :

Tabel 2.15

Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Utama
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2012

No.	Indikator	Satuan	2009	2010	2011	2012
1.	Angkatan kerja	Orang	239.108	237.118	253.598	227.891
2.	Jumlah Pengangguran	Orang	17.220	14.713	11.468	13.808

Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya 2013

Indikator yang terpenting dalam ketenagakerjaan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), yaitu rasio dalam persen antara jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja (penduduk berumur 15 tahun ke atas). Tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2012 sebesar 66,17 % dan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 73,26%, maka angka tersebut turun 7,09%.

Indikator lain yang cukup penting adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yaitu rasio dalam persen antara jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja. Angka TPT Kabupaten Kubu Raya tahun 2012 sebesar 6,06%, naik 1,54% dari tahun 2011 sebesar 4,52%.

Tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka dapat dilihat pada Tabel 2.17 sebagai berikut :

Tabel 2.16

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2009-2012

No.	Indikator	2009	2010	2011	2012
1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69,89	69,57	73,26	66,17
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,20	6,20	4,52	6,06

Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya 2013

Masalah dalam bidang ketenagakerjaan adalah rendahnya pendidikan para pencari kerja (rata-rata lulus SD/ sederajat), keterampilan relatif terbatas sehingga tidak dapat bersaing dalam pasar kerja industri, demikian juga serapan tenaga kerja disektor pertanian yang terus menurun, Sebagian besar angkatan kerja, pada tahun 2012 bekerja di sektor pertanian yaitu sebanyak 101.004 orang, pada usaha industri 14.643 orang, peningkatan serapan tenaga kerja justru terjadi di sektor konstruksi sebesar 19.865 orang, perdagangan sebanyak 41.520 orang, transportasi 6.273 orang, lembaga keuangan 2.696, jasa kemasyarakatan 27.356 orang.

2.1.3.3 Fokus Seni Budaya dan Agama

A. Seni Budaya

Urusan kebudayaan terkait dengan penanaman nilai-nilai budaya, perlindungan dan pemeliharaan cagar budaya baik di daratan maupun di bawah air, pembinaan kesenian tradisional dan modern, menjalin kerjasama dengan berbagai daerah dan luar negeri.

Benda cagar budaya di Kabupaten Kubu Raya cukup banyak, yang terbagi dalam benda purbakala bergerak dan tidak bergerak. Jumlah benda cagar budaya di Kabupaten Kubu Raya pada Tahun 2012 sebanyak 17 unit antara lain Makam ismail mundu, Makam Panglima Raja Kubu, Keraton Kubu, Pekong tengah Laut sedangkan tempat rekreasi yang ada di Kabupaten Kubu Raya sekitar 59 yang menyebar di beberapa kecamatan.

Pada Tahun 2012 banyaknya wisatawan nusantara (wisnus) yang tercatat oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kubu Raya sebanyak 54.120, sedangkan kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) pada Tahun 2012 sebanyak 3.735 orang.

B. Agama

Salah satu butir yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah Negara menjamin kehidupan beragama dan senantiasa mengembangkan kerukunan antar umat beragama dan kepercayaan. Sejauh ini kehidupan antar umat beragama di Kabupaten Kubu Raya sangatlah harmonis. Hal mana ditunjukkan dengan sikap saling toleransi dan menghargai satu sama lain. Berdasarkan data dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya, pada tahun 2012, sebagian besar penduduk Kabupaten Kubu Raya memeluk Agama Islam yaitu 410.186 jiwa atau 78,55%, kemudian Budha 39.290 jiwa atau 7,52%, Protestan 38.805 jiwa atau 7,43%, Katholik 27.398 jiwa atau 5,25%, Hindu 3.889 jiwa atau 0,78% dan paling terakhir pemeluk agama konghucu 2.606 jiwa atau 0,50%.

Untuk menggambarkan kondisi sebaran pemeluk agama dan tempat ibadah di Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada tabel 2.17 dan tabel 2.18 sebagai berikut :

Tabel 2.17

Banyaknya Pemeluk Agama Dirinci Menurut Agama
Kabupaten Kubu Raya 2012

Keterangan	Islam	Katholik	Protestan	Budha	Hindu	Konghucu
Jiwa	410.186	27.398	38.805	39.290	3.889	2.606
Persentase	78,55	5,25	7,43	7,52	0,78	0,50

Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya 2013

Tabel 2.18

Banyaknya Rumah Ibadah Dirinci Menurut Agama
Kabupaten Kubu Raya 2012

Islam		Katholik	Protestan	Budha	Hindu	Konghucu
Masjid	Surau	Gereja	Gereja	Vihara	Pura	Kelenteng
577	506	75	33	38	5	8

Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya 2013

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Layanan Urusan Wajib

A. Pendidikan

Beberapa Indikator yang dapat mengidentifikasi tingkat kemajuan pelayanan umum di bidang pendidikan adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.19

Kondisi APK dan APM Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2009 – 2013

No	Tolak Ukur	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Angka Melek Huruf (Thn)	86,66	95,5	97,3	97,84	97,86
2	Rata-Rata Lama Sekoiah (Thn)	6,36	6,57	6,68	7,11	
3	Angka Partisipasi Kasar (APK)					
	a. APK SD	117,04	115,24	114,22	115,71	112,94
	b. APK SMP	80,86	82,89	85,92	89,04	90,89
	c. APK SMU	35,25	71,72	73,42	73,99	79,8
4	Angka Partisipasi Murni (APM)					
	a. APM SD	71,78	83,09	94,54	97,12	98,45
	b. APM SMP	59,21	63,13	69,8	73,07	75,71
	c. APM SLTA	17,65	28,09	53,52	53,96	65,54

Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013

Dari angka APK dan APM di atas terlihat bahwa secara umum kondisi pendidikan dilihat dari APK dan APM di Kabupaten Kubu Raya relatif lebih baik dari tahun ke tahun. Fenomena lain yang terlihat dari data di atas adalah semakin tinggi jenjang pendidikan semakin kecil APK dan APM, yang berarti semakin tinggi jenjang pendidikan semakin banyak pula anak yang tidak meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Banyak faktor penyebabnya baik internal maupun eksternal, antara lain ketidakmampuan secara ekonomi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga anak diposisikan sebagai salah satu sumber penambah penghasilan keluarga, terbatasnya akses ke sarana pendidikan di lingkungan terdekat, dan lain-lain. Kondisi ini menyebabkan pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya harus mengambil langkah kebijakan untuk menghasilkan program dan kegiatan yang mampu untuk meningkatkan tingkat partisipasi pendidikan masyarakat Kabupaten Kubu Raya.

Tabel 2.20
JUMLAH REALISASI RKB DAN USB TAHUN 2009-2013
DI KABUPATEN KUBU RAYA

No.	Komponen	Realisasi 2009		Realisasi 2010		Realisasi 2011		Realisasi 2012		Realisasi 2013		Jumlah	
		RKB	USB	RKB	USB								
1	SD/SDLB	78	8	88	8	98	6	108	6	118	6	490	34
2	SMP/SMPLB	25	5	25	6	25	5	25	5	25	5	125	26
3	SMA	15	3	14	4	12	2	12	3	14	2	67	14
4	SMK	5	2	6	1	6	2	8	2	8	2	33	9

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya, 2013

Indikator lain untuk menggambarkan perkembangan mengembirakan duania pendidikan adalah angka melek huruf. Angka melek huruf Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 mencapai 95,5 (tahun) pada Tahun 2011 mencapai 97,3 (tahun) dan pada Tahun 2012 mencapai 97,84 (tahun) dan tahun 2013 mencapai 97,86 (tahun).

a) Gambaran Pelayanan PAUD

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian ransangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Pada tahun 2012 terdapat 84 Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Kubu Raya dengan jumlah guru 366 Orang dan siswa sebanyak 2.705 orang, dengan Rasio guru terhadap jumlah murid TK pada tahun 2012 sebesar 1 : 7, Kondisi ini menunjukkan ketersediaan guru TK di Kabupaten Kubu Raya cukup memadai.

Tabel 2.21
Banyaknya Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK), Guru dan Murid
Tahun 2012

NO	Kecamatan	Jumlah Sekolah	Guru	Murid	Rasio Guru Terhadap Murid
1.	Batu Ampar	1	3	36	12
2.	Terentang	2	6	37	6
3.	Kubu	5	14	174	12
4.	Teluk Pakedai	1	3	30	10

5.	Sungai Kakap	8	31	228	7
6.	Rasau Jaya	6	27	250	9
7.	Sungai Raya	34	218	1.428	7
8.	Sungai Ambawang	23	52	426	8
9.	Kuala Mandor B	4	12	96	8
	Jumlah	84	366	2.750	7

Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013

b) Gambaran Pelayanan Pendidikan Dasar

Pada Tahun 2012 terdapat 506 sekolah dasar (SD) dengan jumlah murid 78.207 orang dan jumlah guru 3.314 orang, dengan demikian satu guru membina 24 Siswa.

Tabel 2.22

Banyaknya Sekolah Dasar (SD) , Guru dan Murid Tahun 2012

NO	Kecamatan	Jumlah Sekolah	Guru	Murid	Rasio Guru Terhadap Murid
1.	Batu Ampar	36	129	5.647	44
2.	Terentang	20	81	2.177	27
3.	Kubu	43	247	5.619	23
4.	Teluk Pakedai	28	121	2.995	25
5.	Sungai Kakap	71	614	13.616	22
6.	Rasau Jaya	22	198	3.589	18
7.	Sungai Raya	130	1.403	27.309	20
8.	Sungai Ambawang	103	378	12.084	14
9.	Kuala Mandor B	53	147	5.172	35
	Jumlah	506	3.314	78.207	24

Sumber: BPS Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013

Tabel 2.23

Banyaknya Sekolah Madrasah Ibtidaiyah, Guru dan Murid Tahun 2012

NO	Kecamatan	Jumlah Sekolah	Guru	Murid	Rasio Guru Terhadap Murid
1.	Batu Ampar	3	22	513	23
2.	Terentang	22	25	84	3
3.	Kubu	3	19	362	19
4.	Teluk Pakedai	4	11	238	22
5.	Sungai Kakap	16	129	2.066	16
6.	Rasau Jaya	2	30	365	12
7.	Sungai Raya	44	358	5.425	15
8.	Sungai Ambawang	58	506	6.475	13
9.	Kuala Mandor B	27	215	2.476	12

Jumlah	179	1.315	18.004	14
---------------	------------	--------------	---------------	-----------

Sumber: BPS Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013

Pada Tahun 2012 terdapat 194 Sekolah Menengah Pertama dengan jumlah murid 26.545 dan guru 901 orang dengan demikian satu guru membina 29 Siswa, dapat dilihat pada tabel 2.24 berikut :

Tabel 2.24

Banyaknya Sekolah Menengah Pertama (SMP), Guru dan Murid Tahun 2012

NO	Kecamatan	Jumlah Sekolah	Guru	Murid	Rasio Guru Terhadap Murid
1.	Batu Ampar	13	42	1.173	24
2.	Terentang	6	32	463	13
3.	Kubu	13	55	1.566	42
4.	Teluk Pakedai	9	36	603	17
5.	Sungai Kakap	30	135	5.209	26
6.	Rasau Jaya	10	54	954	18
7.	Sungai Raya	61	375	10.881	40
8.	Sungai Ambawang	37	143	5.067	45
9.	Kuala Mandor B	15	34	829	11
Jumlah		194	901	26.545	29

Sumber: BPS Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013

Tabel 2.25

Banyaknya Sekolah Madrasah Tsanawiyah, Guru dan Murid Tahun 2012

NO	Kecamatan	Jumlah Sekolah	Guru	Murid	Rasio Guru Terhadap Murid
1.	Batu Ampar	4	52	525	10
2.	Terentang	-	-	-	-
3.	Kubu	3	42	388	9
4.	Teluk Pakedai	2	31	206	7
5.	Sungai Kakap	10	120	651	5
6.	Rasau Jaya	5	70	491	7
7.	Sungai Raya	22	259	2.144	8
8.	Sungai Ambawang	18	246	2.522	10
9.	Kuala Mandor B	12	91	699	8
Jumlah		76	911	7.626	8

Sumber: BPS Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013

c) Gambaran Pelayanan Pendidikan Menengah

Terdapat 3 jenis sekolah yang memberikan pelayanan Pendidikan Menengah di Kabupaten Kubu Raya yaitu Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah. Pada Tahun 2012 terdapat 53 SMU, 22 SMK dan 27 Madrasah Aliyah.

Tabel 2.26

Banyaknya Sekolah Menengah Umum (SMU), Guru dan Murid Tahun 2012

NO	Kecamatan	Jumlah Sekolah	Guru	Murid	Rasio Guru Terhadap Murid
1.	Batu Ampar	2	23	408	18
2.	Terentang	1	20	138	7
3.	Kubu	3	31	619	20
4.	Teluk Pakedai	2	29	298	10
5.	Sungai Kakap	6	92	4.129	45
6.	Rasau Jaya	4	29	761	26
7.	Sungai Raya	18	104	9.271	89
8.	Sungai Ambawang	15	69	3.129	45
9.	Kuala Mandor B	2	42	192	5
Jumlah		53	439	18.945	43

Sumber: BPS Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013

Tabel 2.27

Banyaknya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Guru dan Murid Tahun 2012

NO	Kecamatan	Jumlah Sekolah	Guru	Murid	Rasio Guru Terhadap Murid
1.	Batu Ampar	2	23	378	16
2.	Terentang	-	-	-	-
3.	Kubu	1	8	27	3
4.	Teluk Pakedai	-	-	-	-
5.	Sungai Kakap	2	19	548	29
6.	Rasau Jaya	2	21	501	24
7.	Sungai Raya	9	62	1.644	26
8.	Sungai Ambawang	5	46	407	9
9.	Kuala Mandor B	1	9	17	2
Jumlah		22	188	3.522	19

Sumber: BPS Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013

Tabel 2.28

Banyaknya Sekolah Madrasah Aliyah, Guru dan Murid
Tahun 2012

NO	Kecamatan	Jumlah Sekolah	Guru	Murid	Rasio Guru Terhadap Murid
1.	Batu Ampar	1	13	30	2
2.	Terentang				
3.	Kubu	1	15	53	4
4.	Teluk Pakedai	1	15	74	5
5.	Sungai Kakap	1	14	56	4
6.	Rasau Jaya	3	48	377	8
7.	Sungai Raya	8	127	704	6
8.	Sungai Ambawang	9	147	1.051	7
9.	Kuala Mandor B	3	35	133	4
Jumlah		27	414	2.478	6

Sumber: BPS Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013

B. Kesehatan

Kondisi aspek pelayanan umum di bidang kesehatan adalah sebagaimana berikut :

Tabel 2.29

Kondisi dan Status Kesehatan Penduduk
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2012

		2009	2010	2011	2012	2013
1	Kematian Ibu Melahirkan (Kasus)	8	16	11	16	3 *)
2	Kematian Bayi (Kasus)	56	81	65	55	45 *)
3	Gizi Buruk Mendapat Perawatan (Kasus)	13	21	23	18	11 *)
4	Balita Gizi Kurang (Kasus)	1.440	885	835	648	972 *)
5	Persalinan Nakes	74,50 %	75,19 %	79,85%	-	-
6	IMUNISASI (UCI)	76,20 %	78,50 %	75,45%	-	-
7	Umur Harapan Hidup (tahun)	66,24	66,30	66,70	66,37	-

Sumber : BPS dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, 2013

*) sampai dengan Juni 2013

Dari Tabel di atas terlihat bahwa masih tingginya Angka Kematian Ibu dan Bayi pada Tahun 2012, Perkembangan status gizi balita di Kabupaten Kubu Raya menunjukkan perbaikan. sehingga perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat secara luas melalui gerakan sayang ibu dan bayi serta kegiatan P4K. Persalinan dengan tenaga kesehatan sudah tinggi, tinggal meningkatkan persalinan di fasilitas kesehatan, karena sebagian masyarakat masih ada yang suka bersalin di rumah.

(1). Sarana dan Prasarana Kesehatan

Ketersediaan prasarana kesehatan dapat dilihat pada tabel 2.30

Tabel 2.30

Ketersediaan Fasilitas Kesehatan
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012

		Pem. Prov	Pem. Kab	TNI/POLRI	BUMN	Swasta	Jlh	Pem. Prov	Pem. Kab	TNI/POLRI	BUMN	Swasta	Jlh	Pem. Prov	Pem. Kab	TNI/POLRI	BUMN	Swasta	Jlh
1	Rumah Sakit Umum	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2
2	Rumah Sakit Jiwa	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	
3	Rumah Sakit Bersalin	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	1	1
4	Puskesmas Perawatan	-	9	-	-	-	9	-	9	-	-	-	9	-	9	-	-	-	9
5	Puskesmas Non Perawatan	-	9	-	-	-	9	-	10	-	-	-	10	-	10	-	-	-	10
6	Puskesmas Keliling	-	65	-	-	-	65	-	12	-	-	-	12	-	28	-	-	-	28
7	Puskesmas Pembantu	-	-	-	-	-	0	-	65	-	-	-	65	-	67	-	-	-	67
8	Rumah Bersalin	-	-	-	5	-	5	-	-	-	-	10	10	-	-	-	-	12	12
9	Balai Pengobatan/Klinik	-	-	-	10	-	10	-	-	-	-	15	15	-	-	-	-	17	17
10	Praktik Dokter Bersama	-	-	-	10	-	10	-	-	-	-	7	7	-	-	-	-	2	2
11	Praktik Dokter Perorangan	-	-	-	11	-	11	-	-	-	-	54	54	-	-	-	-	65	65
12	Pengobatan Tradisional	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	136	136	-	-	-	-	5	5
13	Polindes/Poskesdes	-	111	-	-	-	111	-	112	-	-	-	112	-	114	-	-	-	114
14	Posyandu	-	349	-	-	-	349	-	363	-	-	-	363	-	372	-	-	-	372
15	Apotek	-	-	2	-	13	15	-	-	2	-	11	13	-	-	2	-	15	17
16	Toko Obat	-	-	-	-	20	20	-	-	-	-	14	14	-	-	-	-	23	23
17	GFK	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1
JUMLAH	0	544	4	36	34	618	0	572	4	0	249	825	0	601	4	0	140	745	

Sumber: BPS Kabupaten Kubu Raya 2013

(2). Jaminan Kesehatan

Tabel 2.31

ALOKASI PESERTA JAMKESDA KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2009-2013

		2009	2010	2011	2012	2013
1	Peserta Jamkesda Kab. Kubu Raya	6.900 jiwa	7.348 jiwa	15.181 jiwa	15.666 jiwa	37.500 jiwa
2	Nilai yang di Anggarkan	Rp. 207.000.000	Rp. 1.250.000.000	Rp. 2.000.040.000	Rp. 1.879.920.000	Rp. 5.400.000.000

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya 2013

NB

- 1 Jumlah Penduduk Kubu Raya th. 2011 sebesar 511.235 jiwa
- 2 Jumlah TNI/POLRI/JAMSOSTEK/CPNS Kab. Kubu Raya tahun 2013 sejumlah 51,124 jiwa
- 3 Jumlah peserta JAMKESMAS tahun 2013 sejumlah 153.325 jiwa
- 4 Jumlah peserta JAMKESDA tahun 2013 sejumlah 37.500 jiwa
- 5 Jadi pengurangan point 1 dengan (2+3+4) adalah jumlah peserta belum memiliki jaminan tahun 2013 sebanyak 269.286 jiwa

C. Lingkungan hidup

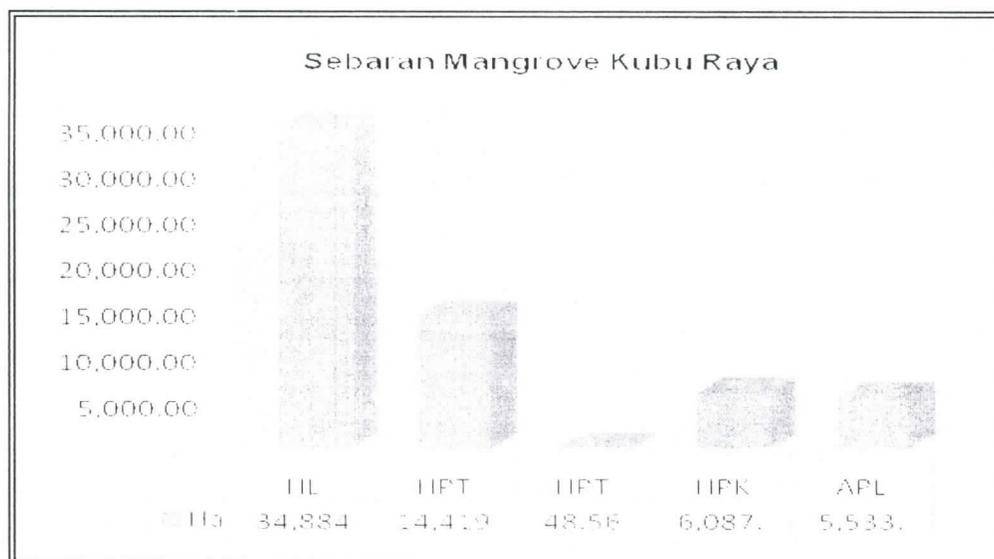
Pesatnya pembangunan memberikan dampak yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain memberikan tekanan yang berat terhadap kondisi lingkungan. Selama tahun 2008-2013 berbagai persoalan lingkungan yang mengarah kepada terjadinya penurunan kualitas lingkungan terjadi di kabupaten Kubu Raya. Umumnya permasalahan lingkungan di Kabupaten Kubu Raya terjadi sebagai akibat kondisi alam dan aktivitas penduduk.

Tabel 2.32

DATA KAWASAN HUTAN KAB. KUBU RAYA TAHUN 2011	
AREAL DALAM KAWASAN	383.208,89 Ha
1. Hutan Lindung (HL)	142.701 Ha
2. Hutan Produksi (HP)	121.503,14 Ha
3. Hutan Produksi Konversi (HPK)	53.643,34 Ha
4. Hutan Produksi Terbatas (HPT)	65.361 Ha
AREAL DI LUAR KAWASAN ATAU AREAL PENGGUNAAN LAIN (APL)	444.442,68 Ha

Sumber : Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan KKR, 2012

Grafik 2.2



Berkaitan dengan penanganan pencemaran lingkungan, telah dilaksanakan berbagai upaya, antara lain: (i) pengendalian pencemaran lingkungan dengan perbaikan pelaksanaan Program Kali Bersih (PROKASIH), Program Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER), (ii) penataan dan penegakkan hukum lingkungan; (iii) menurunkan beban pencemaran limbah B3 dan pemulihan lahan terkontaminasi limbah, serta (iv) peningkatan tata kelola lingkungan yang baik.

D. Penanaman Modal

Kondisi prekonomian yang semakin membaik dari tahun ke tahun telah mendorong pulihnya sektor riil di Kabupaten Kubu Raya. Laju pertumbuhan ekonomi terus meningkat diikuti dengan perkembangan perekonomian lainnya. Berbagai regulasi dan kebijakan pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang pro investasi, telah mendorong minat masyarakat untuk melakukan ekspansi kegiatan usahanya ke Kabupaten Kubu Raya

Pertumbuhan realisasi Investasi di Kabupaten Kubu Raya baik penanaman modal dalam negeri dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.33
JUMAH PROYEK, REALISASI INVESTASI PMDN DAN
PENYERAPAN TENAGA KERJA
DI KABUPATEN KUBU RAYA (JUTA RUPIAH)

Tahun	Jumlah Proyek	Nilai Realisasi (Juta Rp)		Tenaga Kerja Terserap (Orang)	
		Rencana	Realisasi	WNI	Asing
2009	102	268.153,52	1.141.577,91	21,669	22
2010	90	354.682,49	941.448,43	7.682	7
2011	207	1.580.413,60	1.207.104,03	7.706	7
2012	207	570.091,27	1.207.104,03	7.706	7
2013*	227	1.388.949,52	3.053.817,67	10.109	17

Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya 2012

*) BPMPT Kab. Kubu Raya (Semester II Tahun 2013)

Sama dengan PMDN, kondisi investasi PMA juga mengalami perkembangan yang berubah-ubah. Realisasi investasi dalam bentuk mata uang US dollar lebih fluktuatif dibanding dengan investasi yang dibiayai dengan mata dalam negeri. Sebagai investasi yang notabene kepemilikannya merupakan pihak asing, investasi PMA yang dibiayai dalam bentuk US dollar lebih rentan terhadap naik ataupun turunnya kondisi perekonomian global. Hal tersebut dikarenakan pengaruh lesunya ekonomi terhadap kapital, sehingga memberi dampak langsung dalam pembelian barang modal maupun untuk keperluan operasional.

Tabel 2.34
JUMAH PROYEK, REALISASI INVESTASI PMA DAN
PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KABUPATEN KUBU RAYA
(JUTA RUPIAH)

Tahun	Jumlah Proyek	Nilai Realisasi		Tenaga Kerja Terserap (Orang)	
		(Juta Rp)	Ribu US\$	WNI	Asing

2009	7	268.153,52	28.600,00	3.544	74
2010	12	354.682,49	8.600,00	3.915	20
2011	13	1.580.413,60	1.060,00	5.344	13
2012	13	1.580.413,60	1.060,00	5.344	13
2013*	18	1.304.245,51	24.483,59	2.683	47

Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya 2013

*) BPMPT Kab. Kubu Raya (Semester II Tahun 2013)

E. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Pertumbuhan Koperasi dan UKM di Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.35

Banyak nya Koperasi menurut jenisnya di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012

NO	KECAMATAN	KSP	KUD	KPRI	KSU	Fung. ABRI	KOPRA	KOPKAR
1	Batu Ampar	-	6	1	20	-	-	2
2	Terentang	-	4	1	8	-	-	-
3	Kubu	-	11	-	26	-	-	-
4	Teluk Pakedai	-	7	-	6	-	-	-
5	Sungai Kakap	-	8	4	35	-	-	-
6	Rasau Jaya	1	6	-	24	-	-	2
7	Sungai Raya	2	8	5	75	15	-	17
8	Sui. Ambawang	-	5	3	27	-	2	1
9	Kuala Mandor B	-	1	2	5	-	-	1
	2012	3	56	16	226	15	2	23

Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya 2013

Tahun 2012 jumlah anggota KUD 5.162 orang, meningkat dari tahun 2011 sejumlah 5.142 orang, anggota Non KUD pada tahun 2012 sejumlah 22.696 orang, meningkat dari tahun sebelumnya 21.587 orang.

F. Sarana dan Prasarana Umum

a. Perhubungan

Berdasarkan data Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Kubu Raya tahun 2013, Kondisi Jalan dan dan Jenis Permukaan jalan di Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut :

Tabel 2.36

Kondisi Jalan Di Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2009-2013

No.	Keadaan	Panjang Jalan Tahun (Km)				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Jenis Permukaan					
	a. Aspal	197,26	224,163	224,163	224,163	189,7
	b. Kerikil	25,55	25,050	25,050	25,050	7,4
	c. Tanah	189,483	161,900	196,700	196,700	171,9
	d. Beton	80,720	88,750	96,111	96,111	160,4
	Jumlah	460,963	499,863	542,024	542,024	542,024
2.	Kondisi Jalan					
	a. Baik	46,4	94,463	127,300	146,023	170,4
	b. Sedang	56,1	54,008	51,200	54,008	64,0
	c. Rusak	110,0	77,095	66,095	56,095	23,9
	d. Rusak Berat	246,8	257,800	246,100	243,736	271,1
	Jumlah	460,963	483,366	490,695	499,862	529,4

Sumber : Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kubu Raya, 2013

Dari aspek jenis permukaan jalan, ruas jalan yang sudah beraspal dan kerikil sejak dari tahun 2010, hampir tidak terjadi penambahan atau sepanjang 224.163 km dan 25.050 Km. Dalam hal ini prioritas penanganan jalan di Kabupaten Kubu Raya lebih diarahkan pada peningkatan jalan lingkungan dan jalan-jalan poros yang menjadi sentra penghubung antar wilayah dengan pusat kegiatan ekonomi. Umumnya kondisi jalan tersebut berada pada wilayah pedesaan atau wilayah pesisir yang hampir tidak memiliki akses terdekat dengan pusat kegiatan ekonomi produktif. Sehingga selama empat tahun terakhir, penanganan jenis jalan lebih diarahkan untuk membuka akses masyarakat terpencil. Pada jenis permukaan jalan lingkungan, ruas jalan beton bertambah dari 80.720 Km di tahun 2009, menjadi 160.4 Km di tahun 2013.

Perhubungan darat di Kabupaten Kubu Raya ditunjang oleh beberapa terminal dengan sebaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.37

JUMLAH TERMINAL DI KABUPATEN KUBU RAYA
Tahun 2012

Terminal	Lokasi	Luas Terminal (M ²)	Daya Tampung
Sungai Durian	Kec.Sungai Raya	3.500	50
Sungai kakap	Kec. Sungai kakap	888	30
Rasau Jaya	Kec. Rasau Jaya	5.625	100
KORPRI	Kec.Sungai Raya/Jeruju Besar	1.032	20

Sumber : Dinas Perhubungan KKR, 2012

Sementara itu, untuk mendukung pelayanan transportasi di wilayah terpencil dan pedalaman moda transportasi air makin ditingkatkan fungsi dan peranannya sebagai sarana mobilitas penduduk yang selama ini bertempat tinggal di pesisir sungai. Sebagai wilayah dengan geografis dikelilingi oleh air, keberadaan sungai memegang peranan sentral dalam kehidupan di masyarakat. Beberapa alur penting yang berfungsi menunjang transportasi sungai dalam jangka panjang di Kabupaten Kubu Raya diantaranya adalah Sungai Ambawang, Sungai Bunar, Sungai Landak, Sungai Mandor, Sungai Sepatah, Sungai Kapuas Kecil, Sungai Ambangah, Sungai Bulan, Sungai Kapuas, Sungai Terentang, Sungai Kelaban, Sungai Sepada, Sungai radat, Sungai Kubu, Sungai Arus Deras, Sungai Punggur Besar, Selat Sepok Laut, Sungai Durian Sebatang, Sungai Kerawang, Selat Padang Tikar, Sungai Beur, Sungai Lido, Sungai Bumbung, Sungai mentawak, masih berfungsi dengan baik dan sumber nafkah bagi penduduk terutama yang berprofesi sebagai nelayan.

Tabel 2.38

LOKASI, JENIS DERMAGA BESERTA FASILITAS YANG DIMILIKI DERMAGA KAPAL PENYEBRANGAN DI KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2011

No.	Lokasi dermaga	Jenis Dermaga	Tahun pembuatan	Uraian fasilitas	Luas M2	Kondisi
1.	Rasau Jaya, Kec. Rasau Jaya	Dermaga Moveble Bridge (MB)	1991/1992	Dermaga	144	Baik
				Gedung Operasional	300	
				Jembatan Dermaga	180	
				Ruang Hidrolik	16	
				Lap. Parkir	1000	
2.	Penyebrangan Parit Sarem (rasau Jaya teluk Pakedai)	Dermaga Ponton	2003/2004	Trestle	91	Baik
				Dermaga Ponton	172	
				Moveble Bridge (MB)	56	
				Areal Pelabuhan	4500	
				Jalan Masuk Dermaga	804	
				Lapangan Parkir	340	
				Gedung Kantor	127	
				Pos Operasional	24	
				Halte	12	
3.	Penyebrangan Sungai Nipah, Kec. Teluk Pakedai	Dermaga Ponton	2005/2006	Trestle	91	Baik
				Dermaga Ponton	172	
				Moveble Bridge (MB)	56	
				Areal Pelabuhan	4000	
				Jalan Masuk Dermaga	1000	
				Lapangan Parkir	400	
				Gedung Kantor	127	
				Pos Operasional	24	
				Halte	12	

Sumber : Dinas Perhubungan KKR, 2012

Kondisi perhubungan laut di kabupaten kubu raya sampai dengan saat ini masih terkendala kondisi pelabuhan yang tidak dapat dilabuhi oleh kapal-kapal besar. Pelabuhan Teluk Air dalam perencanaan regional menjadi pusat kegiatan wilayah, yang ditetapkan menjadi salah satu pelabuhan masuk provinsi Kalimantan Barat dan menjadi jalur primer serta kolektor

perhubungan laut dan sungai. Saat ini sudah tersedia DED pembangunan pelabuhan laut Teluk Air sebagai dasar perencanaan pengembangan.

Selanjutnya, kondisi perhubungan udara digambarkan melalui tabel arus pesawat terbang dan penumpang pesawat udara dibawah ini :

Tabel 2.39

Lalu lintas Angkutan Udara melalui Bandar Udara Supadio tahun 2012

No.	Bandara	Runaway	Pesawat Terbang		Penumpang		
			Berangkat	Datang	Berangkat	Berangkat	Transit
1	2	3	4	5	6	7	8
	Supadio	2.250m x 45m	10.599	10.601	1.157.764	1.128.452	2.600

Sumber : Kalimantan Barat Dalam Angka: 2013

b. Sumber Daya Air

Pembangunan sumber daya air ditujukan pada pengendalian dan pengurangan dampak kerusakan akibat banjir, abrasi dan erosi pantai, terutama pada wilayah berpenduduk padat, wilayah strategis dan pusat-pusat perekonomian. Pengembangan sarana irigasi sebetulnya cukup pesat terutama dalam pengembangan irigasi rawa. Total luas daerah irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya seluas 1.920 Ha, dimana sekitar 576 ha dalam kondisi rusak ringan dan 1.056 ha berada dalam kondisi rusak berat. Sementara Irigasi rawa sendiri seluas 124.400 ha, dengan kondisi rusak ringan seluas 37.320 ha dan rusak berat sekitar 68.420 ha.

Tabel 2.40

SARANA DAN PRASARANA SDA DI KABUPATEN KUBU RAYA
Tahun 2011

Jenis	Daerah Irigasi	Daerah Rawa (M')	Jumlah (M')	Kondisi Rusak
BANGUNAN				
- Bendungan	4	6	10	6 BH
- Sadap	9	7	16	10 BH
- Pintu air		456	456	274 BH
- Pelengkap	29	910	947	568 BH
- Kantor Pengamat		10	10	6 BH
- Rumah Jaga	1	11	12	7 BH
SALURAN				
- Primer	-	455.147	455.147	273.088
- Sekunder	11.000	1.283.841	1.294.841	776.905
- Tersier	41.000	1.299.075	1.340.075	804.045
- Pembuang	15.000	60.145	75.145	45.087
LAIN-LAIN				
- Saluran Pasangan	450	16	466	280
- Tanggul Banjir	2.500	411.663	414.163	248.498
- Jalan Inspeksi	22.300	143.410	165.710	99.426

Sumber: Bina Marga Kab. Kubu Raya, 2011

Dalam upaya penyediaan penyediaan air bersih di masyarakat, kebanyakan penduduk di Kabupaten Kubu Raya menggunakan air sungai dan air hujan sebagai penunjang kegiatan rumah tangga. Air bersih belum sepenuhnya mampu dilayani oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM),

sehingga kebutuhan air bersih masyarakat masih dilakukan dengan menampung air hujan, air tanah dan air permukaan.

Tabel 2.41
PERSENTASE RUMAH TANGGA DI KABUPATEN KUBU RAYA
MENURUT SUMBER UTAMA AIR MINUM 2012

Sumber Utama Air Minum	2009	2010	2011	2012
Air kemasan bermerek	1,88	3,49	1,42	1,55
Air isi ulang	1,90	4,75	5,71	6,72
Ledeng meteran	0,16	-	0,64	-
Sumur terlindungi	0,15	-	-	-
Sumur tidak terlindungi	0,47	-	-	-
Air Sungai	4,98	0,33	1,55	0,12
Air Hujan	90,46	91,43	90,68	91,61

Sumber :BPS Kabupaten Kubu Raya, 2013

Kebutuhan air bersih bagi masyarakat di Kabupaten Kubu Raya dapat dipenuhi melalui jaringan perpipaan dari PDAM, sumber air tanah, Program Pamsimas serta dari PNPM Mandiri perdesaan. Berikut ini merupakan gambaran air minum yang disalurkan PDAM sampai Tahun 2011.

Tabel 2.42
DISTRIBUSI AIR BERSIH PDAM MENURUT JENIS PELANGGAN
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2012

No	Jenis Pelanggan	Jumlah Pelanggan	Volume (M ³)
1	Hidran Umum/Sosial Umum	6	-
2	Rumah Ibadah/Sosial Khusus	34	149
3	WC Umum	1	-
4	Yayasan Sosial	11	644
5	Sekolah Negeri	11	4.434
6	Rumah Sakit	1	-
7	Rumah Permanen	9.152	78.576
8	Ruko Perdagangan	851	11.695
9	Instansi Pemerintah	19	680
10	Industri Besar	6	273
11	Niaga Besar	16	1.506

Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya, 2013

c. Perumahan dan Pemukiman

Dalam rangka penyediaan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman, periode tahun 2011-2012 Kabupaten Kubu Raya telah melakukan rehabilitasi pembangunan rumah tidak layak huni yang tersebar di beberapa kecamatan melalui APBD, sedangkan melalui sumber pendanaan APBN program rehabilitasi pembangunan rumah tidak layak huni sudah didanai sejak tahun 2009-2012. Substansi inti perumahan rakyat meliputi penyediaan tempat tinggal dan lingkungan layak huni, khususnya untuk

masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yang meliputi pembangunan rumah baru dan peningkatan kualitas perumahan. Perbaikan rumah dilakukan dengan memberikan bantuan ramuan bahan-bahan untuk perbaikan kondisi fisik rumah katagori tidak layak, yang terkonsentrasi di daerah pesisir dan perkotaan, untuk mengurangi kekumahan lingkungan yang berdampak pada meningkatnya berbagai permasalahan kesehatan maupun sosial. Terkait dengan hal tersebut, rumah layak huni dari keseluruhan rumah yang terdata di kabupaten Kubu Raya sebanyak 109.515 unit rumah, jumlah rumah yang layak mencapai 105.983 unit atau sekitar 96,77.

Pada tahun 2012, rumah kumuh yang direhabilitasi melalui alokasi bantuan Kementerian Perumahan Rakyat di Kabupaten Raya sebanyak 772 rumah. Sedangkan pemerintah Kabupaten Kubu Raya sendiri melakukan penanganan rumah layak huni sebanyak 465 unit rumah, yang sebagian besar terkonsentrasi di Kecamatan Sungai Kakap sebanyak 528 unit dan Kecamatan Sungai Raya sebanyak 360 unit.

Tabel 2.43
PENANGANAN RUMAH LAYAK HUNI TAHUN 2012

KEC	DESA	SUMBER	
		APBD	MENPERA
Terentang	Tlk.Empening	-	17
	Permata	-	8
Tlk.Pekedai	Tlk.Pekedai		
	Hulu	-	25
Sungai	Kuala Dua	30	10
	S.Asam	-	35
Raya	Kapur	21	58
	Mekar Baru	5	-
	Limbung	20	-
	Arang Limbung	20	-
	Tebang		
	Kacang	5	10
	Tlk.Kapuas	5	14
	Mekar Sari	-	10
	S.Ambangah	20	10
	S. Raya	17	-
	Parit Baru	16	29
Sungai	Punggur kecil	19	31
Kakap	Sepuk Laut	-	19
	S.belidak	10	28
	S.Itik	8	27
	S,Kakap	31	20
	Jeruju Besar	15	28
	Kalimas	16	82
	Punggur Besar	12	21
	S,Rengas	25	39
	Pal IX	19	78
Sungai	Jawa Tengah	10	-
	ambawang	S.Abwng Kuala	31
	Mega Timur	23	-
	Durian	-	29
Rasau	R.Jaya Umum	21	-

Jaya	R.Jaya 1	19	-
	R.Jaya 2	5	-
	Bintang Mas	17	-
	Rasau Jaya 3	5	-
	Pematang 7	10	-
Kubu	Pinang Dalam	-	51
Kuala	Retok	2	-
Mandor B	S.Enau	-	3
Batu	Padang Tikar 2	-	20
Ampar	Padang Tikar 1	-	10
	Tasik Malaya		10
	Sumber Agung		10
TOTAL		465	772

Sumber : Dinas Cipta Karya dan Kebersihan Tahun 2013

d. Komunikasi dan Informatika

Pencapaian bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Kubu Raya relative memadai, walaupun masih desa di kabupaten Kubu Raya yang belum terjangkau jaringan Komunikasi Seluler, untuk jaringan Internet sudah terjangkau di 9 Kecamatan, sebagaimana data di bawah ini :

Tabel 2.44

Capaian Kinerja Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010-2013

No	Indikator	Tahun			
		2010	2011	2012	2013
1	Tersedianya sarana informasi milik				
	Pemda :				
	a. Website	1 sistem	1 sistem	1 sistem	1 sistem
	b. Media Center	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
	c. Data Base Informasi	-	-	1 sistem	1 sistem
	d. Data Base Postel	-	1 sistem	1 sistem	1 sistem
	e. MPLIK	-	-	5 Unit	5 Unit
	f. E - Mustika	-	-	-	1 Unit
	g. KIM	-	-	9 Klp	9 Klp
	h. Pameran Informatika	-	-	1 Kali	1 Kali
	i. Bandwidth	5 MB	5 MB	5 MB	5 MB
2	Tersedianya sarana komunikasi milik				
	Pemda :				
	a. Jaringan Komunikasi	7 SKPD	18 SKPD	30 SKPD	30 SKPD

	b. Tower Jaringan Intranet Kec.	-	5 Kec	9 Kec	9 Kec
	c. Mail Server	-	-	-	1 sistem
3	Tersedianya Sistem Administrasi Elektronik :				
	a. Surat Elektronik	-	-	3 SKPD	3 SKPD
	b. LPSE	-	1 sistem	1 sistem	1 sistem

Sumber : Dinas Kominfo Kab. Kubu Raya 2013

Media cetak yang beredar di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2011 berdasarkan lokasi penerbitannya ada 28 buah, 4 penerbit ada di Kabupaten Kubu Raya, 5 Penerbit berada di luar Kabupaten Kubu Raya, 19 penerbit di luar propinsi Kalimantan Barat. Dari 28 media cetak yang beredar di Kabupaten Kubu Raya, 8 diantaranya adalah surat kabar, 7 berupa tabloid, 10 berupa majalah dan 2 berupa buletin dan 1 lain-lain.

e. Penataan Ruang

Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Kubu Raya disusun sebagai amanat UU nomor 26 Tahun 2007 bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang berbasis pertanian dan perikanan, dengan pengembangan wilayah pesisir dan perkotaan sebagai beranda depan Kalimantan Barat.

Guna mewujudkan tujuan penataan ruang tersebut ditetapkan beberapa kebijakan penataan ruang Kabupaten Kubu Raya yang terdiri atas :

- a. pengembangan fungsi dan peningkatan peran dari pusat-pusat kegiatan dan/atau kawasan strategis dengan memacu peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana wilayah;
- b. pengembangan kawasan-kawasan yang berbasis pertanian dengan konsep agrobisnis dan agroindustri;
- c. pengembangan kawasan-kawasan yang berbasis perikanan;
- d. penataan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- e. pengembangan dan penataan kawasan perkotaan sehingga menjadi kawasan yang produktif, aman, nyaman, dan berdaya saing sesuai potensi dan daya dukung lingkungan;
- f. peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya;
- g. pemeliharaan, pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup melalui kajian terhadap lingkungan, dalam rangka penerapan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkesinambungan; dan

- h. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Adapun cakupan pelayanan penataan ruang sendiri antara lain meliputi penyediaan informasi rencana tata ruang wilayah, peran serta masyarakat dalam proses penyusunan tata ruang, penerbitan izin pemanfaatan ruang, tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang tata ruang serta penyediaan ruang terbuka hijau.

Saat ini Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang di Kabupaten Kubu Raya telah mendapat persetujuan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Kementerian Pekerjaan Umum, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Kubu Raya telah pula disampaikan ke DPRD Kabupaten Kubu Raya untuk dibahas guna ditetapkan menjadi RTRW Kabupaten Kubu Raya.

Pencapaian yang telah dicapai dalam Program Penyelenggaraan Penataan Ruang yang mendukung pembangunan infrastruktur pada Tahun 2012 adalah telah diselesaikan Rancangan Akhir RTRW Kabupaten Kubu Raya, untuk dipadu serasikan perpetaannya dengan RTRW Provinsi RTRW Nasional. Selain itu, pada ibu kota kecamatan, sudah disusun tata ruang IKK, sehingga menjadi arah bagi pengembangan pemanfaatan ruang untuk pembangunan di kecamatan-kecamatan. Sementara itu, sebagai upaya menata pemanfaatan lahan dan memberikan ruang bagi kawasan hijau, telah disusun pola penataan ruang hijau yang mengalokasikan lahan seluas 1.393,55 Hektar untuk ruang terbuka hijau di Wilayah Kabupaten Kubu Raya dan luas wilayah HPL/HGB sebesar 226,78 hektar.

f. Perencanaan Pembangunan

Dokumen perencanaan daerah yang menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana tertuang dalam Perda No 16 Tahun 2009 tentang RPJP Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029, perencanaan jangka menengah yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang RPJMD Kabupaten Kubu Raya tahun 2009-2014. Pelaksanaan perencanaan tahunan RPJMD dijabarkan dalam RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati setiap tahunnya. RKPD dimaksud merupakan implementasi target tahunan RPJMD. Ketersediaan dokumen tersebut dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

Tabel 2.45
Dokumen Perencanaan Pembangunan
Tahun 2009-2013 Kabupaten Kubu Raya

Indikator	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Bappeda Kabupaten Kubu Raya, 2013

g. Pemuda dan Olah Raga

Secara umum, Kualitas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kubu Raya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dukungan Pemerintah daerah sangat menentukan keberhasilan pembinaan pemuda dan olah raga pada event olaha raga baik tingkat provinsi maupun nasional. Untuk tahun 2014 ini akan dimulai pembangunan stadion olah raga berikut sarana pendukung lainnya yang nantinya juga akan digunakan sebagai tempat pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat.

Tabel 2.46
PERKEMBANGAN SENI, BUDAYA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2010 - 2014

No.	Capaian Pembangunan	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	1	19	49	40	1
2.	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk	-	-	-	-	-
3.	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	5	7	10	19	19
4.	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk	38	40	45	50	50

Sumber: Dinas Kebudayaan Pariwisata pemuda dan Olahraga Kabupaten Kubu Raya, 2014

Tabel 2.47
PERKEMBANGAN SENI, BUDAYA DAN OLAH RAGA MENURUT KECAMATAN DI
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2014

No.	Kecamatan	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk
1.	Batu Ampar	1	-	-	1
2.	Terentang	-	-	-	1
3.	Kubu	4	-	-	2

4.	Teluk Pakedai	5	-	-	2
5.	Sungai Kakap	32	-	-	4
6.	Rasau Jaya	6	-	-	8
7.	Sungai Raya	43	-	19	30
8.	Sungai Ambawang	13	-	-	2
9.	Kuala Mandor B	6	-	-	-
Jumlah		110	-	19	50

Sumber: Dinas Kebudayaan Pariwisata pemuda dan Olahraga Kabupaten Kubu Raya, 2014

h. Tempat Ibadah

Pengembangan Tempat ibadah merupakan bagian dan langkah strategis Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk mencapai Misi Menciptakan SDM yang berkualitas melalui melalui peningkatan pendidikan dan kesehatan, mengembangkan tatanan kehidupan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, berbudaya & bertoleransi serta meningkatkan kesejahteraan sosial

Tabel 2.48

Banyaknya Rumah Ibadah Dirinci Menurut Agama
Kabupaten Kubu Raya 2012

Islam		Katholik Gereja	Protestan Gereja	Budha Vihara	Hindu Pura	Konghucu Kelenteng
Masjid	Surau					
577	506	75	33	38	5	8

Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya 2013

2.1.3.2 Layanan Urusan Pilihan

Penyelenggaraan urusan pilihan meliputi urusan pertanian, kehutanan, energy dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian sebagaimana berikut :

a. Urusan Pertanian

1) Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan

Sub sektor tanaman bahan makanan sangat dipengaruhi oleh produksi padi. Perubahan musim dan cuaca serta bertambah atau berkurangnya luas panen menjadi salah satu penyebab naik dan turunnya produksi padi.

Produksi padi tahun 2012 di Kabupaten Kubu Raya mengalami Penurunan sebesar 0,91 persen, dimana produksinya 206.893 ton pada tahun 2011 turun menjadi 205.001 ton di tahun 2012. Penurunan produksi padi disebabkan adanya penurunan luas panen, dari 60.694 Ha pada tahun 2011 turun menjadi 60.032 Ha di tahun 2012 atau turun sebesar 1,09 persen sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2,49

Luas Panen dan Produksi Tanaman Padi
Periode Januari-Desember
di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012

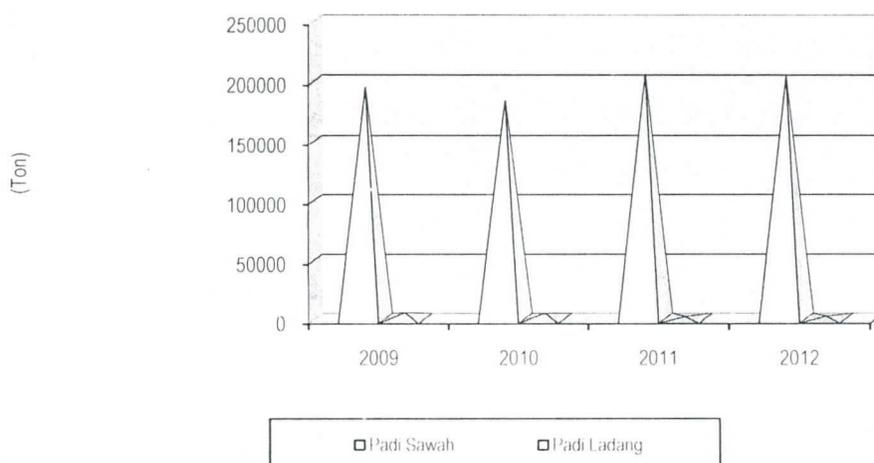
Kecamatan	Luas Panen (Ha)	Rata-Rata Produksi (Kuintal/Ha)	Produksi (Ton)
(1)	(2)	(3)	(4)
010 Batu Ampar	8.473	32,83	27.818
020 Terentang	2.325	35,16	8.176
030 K u b u	10.659	32,87	35.037
040 Teluk Pakedai	3.758	33,73	12.676
050 Sungai Kakap	17.749	35,59	63.163
060 Rasau Jaya	3.128	34,19	10.694
070 Sungai Raya	9.836	34,48	33.915
080 Sungai Ambawang	1.664	34,37	5.719
090 Kuala Mandor B	2.440	31,98	7.803
2012	60.032	34,15	205.001
2011	60.694	34,09	206.893
2010	55.796	33,72	188.167
2009	59.603	33.45	199.361

Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya 2013

Penurunan produksi padi di tahun 2012 terjadi pada komoditi tanaman padi sawah sebesar 1,04 persen, atau dari 205.670 ton dengan luas panen 60.105 Ha pada tahun 2011 turun menjadi 203.523 ton dan luas panen 59.330 Ha di tahun 2012. Untuk produksi dan luas panen pada komoditi padi ladang terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 20,85 persen, atau dari 1.223 ton dengan luas panen 589 Ha pada tahun 2011 naik menjadi 1.478 ton dan luas panen 702 Ha di tahun 2012. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2012 ini masih banyak petani yang melakukan penanaman padi ladang. Peningkatan produksi padi ladang ini sedikit berpengaruh pada jumlah total produksi dan luas panen tanaman padi di tahun 2012.

Grafik 2.3

Produksi Padi Sawah dan Ladang Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2012



Sumber : BPS Kab. Kubu Raya 2013

2) Sub Sektor Perkebunan

Sub sektor perkebunan memberikan kontribusi produksi yang didominasi oleh kelapa sawit, karet dan komoditi kelapa dalam. Usaha perkebunan umumnya di kelola oleh masyarakat (kebun rakyat), namun ada beberapa perusahaan swasta dan BUMN yang mengusahakan perkebunan dalam skala besar.

Tabel 2.50

Perkembangan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten Kubu Raya 2011

No	Nama Perusahaan	Proses Perizinan		
		Izin Lokasi (Ha)	IUP (Ha)	HGU (Ha)
1	2	3	4	5
1	PT.Bumi Pratama Khatulistiwa	15.000	15.000	4.814,46
2	PT.Mitra aneka Rezeki	18.500	18.500	-
3	PT.Rezeki Kencana	20.000	20.000	2.812,70
4	PT.Sintang Raya	13.500	11.129,9	-
5	PT.Fadjar Saudara Lestari	15.500	15.500	-
6	PT.Graha Agro Lestari	20.000	15.566,34	-
7	PT.Palmdale Agro Asia lestari	20.000	12.806	-
8	PT.Gerbang Benua Raya	20.000	-	-
9	PT.Parna Agro Mas	8.000	7.500	4.621
10	PT.Nusa Jaya Perkasa	10.000	-	-
11	Pt.Kusuma Alam Sari	17.750	-	-
12	PT.Rizky Sawit Ambawang	12.000	-	-
13	PT.Sumatera Unggul Makmur	18.000	-	-
14	PT.Putra Lirik Domas	8.000	-	-
15	PT.Bumi Lestari Kurnia Semesat	1.024,87	-	-
16	PT.Sawit Jaya Makmur	15.250	-	-
17	PT.Sebukit Inter Nusa	10.000	10.000	-
18	PT.Agro Inti Sejahtera	8.000	8.000	-
19	PT.Cipta Tumbuh Berkembang	11.305	-	-
22	PT.Ichiko Agro Lestari	10.000	9.000	-
23	PT.Punggur alam Lestari	10.500	10.500	-
24	PT.Kubu Agrindo Utama Mas	5.000	-	-
25	PT. Perkebunan Nusantara 13	6.000	-	-
26	PT.Bina Agor Lestari	4.000	-	-

27	PT.surya Borneo Asri	4.000	4.000	-
28	PT.Bumi AlamSentosa	7.500	-	-
29	PT.Sawit Subur Sejati	2.000	-	-
30	PT. Werdy	1.000	-	-
31	PT.Togos Gopas	18.000	-	-

Sumber : Dinas Bunhutam Kab. Kubu Raya 2012

Berdasarkan data dari Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Kubu Raya tercatat bahwa pada tahun 2012 jumlah petani perkebunan berjumlah 47.700 orang. Jumlah petani tertinggi terdapat pada perkebunan karet yaitu sebesar 16.924 orang sedangkan yang terendah ada di petani perkebunan cengkeh dengan jumlah sebesar 19 orang. Total luas area tanaman perkebunan baik yang belum menghasilkan; menghasilkan; maupun tua/rusak adalah sebesar 126.673 Ha. Dari jumlah tersebut, luas tanam yang menghasilkan merupakan luas tanam terbesar yakni sebesar 65.410 Ha, kemudian belum menghasilkan 47.925 Ha, dan tua/rusak sebesar 13.338 Ha. Secara umum perkembangan produksi tanaman perkebunan di kabupaten Kubu Raya mengalami peningkatan sangat baik dari tahun 2011 ke tahun 2012 sebesar 24.236 ton atau naik sebesar 46,08 persen. Sedangkan dari tahun 2010 ke tahun 2011 produksi tanaman Perkebunan mengalami penurunan sebesar 14.935 ton atau turun sebesar 22,12 persen.

3) Sub Sektor Peternakan

Sub sektor peternakan di Kabupaten Kubu Raya merupakan penyumbang protein yang cukup tinggi untuk memenuhi kebutuhan gizi di Kalimantan Barat.

Pada tahun 2012 untuk semua populasi ternak dan jenisnya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, hal ini dapat terlihat dari tabel berikut :

Tabel 2.51
Jumlah Populasi Ternak Besar, Kecil dan Unggas
di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012

Tahun	Ternak Besar		Ternak Kecil			Unggas		
	Sapi	Kerbau	Babi	Kambing	domba	Ayam Pedaging	Ayam Petelur	Itik
2012	18.064	161	34.680	41.620	109	6.151.044	187.967	81.772
2011	17.679	143	34.521	39.643	97	4.184.900	175.027	66.385

Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya 2013

4) Sub Sektor Perikanan

Sub sektor perikanan merupakan salah satu potensi unggulan di Kabupaten Kubu Raya dan merupakan pemasok utama kebutuhan pangan di Kalimantan Barat.

Tabel 2.52

Produksi dan Nilai Produksi Perikanan
Di Kabupaten Kubu Raya 2012

Tahun	Perikanan Laut		Perikanan Umum		Perikanan Budi Daya	
	Produksi (ton)	Nilai Produksi (000000)	Produksi (ton)	Nilai Produksi (000000)	Produksi (ton)	Nilai Produksi (000000)
2009	-	-	124,9	14.113,75	1.601,5	26.738.204
2010	7.906,4	92.444	93,90	1.652,4	1.388,0	27.462.000
2011	15.040,3	110.050,9	61,61	2.513,2	1.160,24	19.495.620
2012	18.612,6	131.127,4	124,9	14.113,75	1.601,5	26.738.204

Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya 2013

Peningkatan produksi perikanan, terutama pada perikanan budidaya, disumbang oleh keberhasilan pengembangan kawasan sentra produksi ikan (minapolitan) serta peningkatan sarana dan prasarana perikanan. Pada produksi perikanan laut tahun 2012 terjadi peningkatan tangkapan ikan sebesar 3.572,3 ton atau meningkat sekitar 23,75% dari tahun 2011, Secara umum produksi dan nilai produksi perikanan di kabupaten Kubu Raya mengalami peningkatan dan berpeluang besar untuk terus ditingkatkan mengingat potensi letak geografis dan luas bentangan laut dan perairan luas dan pemanfaatan yang belum optimal.

b. Urusan Kehutanan

Hutan adalah suatu kesatuan kosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (UU No.41 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 2). Berdasarkan data Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2012 tercatat luas lahan hutan seluas 831.679,56 Ha dengan rincian: 388.392,73 (46,70 %) areal dalam kawasan selebihnya adalah Areal Di Luar Kawasan Hutan atau Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 443.286,83 Ha (53,30%). Jika ditinjau dari tingkat kekritisannya, pada tahun 2012 terlihat bahwa tingkat kekritisian ada pada status lainnya (Agak kritis; potensi kritis dan tidak ada data) yakni seluas 519.440,29 Ha; disusul kemudian tidak kritis yakni seluas 155.837,86 Ha dan paling sedikit potensinya adalah sangat kritis yakni seluas 875,11 Ha. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel

Tabel 2.53
Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012

No	Jenis kawasan Hutan	Tahun		
		2010	2011	2012
1	Areal Dalam Kawasan	388.392,73	388.392,73	388.392,73
	a. Hutan Lindung (HL)	171.477,35	171.477,35	171.477,35
	b. Hutan Produksi (HP)	98.104,39	98.104,39	98.104,39
	c. Hutan Produksi Konversi (HPK)	53.041,54	53.041,54	53.041,54
	d. Hutan Produksi Terbatas (HPT)	65.769,45	65.769,45	65.769,45
2	Areal Di Luar Kawasan Hutan atau Areal Penggunaan Lain (APL)	443.286,83	443.286,83	443.286,83
	Jumlah	831.679,56	831.679,56	831.679,56

Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya 2013

Potensi sumber daya hutan dalam bentuk HPH di Kabupaten Kubu Raya relatif berkurang sejak tahun 1990. Aktivitas kehutanan saat ini digantikan oleh kegiatan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR). HTR dilaksanakan pada Hutan Produksi yang tidak produktif dan tidak dibebani izin/hak lain. Berdasarkan hasil penelaahan pada Peta penunjukan Kawasan Hutan dan perairan Propinsi Kalimantan Barat (SK Menhutbun No 259/Kpts-II/2000 sebagian areal Hutan Produksi telah diperuntukan untuk kegiatan Investasi IUPHHK-Hutan Alam dan kegiatan IUPHHK hutan Tanaman namun terdapat lebih kurang \pm 1.000 ha Hutan Produksi yang dapat dipersiapkan untuk pencadangan kegiatan HTR. Selain kegiatan-kegiatan tersebut terdapat aktivitas Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan Alam (IUPHHK- HA), Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK- HT), Pengumpulan hasil Hutan Non Kayu, dan usaha Pemanfaatan Kayu (IPK).

c. Urusan Pertambangan

Kabupaten Kubu Raya memiliki potensi tambang yang tersebar di beberapa kecamatan. Jenis Tambang yang ada di Kabupaten Kubu Raya antara lain Andesit, Granit, Gambut, Pasir Sungai, Pasir Kuarsa, Gas Methan dan Bauksit. Dari sembilan kecamatan yang ada di Kabupaten Kubu Raya, semuanya memiliki potensi tersendiri. Kecamatan Batu Ampar misalnya memiliki potensi Andesit/Dasit, Granit/Diorit/Granodiorit dan Gambut. Sedangkan untuk jenis Pasir sungai terdapat di Kecamatan Terentang, Sungai Raya dan Kuala Mandor B.

Tabel 2.54

Jumlah Perusahaan Pertambangan dan Penggalian serta Jumlah Tenaga Kerja Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012

No	Kecamatan	Jumlah Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja
1.	Batu Ampar	1	7
2.	Terentang	6	42
3.	Kubu	2	14
4.	Teluk Pakedai	-	-
5.	Sungai Kakap	-	-
6.	Rasau Jaya	-	-
7.	Sungai Raya	21	147
8.	Sungai Ambawang	4	28
9.	Kuala Mandor B	-	-
JUMLAH		32	238

Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya 2013

Tabel 2.55

POTENSI PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN DIRINCI MENURUT JENIS BAHAN TAMBANG DAN KECAMATAN DI KABUPATEN KUBU RAYA

No	Kecamatan	Jenis Tambang/Galian	Keterangan
1.	Batu Ampar	Andesit/Dasit (AM), Granit/Diorit/ Granodiorit, Gambut	
2.	Terentang	Pasir Sungai	
3.	Kubu	Granit, Pasir Sungai	
4.	Teluk Pakedai	Pasir Kuarsa	
5.	Sungai Kakap	Gas Methan (CH ₄)	
6.	Rasau Jaya	Gambut	
7.	Sungai Raya	Pasir Sungai, Gambut	
8.	Sungai Ambawang	Bauksit, Pasir Kuarsa, Gambut	
9.	Kuala Mandor B	Pasir Sungai	

Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya 2013

d. Urusan Perdagangan

Kabupaten Kubu Raya secara geografis wilayahnya berbatasan dengan Ibu Kota Propinsi Kalimantan Barat, dengan kondisi tersebut memiliki konsekuensi yaitu sektor perdagangan memiliki peranan yang cukup penting. Banyaknya perusahaan perdagangan yang ada di Kabupaten Kubu Raya yang memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) selama tahun 2012 sebanyak 659 perusahaan perdagangan. Dari jumlah tersebut, jenis perusahaan kecil paling dominan dalam kepemilikan SIUP yaitu sebesar 491 perusahaan atau 74,51%, kemudian perdagangan menengah sebanyak 161 perusahaan atau 24,43% dan perdagangan besar sebanyak 7 perusahaan atau 1,06%. Adapun penyebaran Tanda Daftar Perusahaan (TDP) di kabupaten Kubu Raya tercatat 478 buah. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) terbesar tercatat pada perusahaan perseorangan

sebanyak 205 perusahaan, perusahaan berbentuk Comanditer (CV) sebanyak 194 perusahaan, dan untuk perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) sebanyak 58 dan Koperasi 20 unit. Sedangkan badan usaha asing dan lainnya tidak ada yang terdaftar.

Tabel 2.56
Neraca Perdagangan Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2009- 2011

Tahun	Nilai		Surplus/ Defisit
2009	584.145,00	432.340,18	151.804,82
2010	690.957,96	524.652,94	166.305,02
2011	992.599,60	834.789,74	157.809,86

Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya 2012

e. Urusan Perindustrian

Perindustrian atau industry memberikan kontribusi dalam PDRB Kabupaten Kubu Raya tahun 2013 sebesar 44,15 % atau mengalami penurunan dari tahun 2012 sebesar 44,26%. Kontribusi sector industry mengalami penurunan dikarenakan dalam kurun 5 tahun terakhir industry di Kalimantan barat (Kab. Kubu Raya) yang secara umum masih bertumpu pada industry pengolahan kayu secara berlahan mengalami penurunan karena sulitnya bahan baku kayu, disamping itu terbatasnya infrastruktur dasar, pelabuhan dan energy menjadi kendala masuknya investasi skala besar.

Sesuai dengan potensi sumber daya alam yang ada, industry yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah adalah industry makanan, industry pengolahan berbasis CPO dan industry karet.

f. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Berkaitan dengan penyediaan energy, dalam perhitungan proyeksi kebutuhan energi listrik, proyeksi kebutuhan listrik, di Kabupaten Kubu Raya sampai tahun 2028 diperkirakan sebesar 174,938.54 Kwh. Terkait dengan itu, upaya untuk menutupi kesenjangan masyarakat tidak berlistrik, dilakukan antara lain dengan penyediaan sambungan bersubsidi berkerja sama dengan PLN Wilayah.

Pencapaian ketenagalistrikan pada dasarnya diarahkan untuk meningkatnya rasio elektrifikasi. Peningkatan rasio elektrifikasi tersebut juga didukung oleh bertambahnya kapasitas pembangkit seiring dengan rencana pembangunan pembangkit listrik dari program pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat di Kecamatan Batu Ampar, serta beberapa pembangkit listrik lainnya.

TABEL 2.57
PEMASANGAN ENERGI TENAGA SURYA ENERGI
DI KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2011

Kecamatan	Desa	Jumlah
Sungai Raya	Gn.Tamang	425
	Sungai Asam	50
	Pulai Limbung	126
Sungai Ambawang	Teluk Bakung	50
	Pasak Piang	20
Teluk Pa'kedai	Sungai deras	20
Terentang	Terentang Hulu	30
	Sungai Dungun	38
Total		759

Sumber : Dinas Pertambangan Dan Energi, Prov KalBar, 2012

Di tahun 2012, pemenuhan listrik sambungan baru bagi rumah penduduk yang belum dialiri listrik namun memiliki potensi pelanggan sudah dilakukan di beberapa desa. Desa Mekar Sari SP-2 Makmur, Desa Cahaya Baru, Desa Sekunder C, Desa Tanjung Wangi Patok 50, Desa Batu Ampar Dsn. Parot Pak Tahir, Desa Batu Ampar Dsn. Gunung Kruwing, Desa Teluk Bayur Dsn. Simpur (lanjutan), Desa Terentang Hilir Dsn. Karya Tani, Desa Tanjung Harapan, Teluk Empening, merupakan pencapaian perluasan jaringan untuk memenuhi rasio desa yang mendapatkan aliran listrik. Pada tahun 2013 rencana pengembangan dan perluasan jaringan bagi desa yang belum mendapatkan pelayanan listrik, ditujukan untuk memenuhi kapasitas dan daya terpasang listrik sehingga dapat menjangkau lebih banyak pelanggan. Upaya tersebut ditempuh dengan kerjasama kesepakatan pembangunan (K-lisda/sambungan 1.000 pelanggan yang digagas oleh PLN dan Kabupaten Kubu Raya.

g. Urusan Pariwisata

Benda cagar budaya di Kabupaten Kubu Raya cukup banyak, yang terbagi dalam benda purbakala bergerak dan tidak bergerak. Jumlah benda cagar budaya di Kabupaten Kubu Raya pada Tahun 2012 sebanyak 17 unit antara lain Makam ismail mundu, Makam Panglima Raja Kubu, Keraton Kubu, Pekong tengah Laut sedangkan tempat rekreasi yang ada di Kabupaten Kubu

Raya sekitar 59 yang menyebarkan di beberapa kecamatan.

Pada Tahun 2012 banyaknya wisatawan nusantara (wisnus) yang tercatat oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kubu Raya sebanyak 54.120, sedangkan kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) pada Tahun 2012 sebanyak 3.735 orang.

h. Urusan Transmigrasi

Pembangunan Transmigrasi dilaksanakan berbasis kawasan yang memiliki keterkaitan dengan kawasan sekitar sehingga membentuk suatu sistem pengembangan ekonomi wilayah.

Penempatan warga Transmigrasi di Kabupaten Kubu Raya telah dituangkan dalam Tata Ruang Wilayah Kabupaten. Pada tahun 2011 jumlah areal yang diperuntukan untuk transmigrasi sudah mencapai 132.257 Ha dengan daya tampung warga transmigrasi 2.594 KK. Terkait dengan upaya solidaritas penanganan musibah erupsi merapi, Kabupaten Kubu Raya sudah menyiapkan lahan cadangan transmigrasi terpadu di Kecamatan Batu Ampar seluas 16.740 Ha. Lokasi pencadangan transmigrasi baru di Batu Ampar dengan luas 6.775 Ha dipersiapkan untuk menampung 1.355 KK yang terbagi meliputi 4 Satuan Pemukiman (SP). Pada lokasi Padu Empat dengan luas 5.145 Ha direncanakan menampung sekitar 1.029 KK yang terbagi atas 3 SP dan lokasi Cabang Ruang seluas 4.840 Ha direncanakan menampung 968 KK yang terbagi menjadi 3 SP. Untuk mendukung rencana tersebut, pencapaian pada tahun 2011 yang sudah dilaksanakan antara lain peningkatan peningkatan jalan arteri primer Batu Ampar – Sei Kerawang, peningkatan jalan poros SP-1 Padang Tikar L-3m (Sub Kaw. Sei Kerawang), peningkatan jalan Poros SP-2 Padang Tikar L-3m (Sub. Kaw. Sei Kerawang), penyusunan Rencana Teknis Unit Pemukiman Transmigrasi (RTUPT), penyusunan RTRW Kepulauan Batu Ampar, peningkatan Dermaga Kayu Cabang Ruan, rehabilitasi dan penambahan Kelas SD Swasta Cabang Ruan, rehabilitasi Gedung SD Padang Tikar SP-1, rehabilitasi Gedung SD Padang Tikar SP-2.

TABEL 2.58

JUMLAH TRANSMIGRASI SWAKARSA MANDIRI (TSM) MENURUT TAHUN PENEMPATAN

No	Lokasi	Tahun Penempatan			Jumlah Penempatan		
		1994/1995	1995/1996	1998/1999	1994/1995	1995/1996	1998/1999
1.	Rasau Jaya						
	Rasau Jaya Umum	150	577	1994/1995	150	577	1994/1995
	Rasau Jaya Umum	75	295	1995/1996	75	295	1995/1996
	Rasau Jaya II	25	85	1995/1996	25	85	1995/1996
	Rasau Jaya III	100	...	1998/1999	100	...	1998/1999
	Rasau Jaya III	70	...	2001	70	...	2001

2.	Kubu						
	Sungai Terus	100	290	1994/1995	100	290	1994/1995
	Teluk Nangka	125	432	1994/1995	125	432	1994/1995
	Jangkang I	125	369	1994/1995	125	369	1994/1995
	Ambawang	100	545	1994/1995	100	545	1994/1995
	K u b u	151	573	1995/1996	151	573	1995/1996
	Olak-Olak Kubu	132	484	1995/1996	132	484	1995/1996
	Kubu	100	438	1996/1997	100	438	1996/1997
	Air Putih	32	128	1996/1997	32	128	1996/1997
	Kampung Baru	25	102	1996/1997	25	102	1996/1997
	Kampung Baru	48	176	1997/1998	48	176	1997/1998
	Olak-Olak Kubu	73	...	1998/1999	73	...	1998/1999
	Kampung Baru	62	...	1998/1999	62	...	1998/1999
	Air Putih 151	151	...	1998/1999	151	...	1998/1999
3.	Sungai Raya (Sei.Bulan)	39	156	1996/1997	39	195	1994/1995
4.	Teluk Pakedai						
	Sungai Deras	80	346	1994/1995	80	346	1994/1995
	Teluk Pakedai II	70	294	1994/1995	70	294	1994/1995
	Selat Remis	100	404	1995/1996	100	404	1995/1996
7.	Batu Ampar (S.Pandan)	15	...	1998/1999	15	57	1998/1999
8.	Sei Ambawang (Pancaroba)	120	...	2001	120	473	2000/2001
9.	Sungai Kakap (Sui Kupah)	35	...	2001	35	133	2000/2001

Sumber : Sosnakertrans Kabupaten Kubu Raya, 2013

2.1.5 Aspek Daya Saing dan Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah memicu daya saing daerah dalam tolak ukur sebagai berikut :

1) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumdi rumah tangga yang menjelaskan berapa besarnya tingkat pengeluaran rumah tangga. Angka Konsumsi rumah tangga perkapita tahun 2010 sampai dengan 2012 di kabupaten Kubu Raya debagaimana tabel berikut :

TABEL 2.59

KONSUMSI PEMERINTAH DAN KONSUMSI RUMAH TANGGA
DI KABUPATEN KUBU RAYA (JUTA RUPIAH)

Tahun	Konsumsi Pemerintah	Konsumsi Rumah Tangga		
		Makanan	Non Makanan	Jumlah
2008	1.336.184,45	2.089.388,48	1.416.212,43	3.505.600,91
2009	1.686.588,01	2.263.883,85	1.473.563,50	3.741.447,35
2010	1.712.353,76	2.692.150,17	2.002.095,98	4.694.246,15
2011	1.761.120,76	2.877.363,98	2.436.025,08	5.313.389,06

Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya, 2012

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi (Susenas) tahun 2011, sebanyak 30 persen rumah tangga di Kabupaten Kubu Raya memiliki pengeluaran makanan perkapita sebulan berkisar antara Rp 300.000,- sampai dengan Rp 399.999,-. Sedangkan, sebesar 50,74 persen rumah tangga memiliki pengeluaran untuk non makanan kurang dari Rp 100.000,-. Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan di Kabupaten Kubu Raya berdasarkan data Susenas tahun 2011 mencapai adalah sebesar 58,75 persen dan untuk non makanan sebesar 41,25 persen.

2) Produktifitas Daerah

Produktifitas Daerah diperlukan untuk mengetahui tingkat produktifitas tiap sektor perangkutan kerja, seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam perekonomian daerah per sektor dari 9 sektor dalam PDRB Kabupaten Kubu Raya berdasarkan harga konstan 2000, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.60

ANGKATAN KERJA YANG BEKERJA DAN MENGANGGUR BERDASARKAN
TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2011 - 2012

No	Uraian	2011		2012		Perubahan	
		Bekerja	Menganggur	Bekerja	Menganggur	Bekerja	Menganggur
1	< SD	137,160	1,853	118,009	4,331	-19,151	2,478
2	SMP	39,203	3,608	35,079	3,137	-4,124	-471
3	SMU	54,900	5,312	47,563	5,285	-7,337	-27
4	DIII	4,095	505	5,508	287	1,413	-218
5	PT	6,772	190	7,924	768	1,152	578
JUMLAH		242,130	11,468	214,083	13,808	-28,047	2,340

Sumber: Sakernas, Agustus 2012

a. Fasilitas Daerah

Infrastruktur wilayah terdiri dari beberapa aspek Infrastruktur transportasi, sumber daya air dan irigasi, Listrik dan energi, telekomunikasi serta sarana dan prasarana pemukiman, kebutuhan akan infrastruktur wilayah tidak terlepas dari fungsi dan perannya terhadap pengembangan wilayah yaitu sebagaipengarah dan pembentuk struktur tata ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan wilayah serta pengikat wilayah.

1) Aksesibilitas Daerah

Tingkat aksesibilitas daerah dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dalam memberikan akses setiap kendaraan, malalui rasio dengan perbandingan panjang jalan yang tersedia per jumlah kendaraan bermotor.

(a) Rasio Panjang Jalan per Jumlah kendaraan

Rasio Panjang Jalan per Jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan yang memberikan akses tiap kendaraan.

Tabel 2.61

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan tahun 2010 -2012

Uraian	2010	2011	2012
1	2	3	4
Panjang Jalan (Negara,Provinsi,Kabupaten)	499,863	542,024	529,357
Jumlah Kendaraan roda 4/> (tidak termasuk Mobil Pribadi)	2.725	2.975	3.124
Rasio	0,18	0,18	0,17

Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya 2013

(b) Jumlah Orang/Barang yang terangkut angkutan Umum melalui Terminal/pelabuhan/Bandara

Tabel 2.62

Lalu lintas Angkutan Udara melalui Bandar Udara Supadio tahun 2012

No.	Bandara	Runaway	Penumpang			Barang		paket /pos	
			Berangkat	Datang	Transit	bongkar	Muat	bongkar	Muat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Supadio	2.250m x 45m	1.157.764	1.128.452	2.600	15.614.50	212.963.155	14.523	20.835

Sumber : Kalimantan Barat Dalam Angka: 2013

2) Penataan Wilayah

Penyusunan Tataruang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang didahului dengan pengumpulan dan identifikasi data melalui survei dan pengkajian keadan fisik, ekologi, potensi tersedia dengan melibatkan dan mengakomodir kepentingan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Semua Sektor, Usahawan dan Masyarakat, dengan mempertimbangkan ekosistem darat, ekosistem laut, disiplin ilmu pengetahuan dan menagemen. Penyusunan Rencan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil dengan mengintegrasikan kegiatan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Pengusaha, meliputi penyusunan dan penetapan, meliputi : Rencana strategi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pula Kecil (RZWP – 3-K), Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pula Kecil (RAPWP – 3-K) jangka menengah dan Jangka panjang.

Tabel 2.63
Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010-2012

No	Jenis kawasan Hutan	Tahun		
		2010	2011	2012
1	Areal Dalam Kawasan	388.392,73	388.392,73	388.392,73
	a. Hutan Lindung (HL)	171.477,35	171.477,35	171.477,35
	b. Hutan Produksi (HP)	98.104,39	98.104,39	98.104,39
	c. Hutan Produksi Konversi (HPK)	53.041,54	53.041,54	53.041,54
	d. Hutan Produksi Terbatas (HPT)	65.769,45	65.769,45	65.769,45
2	Areal Di Luar Kawasan Hutan atau Areal Penggunaan Lain (APL)	443.286,83	443.286,83	443.286,83
	Jumlah	831.679,56	831.679,56	831.679,56

Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya 2013

Tabel 2.64
LUAS RENCANA PEMANFAATAN RUANG
KABUPATEN KUBU RAYA 2008-2028

Rencana Ruang	Luas (Ha)
Hutan Lindung	14.045,132
Hutan Lindung Gambut	70939,304
Hutan Lindung Mangrove	86772,298
Hutan Produksi Konversi	53506,756
Hutan Produksi Terbatas	66915,810
Hutan Produksi tetap	123690,002
Pemukiman	1670,426
Pertanian Lahan Basah	137879,995
Pertanian Lahan Kering	310154,914

Sumber : Badan LH KKR,2012

Tabel 2.65
KEGIATAN INVESTASI PADA KAWASAN HUTAN
KABUPATEN KUBU RAYA

KEGIATAN	LOKASI	LUAS
IUPHHK Hutan Alam		
1.PT. Bina Ovivipari Semesta	Kec.Batu Ampar	10.100
2.PT.Kandelial Alam	Kec.Kubu	18.130
IUPHHK-HUTAN TANAMAN		
1.PT. Bina Silva Nusa	Kec. Terentang	10.400

2.PT. Daya Tani	Kec.Batu Ampar	56.060
3.PT.Kalimantan Subur Permai	Kec. Sei Ambawang	13.270
4.PT.Sari Bumi Kusuma	Kec.Terentang	40.040

IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK)

1.KSU .Surya Lestari	Kec.Batu Ampar	1000
----------------------	----------------	------

IZIN PETAK BLOK HUTAN HAK

1.KUD Raya Ramah	Kec.Sei Ambawang	500
2.Ksu Patriguna	Kec.Kubu	90
3.KUD UTAMA	Kec.Terentang	150

Sumber : Dinas Kehutanan dan Pertambangan KKR,2012

Berdasarkan hasil penelaahan pada Peta penunjukan Kawasan Hutan dan perairan Propinsi Kalimantan Barat (SK Menhutbun No 259/Kpts-II/2000 sebagian areal Hutan Produksi telah diperuntukan untuk kegiatan Investasi IUPHHK-Hutan Alam dan kegiatan IUPHHK hutan Tanaman namun terdapat lebih kurang \pm 1.000 ha Hutan Produksi yang dapat dipersiapkan untuk pencadangan kegiatan HTR

3) Ketersediaan Air Bersih

Dalam upaya penyediaan penyediaan air bersih di masyarakat, kebanyakan penduduk di Kabupaten Kubu Raya menggunakan air sungai dan air hujan sebagai penunjang kegiatan rumah tangga. Air bersih belum sepenuhnya mampu dilayani oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), sehingga kebutuhan air bersih masyarakat masih dilakukan dengan menampung air hujan, air tanah dan air permukaan. Berdasarkan data PDAM Tahun 2010, jumlah pelanggan di Kabupaten Kubu 9.633 pelanggan, dengan jumlah air yang dapat didistribusikan sebanyak 68.039 m³. Di tahun 2011, jumlah pelanggan meningkat sebanyak 10.108 pelanggan dengan kapasitas air yang disalurkan mencapai 97.957 m³. Jika kita melihat dari jenis pelanggan, jumlah pelanggan katagori rumah tangga paling banyak menjadi konsumen PDAM yakni 78.576, kemudian ruko perdagangan 11.696. Tidak semua penduduk di Kabupaten Kubu Raya dapat menikmati fasilitas air baku dari PDAM. Selain dikarenakan masih terbatasnya kapasitas air baku yang dapat disalurkan kepada masyarakat, kualitas air masih menjadi kendala manajemen PDAM untuk memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat. Sebagian besar pelanggan dengan cakupan pelayanan cukup besar terkonsentrasi di kecamatan Sungai Raya. Kecilnya jangkauan pelayanan air bersih terhadap masyarakat yang di kelola PDAM selain karena faktor teknis dengan sulitnya mendapatkan air baku yang

mudah dan murah untuk diproses sebagai air minum juga diakibatkan oleh kondisi jaringan distribusi air yang banyak dalam kondisi rusak, sehingga secara bertahap perlu untuk segera mendapatkan perbaikan. Keterbatasan PDA untuk memberikan pelayanan air baku yang layak, menjadikan sebagian masyarakat memilih sumber-sumber penyedia air lainnya berupa air kemasan. Berkaitan dengan peningkatan kemampuan penyediaan Air Bersih, PDAM Kabupaten Kubu Raya terus berupaya menambah jangkauan distribusinya. Untuk itu perlu segera dirumuskan kebijakan pelayanan air minum terutama pada daerah yang cakupannya masih rendah.

b. Fasilitas Listrik dan Telekomunikasi

1) Ketersediaan Daya Listrik

Sesuai dengan expose PT. PLN Wil V Kalimantan Barat, Produksi tenaga listrik yang dihasilkan PLN pada 14 lokasi pembangkit dari tahun 2010 (1.478.234.889 KWH) sampai dengan tahun 2012 (1.835.600.290 KWH).

Dalam perhitungan proyeksi kebutuhan energi listrik, proyeksi kebutuhan listrik, di Kabupaten Kubu Raya sampai tahun 2028 diperkirakan sebesar 174,938.54 Kwh. Terkait dengan itu, upaya untuk menutupi kesenjangan masyarakat tidak berlistrik, dilakukan antara lain dengan penyediaan sambungan bersubsidi berkerjasama dengan PLN Wilayah.

2) Sambungan Listrik Energi Terbarukan

Dalam menyikapi keterbatasan pemenuhan Listrik PLN, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sejak Tahun 2009 telah mengupayakan penggunaan energi terbarukan (tenaga Surya) melalui pendanaan APBD Kabupaten Kubu Raya maupun APBD Provinsi. Lokasi pemasangan Listrik energi terbarukan dapat dilihat pada tabel :

TABEL 2.66
PEMASANGAN ENERGI TENAGA SURYA ENERGI
DI KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2013

Kecamatan	Desa	Jumlah
Sungai Raya	Gn.Tamang	425
	Sungai Asam	50
	Terindak	78
	Pulai Limbung	126
Sungai Ambawang	Teluk Bakung	50
	Pasak Piang	20
Teluk Pa'kedai	Sungai deras	20

Terentang	Terentang Hulu	30
	Sungai Dungun	38
Sungai Kakap	Sepok keladi	27
Total		759

Sumber : Dinas Pertambangan Dan Energi, Prov KalBar, 2012

Tahun 2014 ini Pemerintah Kabupaten Kubu Raya kembali menganggarkan pemasangan penerangan Listrik tenaga surya di Desa Terindak Kecamatan sungai raya yang merupakan kelanjutan dari pemasangan unit yang sama pada tahun 2011.

c. Keamanan dan Ketertiban

1) Angka Kriminalitas

Berdasarkan data dari Poltabes Kota Pontianak mengenai banyaknya kejahatan/pelanggaran yang dilaporkan dan diselesaikan di wilayah hukum Sungai Raya, Sungai Ambawang, Sungai Kakap, Rasau Jaya, dan Kuala Mandor B tercatat sebanyak 800 dilaporkan dan 248 diselesaikan. Jenis kejahatan dibagi menjadi empat yaitu : Kejahatan konvensional, kejahatan trans nasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, dan kejahatan kontijensi. Dari jenis kejahatan yang ada, jenis kejahatan konvensional yang paling banyak dilaporkan dan diselesaikan yakni masing-masing sebanyak 799 dan 248, sedangkan jenis kejahatan kontijensi di Kubu Raya tidak ada yang dilaporkan ke Poltabes Kota Pontianak

Pada tahun 2012, di Kabupaten Kubu Raya terjadi 55 kecelakaan yang dilaporkan ke Poltabes dengan jumlah korban meninggal sebanyak 33 orang, luka berat 27 orang dan luka ringan sebanyak 54 orang. Kecelakaan terjadi paling banyak pada bulan Juli.

Di Kabupaten Kubu Raya terdapat dua Lembaga Pemasyarakatan (LP), yakni LP Dewasa dan LP Anak. Rata-rata 132 jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Dewasa pada tahun 2012 adalah 583 orang, 60 orang diantaranya adalah perempuan. Sedangkan rata-rata jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak pada tahun 2012 adalah 43 orang, satu orang diantaranya adalah perempuan.

2) Bencana Alam

Bencana alam di Kabupaten Kubu Raya didominasi oleh bencana Banjir, Angin Puting Beliung, dan kebakaran Hutan. Banjir sering terjadi terutama pada puncak musim penghujan yang disusul dengan kejadian angin Puting Beliung, sedangkan bencana alam yang dipandang cukup berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat,

lingkungan dan perekonomian adalah kabut asap yang diakibatkan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi hampir setiap tahun.

Tabel 2.67
Titik Api/Kebakaran Hutan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012

Bulan	Jumlah Titik Api
Januari	9
Pebruari	16
Maret	8
April	TDA
Mei	5
Juni	TDA
Juli	31
Agustus	TDA
September	40
Oktober	5
November	-
Desember	-

Sumber : BLH Provinsi, 2013

Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya, wilayah yang paling rentan terkena banjir adalah Desa Kubu Padi Kec. Kuala Mandor B, Desa Terentang Hulu Kec. Terentang, Desa Terindak, Desa Buntut Limbung Kec. Sei. Raya.

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013

Pelaksanaan Program dan kegiatan RKPD tahun 2013 secara umum tergambar melalui capaian Indikator-indikator makro pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya 2009-2014. Secara ringkas indicator makro pembangunan tersebut dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.68

Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Kubu Raya

1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,87 %	6,23 %	6,51 %	6,69 %	6,77 %
2	PDRB Harga Berlaku (Rp. juta)	7.614.573,31	8.782.341,00	9.968.601,17	11.204.861,88	12.608.827,76
3	PDRB Harga Konstan (Rp. juta)	4.647.308,00	4.936.652,99	5.258.029,09	5.609.791,26	5.989.616,98
4	Jumlah Penduduk (Jiwa)	490.410	500.970	511.240	522.170	
5	PDRB Perkapita (Rp.)	15.318.175,9	17.566.983,11	19.518.618,97	21.450.000,00	

6	Pengeluaran Perkapita/Bulan (Rp.)		619.720,00	621.300,00	626.220,00	
7	Angkatan Kerja (jiwa)	239.108	237.118	253.598	227.891	
8	Pengangguran (jiwa)	17.220	14.713	11.468	13.808	
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,20	6,20	4,52	6,06	
10	Penduduk yang bekerja (jiwa)	221.888	222.405	242.130	214.083	
11	<i>Incremental Capital Output Ratio (ICOR)</i>	3,97	3,51	3,46	3,37	

Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya 2013 *) Angka sementara

Berdasarkan evaluasi indikator makro dimaksud, pertumbuhan ekonomi tahun 2013 sebesar 6,77 % sedikit lebih tinggi dari tahun sebelumnya 6,69 %, menunjukkan geliat aktifitas ekonomi dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Kubu Raya tahun 2012 sebesar 6,06 % mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 4,52 %, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu disertai dengan pemenuhan kebutuhan kerja, hal tersebut dapat dilihat dari tingkat pengangguran yang juga meningkat tahun 2012 sebesar 13.808 jiwa lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 11.468 jiwa, sektor yang banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor perkebunan dan sektor konstruksi.

Demikian juga penyerapan penduduk yang bekerja tahun 2012 sebesar 214.083 jiwa lebih kecil dari tahun sebelumnya sebesar 242.130 jiwa.

2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan daerah yang telah dilaksanakan di berbagai sektor selama beberapa tahun terakhir ini telah memberikan hasil dan manfaat bagi kehidupan masyarakat secara keseluruhan di Kabupaten Kubu Raya.

Namun demikian, permasalahan yang timbul dalam proses pembangunan menyebabkan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat yang memadai belum terrealisasi sesuai dengan harapan yang ditetapkan. Pembangunan yang dilaksanakan belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan kelembagaan publik termasuk alokasi sumber daya yang efisien.

Manfaat pembangunan yang diharapkan belum merata, sehingga kehidupan masyarakat belum sepenuhnya membaik. Keadaan ini timbul sebagai akibat dari berbagai permasalahan yang terjadi baik masa lalu maupun sekarang yang belum teratasi secara maksimal seperti dijelaskan secara rinci dibawah ini. Berikut permasalahan-permasalahan pembangunan

di Kabupaten Kubu Raya yang disusun berdasarkan bidang-bidang/urusan pembangunan.

1) Bidang Pendidikan

- a. Kesempatan atau partisipasi pendidikan masih terbatas;
Peningkatan angka partisipasi terjadi di semua jenjang pendidikan, namun belum seluruh anak mendapat pelayanan pendidikan seperti masih terjadinya anak putus sekolah, dan partisipasi pada jenjang pendidikan menengah dan atas masih rendah, yang di sebabkan kendala geografis maupun serta pola pikir yang kurang mendukung wajib belajar. Disamping itu, meningkatnya cakupan pelayanan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) belum diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan seperti yang diharapkan. Kemampuan penyediaan layanan PAUD relatif masih rendah. Disisi lain keberlanjutan penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun (Wajar 9 Thn) dan Wajib Belajar 12 Tahun (Wajar 12 Thn) tidak hanya diarahkan pada segi kuantitas tetapi bagaimana mutu Wajib Belajar 9 Tahun dan Wajib Belajar 12 Tahun lebih meningkat.
- b. Profesionalisme guru masih rendah dan distribusinya belum merata;
Proporsi guru yang memenuhi kualitas akademik terus mengalami peningkatan. Namun demikian, pencapaian ini masih jauh dari yang diharapkan. Selain itu, pemanfaatan guruh belum sepenuhnya optimal yang disebabkan oleh distribusi guru yang masih belum merata.
- c. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas;
Rehabilitasi ruang kelas senantiasa dilaksanakan setiap tahunnya, namun rehabilitasi ruang kelas belum sepenuhnya dapat dituntaskan. Selain dari itu, penyediaan buku mata pelajaran, laboratorium, dan perpustakaan masih terbatas.
- d. Manajemen dan tatakelola pendidikan belum efektif;
Perlunya peningkatan kapasitas aparatur di satuan pendidikan terkait dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) guna mewujudkan tatakelola pendidikan yang efektif.
- e. Pembiayaan pendidikan yang berkeadilan perlu ditingkatkan. Mekanisme alokasi dan penyaluran dana pendidikan perlu di sederhanakan dalam rangka mendukung efisiensi dan akuntabilitas yang lebih baik. Selain itu, penyelenggaraan pendidikan gratis harus tetap mengacu dan memenuhi komponen standar nasional pendidikan (SNP) yang meliputi input, proses, output dan outcome proses pembelajaran. Dari isu-isu strategis tersebut, secara umum dapat dirumuskan bahwa isu strategis pembangunan

urusan pendidikan yaitu akses dan kualitas pelayanan pendidikan yang belum optimal.

2) Bidang Kesehatan

a. Status kesehatan ibu dan anak masih rendah;

Kesehatan ibu ditandai dengan indikator AKI (Angka Kematian Ibu), dimana jika dibandingkan dengan angka nasional, maka kematian ibu di Kalimantan Barat masih relatif tinggi. Kondisi yang sama terjadi pada indikator AKB (Angka Kematian Bayi) Demikian pula dengan AKABA (Angka Kematian Balita),

b. Status gizi masyarakat masih rendah;

Kekurangan gizi pada anak balita masih tetap menjadi masalah kesehatan masyarakat yang cukup penting di Kabupaten Kubu Raya.

c. Angka kesakitan dan kematian akibat penyakit masih tinggi;

Beberapa penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Kalimantan Barat, diantaranya Demam Berdarah Dengue (DBD), diare, malaria, tuberculosis (TB), dan HIV/AIDS. Sedangkan pada penyakit tidak menular, yang masih menjadi tantangan terutama diabetes mellitus, hipertensi, jantung koroner, dan kanker.

d. Ketersediaan tenaga kesehatan masih terbatas;

Tenaga kesehatan per 100.000 penduduk untuk dokter, dokter spesialis, dokter gigi, perawat dan bidan mengalami peningkatan, namun kesenjangan tenaga kesehatan lebih jelas terlihat antara daerah perkotaan dan pedesaan. Oleh karena itu, penempatan tenaga kesehatan di daerah perbatasan, pesisir dan kepulauan terus ditingkatkan.

e. Pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan perlindungan kesehatan masyarakat masih terbatas;

f. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum optimal;

g. Manajemen pembangunan kesehatan belum efektif;

h. Kesenjangan status kesehatan dan gizi masyarakat antar wilayah masih lebar;

i. Akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas masih rendah;

3) Bidang Pekerjaan Umum

a. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi/rawa belum optimal;

- b. Penyelesaian pembangunan ruas jalan poros kecamatan yang sangat vital bagi mobilitas ekonomi masyarakat pedesaan;
 - c. Pelayanan air bersih yang belum optimal dan merata;
 - d. Terbatasnya jumlah dan buruknya kondisi sarana dan prasarana jalan dan jembatan.
- 4) Bidang Perhubungan
- a. Pembangunan Pelabuhan pendukung yang belum terealisasi;
 - b. Airport yang ada (Supadio) masih terbatas kapasitasnya untuk jenis pesawat berbadan lebar, karena pendeknya runway;
 - c. Besarnya pergerakan kendaraan yang belum diimbangi kapasitas jalan.
 - d. Masih terbatas dan buruknya fasilitas dermaga/strgher sebagai sarana transit penghubung transportasi masyarakat.
- 5) Bidang Lingkungan Hidup
- a. Penurunan kualitas air dan udara;
 - b. Masih terjadinya kerusakan lahan;
 - c. Masih terjadinya degradasi lingkungan dan deforestasi;
 - d. Kelestarian keanekaragaman hayati;
 - e. Kurangnya kesadaran pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - f. Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).
 - g. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan kerusakan udara dengan masih membakar lahan;
- 6) Bidang Perencanaan Pembangunan
- a. Terbatasnya Kualitas Sumber Daya Manusia Perencana dan perekayasa;
 - b. Masih lemahnya keterkaitan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
 - c. Rendahnya kualitas data dan informasi pembangunan;
 - d. Lemahnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar urusan pemerintahan, serta antar jenjang Provinsi dan Kabupaten;
 - e. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya yang telah disusun masih belum ditetapkan menjadi produk hukum;
 - f. Pemahaman masyarakat terhadap pentingnya penataan ruang masih kurang;
 - g. Pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang belum optimal.
- 7) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- a. Penguatan Kapasitas Pengarusutamaan Gender (PUG);
 - b. Peningkatan Perlindungan Perempuan dan anak;
 - c. Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak Belum Optimal;

Permasalahan yang dihadapi oleh anak adalah belum optimalnya pemenuhan kebutuhan esensial anak yang mencakup berbagai stimulasi dini dan pelayanan tumbuh kembang anak untuk persiapan belajar dalam memasuki jenjang sekolah; derajat kesehatan dan gizi anak; serta pengasuhan dan perlindungan anak. Disamping itu, masih terdapat anak yang tidak bersekolah yang disebabkan kemiskinan. Di bidang kesehatan, salah satu permasalahan yang dihadapi adalah masih tingginya kematian bayi dan balita.

8) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

a. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) belum optimal;

Beberapa permasalahan pelayanan KB yang dihadapi antara lain masih terbatasnya tenaga penyuluh KB; Advokasi KIE masih belum optimal; peran serta institusi masyarakat dan penggarapan kewilayah sasaran masih terbatas; akses pelayanan KB dan kesehatan reproduksi belum optimal; serta masih rendahnya partisipasi keluarga yang mempunyai anak dan remaja dalam kegiatan dan pembinaan tumbuh kembang anak.

b. Belum optimalnya upaya peningkatan kesejahteraan peserta KB dan upaya peningkatan ketahanan keluarga;

Peningkatan kesejahteraan peserta KB yang berasal dari keluarga perlu dapat perhatian mendalam. Hal ini juga diarahkan bagaimana peningkatan ketahanan keluarga menjadi prioritas yang sejalan dengan keberhasilan program Keluarga Berencana.

9) Bidang Sosial

a. Upaya penanggulangan kemiskinan perlu ditingkatkan;

b. Perlindungan, Pelayanan dan Pemberdayaan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) belum optimal;

c. Kualitas, Kuantitas serta Kapasitas lembaga sosial dan organisasi sosial kemasyarakatan belum berkembang sebagaimana yang diharapkan;

d. Sarana, Prasarana, serta SDM dalam penanggulangan bencana masih relatif terbatas;

e. Manajemen dan profesionalisme penyelenggaraan kesejahteraan sosial perlu semakin ditingkatkan.

10) Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

a. Penanggulangan pengangguran belum optimal;

b. Peningkatan produktivitas tenaga kerja belum optimal;

Terdapat beberapa permasalahan ketenagakerjaan seperti rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja yang terserap, belum terkaitnya antara

dunia pendidikan dengan dunia usaha, serta tidak liniernya antar pendidikan tenaga kerja dengan lapangan kerja sehingga perlu pendidikan dan pelatihan yang mendalam untuk menyesuaikan dengan pekerjaan.

- c. Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja perlu ditingkatkan; Kesempatan kerja perlu diperluas secara menyeluruh hingga pedalaman dan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan.
 - d. Kapasitas lembaga ketenagakerjaan masih rendah; Peran lembaga ketenagakerjaan sangat strategis dalam upaya pengembangan pembangunan ketenagakerjaan.
 - e. Rendahnya tingkat kesejahteraan transmigrasi; Kondisi ini ditandai dengan kurang subur nya lahan serta tidak ditunjang dengan SDM transmigran, selain dari pada itu transmigran yang didatangkan memiliki tingkat keahliannya kurang sesuai dengan lokasi yang ditempati.
 - f. Lambatnya pengembangan pembangunan kawasan transmigrasi; Kondisi didaerah transmigrasi kurang didukung dengan sarana dan prasarana yang baik seperti jalan desa dan jalan penghubung untuk distribusi hasil produksi, jaringan irigasi yang kurang memadai serta kurangnya pembinaan lokasi transmigrasi oleh aparat desa setempat.
 - g. Kendala penyelesaian administratif pertanahan bagi transmigrasi; Mendorong penyelesaian administrasi pertanahan yang selama dirasakan sangat mengganggu pelaksanaan program transmigrasi.
- 11) Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- a. Tingkat keaktifan anggota koperasi masih rendah;
 - b. Inovasi dan adopsi teknologi dalam pengembangan produk yang berdampak pada diversifikasi produk masih rendah;
 - c. Kualitas manajemen pengelolaan usaha bagi UMKM masih rendah;
 - d. Jaringan pasar industri kecil dan kemitraan dalam usaha pemasaran masih terbatas;
 - e. Akses modal bagi UMKM masih terbatas.
- 12) Bidang Penanaman Modal
- a. Pengelolaan promosi investasi masih perlu ditingkatkan, jika dimungkinkan dengan pemberian kemudahan dan insentif Investasi;
 - b. Iklim investasi belum kondusif khususnya dalam hal penyampaian daya tarik investasi;
 - c. Keterbatasan infrastruktur seperti jaringan listrik, air bersih, dan aksesibilitas wilayah.
- 13) Bidang Kebudayaan

- a. Kurang ketersediaannya sarana pertunjukan seni budaya;
Selama ini bidang seni budaya masih dianggap belum dianggap prioritas sehingga pembangunan sarana dan prasarana pertunjukan mengalami perlambatan, selain dari pada itu pagelaran seni budaya baik di luar provinsi/luar negeri dianggap membutuhkan biaya yang tinggi.
 - b. Belum optimalnya pemanfaatan potensi seni budaya;
Minimnya sarana dan prasarana untuk pagelaran seni budaya mempengaruhi minat masyarakat untuk mengembangkan sanggar-sanggar seni budaya di daerah. Kurang luasnya jangkauan layanan pendidikan seni budaya.
 - c. Selama ini dirasakan kurangnya tenaga yang handal dalam mencetak SDM bidang seni budaya serta minimnya minat dan perhatian generasi muda terhadap pengembangan seni budaya.
- 14) Bidang Kepemudaan dan Olahraga
- a. Partisipasi dan peran aktif pemuda belum optimal;
Beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan urusan pemuda, antara lain terjadinya masalah-masalah sosial di kalangan pemuda, seperti kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA), termasuk penularan HIV dan AIDS, serta tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT) pemuda. Selain itu juga makin maraknya pola pikir pragmatis, menurunnya nasionalisme dan tingginya tingkat pengangguran terbuka di kalangan pemuda.
 - b. Prestasi dan budaya olahraga masih rendah;
Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningkatannya budaya dan prestasi olahraga, antara lain terbatasnya prasarana dan sarana olahraga masyarakat; belum optimalnya penerapan teknologi olahraga dan kesehatan olahraga dalam rangka peningkatan prestasi; terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga dan pembina keolahragaan; rendahnya apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan dan tenaga keolahragaan yang berprestasi, serta belum optimalnya sistem manajemen keolahragaan.
 - c. Rendahnya kemampuan kewirausahaan di kalangan pemuda
Beberapa permasalahan yang menyebabkan kondisi ini antara lain, tingkat keterampilan yang masih rendah serta kurangnya kesempatan untuk berkreasi.
- 15) Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
- a. Kesatuan Bangsa dan Politik

Masih adanya potensi benturan antar kelompok warga masyarakat, antara kelompok warga masyarakat dengan aparat dan antara kelompok warga masyarakat dengan sektor privat karena adanya kepentingan dan pengaruh negatif arus globalisasi yang penuh keterbukaan, juga cenderung mempengaruhi wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara. Oleh karena itu, isu strategis terkait kesatuan bangsa dan politik dirumuskan sebagai berikut: Akselerasi pembangunan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di masa depan memerlukan lingkungan yang kondusif, pembangunan berwawasan Kesatuan Bangsa sebagai tolak ukur pembangunan di daerah, serta peningkatan efektivitas pelaksanaan peran organisasi masyarakat dan partai politik.

b. Ketentraman dan Ketertiban

Gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat berpotensi untuk muncul di daerah-daerah yang terkait dengan bidang-bidang seperti perkebunan, pertambangan serta berkembangnya modus-modus kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi canggih dan maraknya kasus-kasus kerusuhan dan berbagai kejahatan yang bersifat konvensional, tradisional, dan kejahatan yang menyebabkan kerugian negara. Sehingga isu strategis terkait Ketentraman dan Ketertiban, yaitu; mendorong masyarakat untuk lebih peduli dalam menciptakan rasa aman dan tertib sebagai modal dasar pembangunan di Kabupaten Kubu Raya.

16) Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;

- a. Masih belum optimalnya pelayanan publik serta rendahnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
Selama ini dirasakan pelayanan publik belum maksimal dikarenakan beberapa faktor diantaranya kapasitas SDM belum merata, fasilitas yang terbatas serta prosedur yang belum baku.
- b. Masih belum optimalnya reformasi birokrasi;
- c. Undang-undang tentang Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan Pemerintah belum disikapi secara baik dan benar oleh pihak-pihak terkait sehingga prosesnya berjalan lambat. Adapun tujuan dari Reformasi Birokrasi adalah sebagai arahan dalam rangka peningkatan pengelolaan dan pelayanan publik;
- d. Perlunya peningkatan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN yang ditunjukkan dengan meningkatnya capaian indikator kerja sehingga pembiayaan pembangunan dapat lebih efisien dan efektif;

- e. Masih belum optimalnya penataan kelembagaan dan pengembangan sistem ketatalaksanaan;
- f. Belum optimalnya sistem peningkatan kinerja dan kesejahteraan PNS; Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal serta Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka diharapkan kinerja birokrasi dapat berjalan sesuai dengan harapan dan diperkuat dengan pengawasan oleh masyarakat serta diikuti dengan peningkatan tunjangan kesejahteraan aparatur (TKD).
- g. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
- h. Pengelolaan keuangan daerah sebagai sumber pendapatan daerah seharusnya dapat dipertanggung jawabkan melalui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan setiap tahunnya dengan mengupayakan sumber-sumber pendapatan daerah (PAD) lainnya serta memberikan insentif bagi pengusaha yang membayar pajak melalui insentif pajak (Tax Holiday).
- i. Pengembangan hukum dan HAM;
- j. Penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak dalam upaya menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan di daerah. Dengan demikian kepastian hukum, rasa aman dan ketentraman masyarakat dapat kita wujudkan;
- k. Pelaksanaan penegakan hukum yang transparan diharapkan dapat menekan dampak negatif, sekaligus membangun citra positif bagi pemerintah. Hukum pada dasarnya memberikan jaminan kepastian, dalam rangka melindungi setiap warga negara dan pemenuhan HAM;
- l. Luas wilayah
Luasnya wilayah menyebabkan panjangnya rentang kendali pelayanan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan publik sehingga perlu ditempuh dengan pembentukan daerah otonomi baru;
- m. Demikian juga pada aspek luasnya wilayah Kabupaten Kubu Raya, untuk itu perlu adanya tindak lanjut dari ide atau wacana pendistribusian sebagian kewenangan kepala daerah kepada camat;
- n. Belum semua SKPD dan instansi pemerintah menganggap penting dan manfaat dari database kependudukan by name by address untuk pelayanan publik dan dalam perencanaan pembangunan, khususnya untuk update (crosscheck) data penduduk dalam rangka mendukung Program Pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, seperti : Jamkesmas, Jampersal, Raskin, BOS (pendidikan), BOK (kesehatan);

- o. Terbatasnya sarana dan prasarana kerja serta SDM yang ada untuk mendukung pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi kependudukan baik sarana teknologi dan informasi;
 - p. Sitem SIAK lebih terfokus untuk bidang kependudukan, tetapi untuk bidang pencatatan sipil masih ada Desa yang belum sepenuhnya menggunakan SIAK karena masih sering terjadi error pada saat printout akta pencatatan sipil tidak sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - q. Masih belum adanya keseriusan pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi persoalan rendahnya laporan kematian penduduk oleh pihak keluarganya, sehingga data penduduk yang sudah meninggal tidak terhapus dalam database kependudukan Kabupaten/Kota;
 - r. Masih belum optimalnya koordinasi antara SKPD, terkait bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - s. Masih adanya penduduk yang sudah menetap di luar daerah domisilinya lebih dari 1 (satu) tahun, namun yang bersangkutan tidak mau pindah, sehingga secara de facto terdata di domisili yang baru, tetapi secara de yure mereka masih terdata di daerah asalnya;
 - t. Kurangnya perhatian pemerintah daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil, terkait dengan belum representatifnya Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (sebagian besar SKPD masih numpang / Sewa, termasuk pengamanan terhadap arsip dokumen kependudukan yang terkesan tidak terawat dan akan mengalami kerusakan bahkan hilang;
 - u. Jangkauan pelayanan cukup jauh antara desa-desa dengan kecamatan;
 - v. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendukung terselenggaranya administrasi kependudukan;
- 17) Bidang Ketahanan Pangan
- a. Penggunaan bahan kimia berbahaya untuk pengendalian waktu tanam, penyimpanan, dan pengolahan, sehingga dapat membahayakan konsumen;
 - b. Diversifikasi produk pangan lokal belum optimal;
 - c. Penegakan hukum distribusi pangan masih belum optimal;
 - d. Belum optimalnya pengelolaan lumbung pangan lokal;
 - e. Peranan penyuluh pertanian dalam mendampingi petani belum optimal.
- 18) Bidang Komunikasi dan Informatika
- a. Belum optimalnya penyediaan dan pemanfaatan sarana, prasarana dan layanan komunikasi dan informatika.
- 19) Bidang Perpustakaan dan Kearsipan

- a. Permasalahan pembangunan urusan kepastakaan adalah membudayakan kegemaran membaca pada masyarakat serta penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah di jangkau dan bermutu sebagai pcnunjang peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
- b. Kesadaran dan kepedulian aparatuer pemerintah masih rendah sehingga menyebabkan arsip tidak dapat dikelola dengan baik;
- c. Kualiatas dan kuantitas SDM penyelenggara kearsipan masih belum optimal dan jumlah arsiparis masih belum memenuhi standar;
- d. Pembinaan SDM kearsipan belum berkesinambungan.

20) Bidang Pertanian

- a. Sarana dan prasanana produksi pertanian sering tidak terjangkau oleh petani;
- b. Serangan hama dan penyakit pertanian masih belum terkendali;
- c. Harga hasil produksi pertanian tidak stabil;
- d. Kemampuan dalam pengolahan pasca panen dan pemasaran hasil produk pertanian masih rendah;
- e. Pengelolaan manajemen agribisnis belum optimal;
- f. Jaringan informasi pasar produk pertanian belum optimal;
- g. Kapasitas kelembagaan pertanian belum optimal;
- h. Akses permodalan bagi petani belum merata;
- i. Belum optimalnya kepastian lahan usaha pertanian, akibat beralih fungsi lahan pertanian, schingga dikuatirkan dapat mengganggu kesinambungan ketersediaan pangan.

21) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

- a. Masih rendahnya populasi, produksi, dan produktivitas ternak untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daerah;
- b. Masih kurangnya sentra-sentra pembibitan ternak;
- c. Kurangnya produk daging ternak segar dan olahan yang aman, sehat, utuh, dan halal untuk dikonsumsi;
- d. Masih seringnya terjadi kasus penyakit hewan menular strategis ekonomis.

22) Bidang Kehutanan

- a. Ancaman kerusakan hutan oleh pencurian kayu ilegal;
- b. Fungsi kelembagaan kelompok tani kehutanan belum optimal;
- c. Akses petani kehutanan terhadap sumber permodalan masih kurang;
- d. Luas hutan rakyat semakin berkurang akibat dari kegiatan pemukiman dan penambangan;
- e. Masih banyaknya luas lahan kritis.

23) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

- a. Kondisi ketenagalistrikan masih menghadapi beberapa permasalahan; seperti rendahnya daya mampu listrik, rendahnya Ratio Elektrifikasi dan Rasio Desa berlistrik, lambatnya pembangunan Pembangkit Listrik baru, dan banyak potensi energi baru terbarukan (PLTN, PLTA, PLTS, PLTMH, PLTB) yang belum dimanfaatkan secara maksimal serta masih tingginya ketergantungan pembangkit listrik pada bahan bakar fosil tidak ramah lingkungan;
- b. Belum adanya penetapan wilayah pertambangan menyebabkan terhambatnya pengusahaan potensi sumber daya mineral dan batu bara;
- c. Belum adanya usaha peningkatkan nilai tambah hasil tambang; menyebabkan rendahnya penerimaan sektor sumberdaya mineral;
- d. Kelangkaan Bahan Bakar Minyak dan Liquid petroleum Gas.

24) Bidang Kelautan dan Perikanan

- a. Fungsi kelembagaan nelayan dan petani pembudidaya perikanan belum optimal;
- b. Kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan ekosistem perairan umum masih kurang;
- c. Rendahnya sarana dan prasarana tangkap (kuantitas, teknologi, dan SDM);
- d. Akses permodalan petani perikanan masih kurang;
- e. Maraknya illegal fishing di perairan Kalimantan Barat.

25) Bidang Perindustrian dan Perdagangan

- a. Belum optimalnya peningkatan kualitas daya saing produk;
- b. Kondisi sarana prasarana pasar tradisional kurang memadai;
- c. Penguasaan dan penerapan teknologi bagi industri kecil masih kurang;
- d. Inovasi produk belum mampu mengimbangi kebutuhan pasar;
- e. Ketersediaan bahan baku industri masih terbatas;
- f. Kemitraan antara pelaku usaha belum optimal;
- g. Belum optimalnya dukungan sarana infrastruktur (energi, air, dan prasarana jalan).

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 KERANGKA EKONOMI DAERAH

3.1.1. Kondisi Ekonomi Makro Tahun 2013 dan perkiraan Tahun 2014

Pada tahun 2013 perekonomian Kabupaten Kubu Raya tumbuh 6,77 % sedikit lebih tinggi dari tahun sebelumnya (2012) yang tumbuh sebesar 6,69 %. Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,77 % dimaksud adalah merupakan peningkatan PDRD Kabupaten Kubu Raya tahun 2013 berdasarkan harga konstan tahun 2000 mencapai Rp. 5.989.616.98 lebih tinggi dari tahun sebelumnya Rp. 5.609.791,26. Sedangkan PDRB Kabupaten Kubu Raya atas dasar harga berlaku tahun 2013 sebesar 12.608.827,76 naik dari tahun 2012 sebesar Rp. 11.204.861,88.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 mengalami pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 20,23%, diikuti oleh sektor konstruksi sebesar 12,01%, sektor Listrik, Gas dan Air bersih sebesar 11,18%, sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan sebesar 10,79 %, sektor jasa-jasa sebesar 8,38%, sektor pertanian 5,66%, sektor industri pengolahan 4,55 %, sektor pertambangan dan pengalihan 3,98% dan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 3,37%.

Dari pertumbuhan ekonomi sektoral tersebut, kemudian membentuk struktur perekonomian Kabupaten Kubu Raya yang dicerminkan oleh kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB. Sektor Industri Pengolahan memberikan kontribusi terbesar dengan 44,15%, di ikuti oleh sektor pertanian 17,13%, sektor yang paling kecil memberikan kontribusinya adalah sektor pertambangan dan pengalihan sebesar 0,57%.

Konsep indikator pembangunan utama seperti PDRB, Laju Pertumbuhan, PDRB per Kapita, Angka Inflasi, serta indikator non ekonomi mencakup Indek Kesehatan, Indeks Pendidikan, Indeks Kemiskinan serta indikator sosial lainnya, menjadi referensi hasil capai satu tahun periode pembangunan. Perkembangan indikator pembangunan Kabupaten Kubu Raya tahun 2009-2013 disajikan dalam Tabel 3.1. berikut ini:

Tabel 3.1.

Perkembangan Indikator Pembangunan
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2013

No	Tolak Ukur	TAHUN				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Indikator Makro Pembangunan					

-	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,87%	6,23%	6,51%	6,69	6,77
-	Inflasi (%)	4,35	8,80	6,46	5,25	5,39
-	PDRB Harga Berlaku (Juta Rp)	7.614.573,31	8.800.531,53	9.978.601,17	11.204.861,88	12.608.827,76
-	PDRB Harga Konstan (Juta Rp)	4.647.308,22	4.936.652,99	5.258.029,11	5.609.791,26	5.989.616,98
-	PDRB/Kapita Harga Berlaku (Rp)	15.318.175,90	17.566.983,11	19.518.618,97	21.458.099,94	
-	PDRB/Kapita Harga Konstan (Rp)	9.232.096,24	9.854.188,85	10.284.955,27		
2.	Indikator Kesehatan					
-	Kematian Ibu (Kasus)	8	16	10	16	3*
-	Kematian Bayi (Kasus)	78	81	65	55	45*
-	Bayi Gizi Buruk (Kasus)	75	21	33	18	11*
-	Bayi Gizi Kurang (Kasus)	1.142	370	249	648	972
-	Persalinan Nakes	74,5%	75,19%	79,85%	-	-
-	Imunisasi (UCI)	76,2%	78,5%	75,45%	-	-
-	Angka Harapan Hidup (Tahun)	66,24	66,30	66,37	66,37	-
3.	Indikator Pendidikan					
-	Angka Melek Huruf (Thn)	86,66	95,5	97,30	97,84	97,86
-	Rata-Rata Lama Sekolah (Thn)	6,36	6,57	6,68	7,11	-
-	Angka Partisipasi Kasar					
a.	APK SD	171045	115,24	114,22	115,71	112,94
b.	APK SMP	80,86	82,89	85,92	89,04	90,89
c.	APK SLTA	35,25	71,72	73,42	73,99	79,8
-	Angka Partisipasi Murni					
a.	APM SD	71,78	90,84	94,16	97,12	98,45
b.	APM SMP	59,21	63,13	69,80	73,07	75,71
c.	APM SLTA	17,65	28,09	53,52	53,96	65,54
4.	Indikator Penduduk dan Tenaga Kerja					
-	Jumlah Penduduk (jiwa)	497.094	500.970	511.235	522.174	-
-	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	39.021	35.769	33.742	31.900	-
-	Prosentase Penduduk Miskin (%)	7,56	7,14	6,67	6,27	-
-	Angkatan Kerja (Jiwa)	239.108	237.118	253.598	227.891	-
-	Pengangguran (Jiwa)	17.220	14.713	11.468	13.808	-
-	Tingkat Pengangguran (%)	5,03	4,32	3,31	4,10	-
-	Penduduk Yang Bekerja (Jiwa)	221.888	222.405	242.130	214.083	-

Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya 2013

*) Angka sampai dengan Juni 2013

Kondisi perekonomian Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2014 diharapkan tetap dapat tumbuh lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal-hal yang perlu diantisipasi dalam perencanaan pembangunan tahun 2014 adalah peningkatan inflasi sebagai dampak dari rencana Pemerintah Pusat untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak dan pembatasan bahan bakar minyak.

Untuk menformulasikan kebijakan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kubu Raya di tahun berikutnya perlu berpedoman pada hasil evaluasi pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil evaluasi dan identifikasi masalah serta tantangan, internal maupun eksternal, dimatangkan menjadi isu-isu mendasar dalam merumuskan arah pembangunan prioritas.

Selanjutnya berdasarkan realitas pergerakan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir, dapat diperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya tahun 2014 masih dalam pengertian pertumbuhan sedang tahun-tahun sebelumnya yaitu dalam kisaran 6-7 %.

Uraian secara lebih lengkap tentang prediksi Indikator Pembangunan tahun 2014 sebagai berikut :

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan alat kontrol dalam menentukan kebijakan pembangunan. PDRB nominal (harga berlaku) dan PDRB riil (harga konstan), masing-masing mempunyai peran masing-masing. Seperti halnya dalam PDB (Produk Domestik Bruto), PDRB mempunyai tiga pendekatan dalam menghitungnya yaitu pendekatan produksi atau lebih dikenal dengan PDRB Sektoral atau PDRB menurut Lapangan Usaha, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Gambaran selengkapnya akan diuraikan pada bagian berikut:

1. PDRB atas Dasar Harga Berlaku

PDRB Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2013 diprediksikan akan mengalami kenaikan menjadi Rp. 14.012.793,64 (juta) atau sebesar 9,00% dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar Rp. 12.608.827,76 (juta). Dalam pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2014, sektor industri pengolahan masih berperan sangat dominan yaitu dengan kontribusi sebesar Rp. 6.173.527,32 (juta) , disusul sektor pertanian Rp. 2.302.635,50 sedangkan nilai kontribusi terkecil adalah Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih yaitu sebesar Rp. 95.149,52 (juta). Perkembangan dan prediksi PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2014 disajikan dalam Tabel berikut ini:

Tabel 3.2

Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2013 dan Prediksi Tahun 2014 (jutaan)

No	Sektor / Subsektor	2009	2010	2011	2012	2013	2014*
		Jml (Rp)					
1	Pertanian	1.582.139,42	1.661.105,83	1.862.353,78	2.016.346,74	2.159.491,12	2.302.635,50
2	Pertambangan dan Penggalian	39.285,27	45.528,55	51.888,00	62.806,30	71.247,00	79.687,70
3	Industri Pengolahan	5.467.052,55	4.160.676,97	4.548.793,81	4.958.894,72	5.566.211,02	6.173.527,32
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	36.750,15	39.400,86	57.228,00	65.639,04	80.394,28	95.149,52
5	Bangunan	77.365,70	137.148,04	284.830,24	359.860,00	456.713,31	553.566,62
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	1.405.902,36	1.539.344,30	1.687.227,52	1.921.944,68	2.105.405,59	2.288.866,50
7	Pengangkutan dan Komunikasi	531.880,35	686.827,69	849.153,36	1.039.745,69	1.272.500,14	1.505.254,59
8	Keuangan,	169.175,82	187.366,35	234.380,12		330.401,55	379.644,82

	Persewaan & Jasa Perusahaan				281.158,28		
9	Jasa -jasa	305.021,69	343.132,94	392.746,34	498.466,43	566.463,75	634.461,07
	Jumlah Total	7.614.573,31	8.800.531,53	9.968.601,17	11.204.861,88	12.608.827,76	14.012.793,64

Sumber: BPS Kabupaten Kubu Raya, 2013, *Angka Prediksi

2. PDRB atas Harga Konstan

PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2014 diperkirakan dapat mencapai Rp. 6.369.442,72 (juta) atau meningkat sebesar 8,80 persen. Kecenderungan kenaikan ini tidak terlepas dari sektor pengolahan yang dominan dalam pembentukan PDRB kabupaten Kubu Raya, disusul sektor pertanian. Perkembangan dan prediksi PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2013 disajikan dalam Tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.3

Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2013 dan Prediksi Tahun 2014 (jutaan)

No	Sektor / Subsektor	2009	2010	2011	2012	2013	2014*
		Jml (Rp)					
1	Pertanian	922.399,07	977.880,61	1.039.780,45	1.089.036,39	1.150.712,19	1.212.387,99
2	Pertambangan dan Penggalian	18.835,67	20.578,83	22.260,12	24.360,32	25.330,13	26.299,94
3	Industri Pengolahan	2.154.578,52	2.265.932,13	2.366.766,11	2.458.679,69	2.570.472,59	2.682.265,49
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	24.907,95	25.101,02	28.793,80	32.247,91	35.852,61	39.457,31
5	Bangunan	40.608,81	54.356,77	65.014,39	73.590,64	82.431,88	91.273,12
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	787.238,47	816.002,11	853.946,21	909.492,24	940.108,51	970.724,78
7	Pengangkutan dan Komunikasi	382.307,24	438.909,64	514.445,99	620.357,59	745.860,29	871.362,99
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	103.459,97	107.979,89	117.262,52	129.724,63	143.717,94	157.711,25
9	Jasa -jasa	212.982,30	229.911,99	249.759,52	272.301,85	295.130,85	317.959,85
	Jumlah Total	4.647.308,00	4.936.652,99	5.258.029,11	5.609.791,26	5.989.616,98	6.369.442,72

Sumber: BPS Kabupaten Kubu Raya, 2013, *)Angka Prediksi

B. Laju pertumbuhan ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 diperkirakan dapat tumbuh sebesar 6,9%. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut, kondisi ekonomi makro di Kabupaten Kubu Raya diharapkan stabil dan perlu didukung kebijakan struktural seperti perbaikan iklim investasi, upaya peningkatan daya saing dan produktivitas serta perbaikan kualitas sumberdaya manusia. Sehingga diharapkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kubu Raya tidak hanya terjadi pada peningkatan konsumsi melainkan juga terjadi peningkatan investasi dan peningkatan ekspor. Dimana hal tersebut dapat menjawab kendala pembangunan ekonomi yaitu tingkat pengangguran yang masih tinggi serta membuka peluang kesempatan kerja dan berusaha bagi kelompok masyarakat usia produktif.

Tabel 3.4

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2008-2013 dan Prediksi Tahun 2014

Tahun	Kabupaten Kubu Raya (%)
2008	5,02
2009	5,87
2010	6,23
2011	6,51
2012	6,69
2013	6,77
2014*	6,90*

Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya, 2013, * Angka prediksi

Konsepsional indikator pembangunan utama seperti PDRB, Laju Pertumbuhan, PDRB per Kapita, Angka Inflasi, serta indikator non ekonomi mencakup Indek Kesehatan, Indeks Pendidikan, Indeks Kemiskinan serta indikator sosial lainnya, menjadi referensi hasil capai satu tahun periode pembangunan.

C. PDRB Perkapita

PDRB Perkapita Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2012 sebesar Rp. 22.059.916,68 dan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya meningkat sebesar 8,85 persen. Berarti rata-rata pendapatan penduduk Kabupaten Kubu Raya dalam satu tahun mencapai 22,06 juta. Kabupaten Kubu Raya menempati urutan ke 2 PDRB perkapita tertinggi dari 14 kabupaten/kota se-Kalimantan Barat setelah Kota Pontianak. Perkembangan

PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2012 disajikan dalam Tabel 3.5 berikut ini:

Tabel 3.5

PDRB dan Angka Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 – 2012

No.	Keterangan	2009	2010	2011	2012*
1.	PDRB Atas Dasar Harga Pasar (juta rupiah)	7.614.573,31	8.800.531,53	9.978.601,17	11.204.861,88
2.	Penyusutan (juta rupiah)	719.577,18	831.650,23	942.977,81	1.058.859,45
3.	PDRN Atas Harga Pasar (juta rupiah)	6.894.996,14	7.968.881,30	9.035.623,36	10.146.002,43
4.	Pajak Tak Langsung (juta rupiah)	129.660,95	149.855,45	169.915,62	190.796,39
5.	Produksi (juta rupiah)	6.765.335,18	7.819.025,85	8.865.707,74	9.955.206,04
6.	Penduduk (ribu Jiwa)	502.845	500.970	511.235	522.174
7.	PDRB Perkapita (rupiah)	15.142.983,06	17.566.983,11	19.518.618,97	21.458.099,94
8.	Pendapatan Regional Perkapita (rupiah)	13.454.116,44	15.607.772,62	17.341.746,44	19.064.920,97

Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya, 2013 *) Angka Sementara

Terminologi Peningkatan PDRB perkapita bukan berarti tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kubu Raya sudah membaik. PDRB perkapita yang menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk, tidak secara langsung merefleksikan distribusi *income* perkapita yang lebih merata. Dengan kata lain, proporsi penduduk yang berpendapatan tinggi masih sedikit dibandingkan dengan proporsi penduduk berpendapatan rendah. Selain itu angka inflasi juga memberikan andil terhadap daya beli masyarakat (*purchasing power*). Bila dikonversikan dengan laju inflasi, maka peningkatan PDRB Per kapita tidak terlalu berpengaruh terhadap tingkat kemakmuran masyarakat. Fenomena ini tercermin dari masih banyaknya penduduk katagori miskin, serta beberapa indikator sosial lainnya yang masih jauh di bawah peringkat IPM kabupaten/kota di Kalimantan Barat.

d. Daya Beli/Pengeluaran Konsumsi

Daya Beli/Pengeluaran Konsumsi berdasarkan data BPS tahun 2011, sebanyak 30 persen rumah tangga di Kabupaten Kubu Raya memiliki pengeluaran makanan perkapita sebulan berkisar antara Rp. 300.000,- sampai dengan Rp. 399.999,-. Sedangkan 50,74 persen rumah tangga memiliki pengeluaran untuk non makanan kurang dari Rp. 100.000,-. Persentase rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita di kabupaten Kubu Raya di tampilkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.6

Persentase Rumah Tangga Menurut Golongan Pengeluaran Perkapita Per Bulan Makanan dan Non Makanan
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 - 2011

NO	Gol. Pengeluaran Per Kapita Sebulan	2009	2010	2011
1.	< 100.000	0,31	28,6	0,31
2.	100.000 - 199.999	14,38	44,4	3,41
3.	200.000 - 299.999	34,22	18,9	10,88
4.	300.000 - 399.999	19,38	4,3	34,17
5.	400.000 - 499.999	11,25	1,4	30,68
6.	500.000 - 599.999	7,66	1,2	12,69
7.	600.000 - 699.999	3,91	0,5	3,93
8.	700.000 - 799.999	1,88	0,5	3,93
9.	800.000 - 899.999	1,71	-	-
10.	>900.000	5,30	0,2	-

Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya, 2013

Penduduk Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2012 berdasarkan data BPS Kabupaten Kubu Raya, sebesar 522.174 jiwa. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kubu Raya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Laju pertumbuhan Penduduk pada Tahun 2009 sebesar 1,64%, Tahun 2010 sebesar 2,15% dan Tahun 2011 sebesar 2,05% dan tahun 2012 sebesar 2,14%. Adapun rincian jumlah penduduk Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008-2012, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7

Jumlah Penduduk Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008-2012

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Orang/Jiwa)					Laju Pertumbuhan Ppenduduk/Tahun (%)			
		2008	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012
1	Batu Ampar	32.008	32.533	33.113	33.660	34.252	1,64	1,78	1,65	1,76
2	Terentang	9.832	10.011	10.177	10.375	10.584	1,82	1,66	1,95	2,01
3	Kubu	35.804	36.140	36.469	36.829	37.252	0,94	0,91	0,99	1,15
4	Teluk Pakedai	18.168	18.467	18.767	19.064	19.404	1,65	1,62	1,58	1,78
5	Sungai Kakap	97.026	99.084	101.200	103.966	106.846	2,12	2,14	2,73	2,77
6	Rasau Jaya	22.441	22.960	23.499	24.084	24.691	2,31	2,35	2,49	2,52
7	Sungai Raya	181.507	184.233	188.014	191.929	196.102	1,5	2,05	2,08	2,17
8	Sungai Ambawang	62.369	63.404	65.879*)	67.207*)	68.616	1,66	3,9	2,02	2,10
9	Kuala Mandor B	23.332	23.579	23.852	24.121	24.327	1,05	1,17	1,13	1,27
Jumlah		482.487	490.408	500.970	511.235	522.174	1,64	2,15	2,05	2,14

Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya, 2013

*) Tidak Termasuk Warga Perumanas IV

3.1.2 Analisis Lingkungan Eksternal dan Internal

Banyak hal yang menyebabkan suatu kondisi perekonomian berubah, oleh karena itu berbagai asumsi dan berbagai factor yang mempengaruhi perlu untuk diidentifikasi melalui lingkungan eksternal dan internal.

Lingkungan eksternal dalam perspektif kedepan masih cukup berat mengingat secara umum daya saing produk Lokal/nasional belum begitu kuat di pasar global dan secara khusus daya saing dan kemampuan ekspor produk

Kabupaten Kubu Raya relative masih rendah. Sementara itu disisi lain kebutuhan akan import (sebagai pengurang laju pertumbuhan PDRB) juga semakin meningkat.

Kondisi belum pulihnya perekonomian dunia secara utuh sebagai akibat dari krisis yang berkepanjangan dalam beberapa tahun ini dan khususnya pasar eropa yang masih labil serta masih melemahnya ekonomi Amerika turut mempengaruhi ekonomi nasional.

Tidak kalah pentingnya untuk dicermati adalah lingkungan imternal, dalam hal ini terkait dengan berbagai upaya pemerintah daerah dalam mengelola potensi yang dimiliki dan dalam hal ini khususnya pengelolaan makro ekonomi. Lingkungan internal ini menjadi penting karena ruang lingkupnya dalam jangkauan dan kendali pemerintah daerah yang pada gilirannya akan di evaluasi atau dilakukan penilaian seberapa baik kinerjanya.

3.1.3 Tantangan Pokok serta arah kebijakan dan sasaran ekonomi Makro Tahun 2015.

a. Tantangan Pokok

1) Mendorong Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan.

Tantangan yang dihadapi adalah berupaya menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan yang relative mamsih tinggi. Dengan jumlah angkatan kerja yang semakin bertambah, kualitas pertumbuhan ekonomi perlu terus ditingkatkan, Kegiatan ekonomi akan didorong untuk mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih merata sehingga upaya untuk menekan angka kemiskinan dapat tercapai.

2) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang dimiliki, utamanya potensi lahan dan hutan sehingga menarik untuk investasi yang bersifat jangka panjang dan berskala besar.

3) Mendorong Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas

Struktur ekonomi di Kabupaten Kubu Raya masih titopang oleh tiga sector utama, Industri Pengolahan, Pertanian dan Perdaganganan menyusul sector-sektor lainnya. Penguatan struktur yang dicirikan dengan semakin menurunnya kontribusi sector-sektor primer disertai dengan semakin menguatnya sector sekunder dan tersier dalam pembentukan PDRB. Berdasarkan data, Pertumbuhan maupun kontribusi

masing-masing sector PDRB tidak bergerak dinamis dalam hubungannya dengan perimabgnan antar sector primer, sekunder dan tersier, demikian juga dengan kecenderungan pertumbuhan sector industry pengolahan non migas yang terus melemah, investasi yang masih kecil dan ekspor yang melambat sehingga menjadi tantangan yang perlu disiasati agar kinerja ekonomi memiliki daya saing yang kuat.

b. Arah kebijakan dan sasaran ekonomi Makro tahun 2015

Sesuai dengan sasaran Nasional kebijakan ekonomi makro diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, menciptakan lapangan kerja, menciptakan pembangunan ekonomi yang inclusive dan berkeadilan, untuk itu konsep pembangunan ekonomi yang pro poor, pro job dan pro growth akan terus dilanjutkan.

Pertumbuhan ekonomi didorong terutama dengan menjaga tingkat konsumsi masyarakat, meningkatkan minat investasi dan ekspor serta mendorong industry pengolahan. Peningkatan investasi dan ekspor tetap di upayakan dengan meningkatkan daya tarik investasi baik dalam maupun luar negeri dengan mengurangi hambatan prosedur perijinan, jika memungkinkan memberikan insentif dan kemudahan investasi, Harmonisasi kebijakan di semua tingkatan dan sector, mendorong fasilitas pembiayaan, memberikan fasilitas ekspor.

Upaya untuk menurunkan jumlah penduduk miskin juga akan didorong oleh berbagai program yang diarahkan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi yang rakyat miskin, memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat, serta meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. Disamping itu, berbagai kebutuhan pokok masyarakat khususnya yang berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat miskin akan dijamin ketersediaanya dengan akses dan harga terjangkau.

Dari sisi produksi, pembangunan pertanian dan pembangunan perdesaan didorong melalui peningkatan produksi pangan, produktivitas pertanian secara luas, diversifikasi ekonomi pedesaan, pembaharuan agraria nasional, serta pengembangan kota kecil dan menengah pendukung ekonomi perdesaan. Lebih lanjut, upaya mendorong pertumbuhan industry dilakukan dengan kebijakan pertumbuhan populasi usaha industri, penguatan struktur industri, dan peningkatan produktivitas usaha industri.

Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan yang menyertakan semua kelompok masyarakat dan golongan tetap dilanjutkan guna

menyelesaikan berbagai persoalan kesenjangan. Berbagai perumusan dan pengimplementasian kebijakan yang mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan seperti bidang ketenagakerjaan, pemberdayaan usaha kecil dan menengah, serta penanggulangan kemiskinan harus melibatkan para pemangku kepentingan. Kebijakan yang afirmatif harus dijalankan untuk mengatasi kesenjangan, keteringgalan, maupun kemiskinan yang mewarnai kehidupan sebagian besar bangsa Indonesia.

Dengan demikian prospek pembangunan ekonomi Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2015, secara umum tidak banyak mengalami perubahan yang mendasar bila dibandingkan dengan tahun-tahun, namun tetap diusahakan meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Apabila pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya tahun 2013 sebesar 6,77 %, pada tahun 2014 dan tahun 2015 diharapkan relative tidak jauh berbeda, proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya untuk tahun 2014 adalah sebesar 6,90% dan 7,00 % untuk tahun 2015.

Sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 7,00% pada tahun 2015 tersebut, tidak semata – mata sekedar pertumbuhan dalam arti peningkatan nilai PDRBnya saja namun juga dalam arti luas dan berkualitas, yaitu

1. Pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong mengatasi kesenjangan seperti kesenjangan antar wilayah (kecamatan-kabupaten) dan kesenjangan antar sektor pembangunan.
2. Pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong pengurangan Angka Kemiskinan. Diharapkan jumlah penduduk miskin turun dari angka tahun 2012 sebesar 6,27%.
3. Pertumbuhan ekonomi yang mendorong membuka kesempatan kerja sekaligus upaya Pengurangan Angka Pengangguran. Dalam hal ini diharapkan pengangguran terbuka dapat turun dari angka 13.808 jiwa pada tahun 2012.
4. Demikian pula sektoral adalah upaya pencapaian dari sasaran IPM, MDG's, Food Estate serta penanganan komoditi unggulan (MP3EI) secara signifikan.

3.2 Arah dan Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2015

Kebijakan keuangan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 secara umum ditujukan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah serta menyelesaikan isu strategis dan permasalahan daerah melalui perumusan program-program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dan memecahkan permasalahan penting (important) dan mendesak (urgent) yang

bias menjadi sector/ bidang pengungkit (leverage sektor), dan mengarah pada sektor/bidang pendorong utama (prime mover) pembangunan guna tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas, serta penciptaan lapangan kerja yang memadai.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka arah kebijakan keuangan berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja daerah tahun 2015 disusun untuk mendukung terwujudnya arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kubu Raya. Oleh karena itu agar usulan SKPD lebih realistis dan terukur, maka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perlu adanya penentuan prakiraan maju (estimasi), sehingga diperlukan tolok ukur dan analisis yang jelas dengan melihat proporsi terhadap total pembiayaan pembangunan.

Kebijakan keuangan daerah harus diarahkan secara maksimal untuk memperkuat pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) melalui elemen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (Government Consumption Expenditure) yang pada akhirnya juga memberi kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya.

Sesuai dengan RPJMD tahun 2009-2014. Tahun 2014 merupakan tahun kelima atau tahun terakhir dari periode RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2014 dan tahun pertama pelaksanaan RPJMD ke dua tahun 2014-2019 yang memiliki target pembangunan dibidang perekonomian yaitu untuk mengembangkan perekonomian berbasis pertanian, pertambangan, kelautan, industri, perdagangan, dan pariwisata yang didukung infrastruktur yang memadai. Maka untuk menunjang pencapaian target tersebut perlu diupayakan pembangunan prasarana dan sarana transportasi, pengairan dan permukiman untuk mendukung percepatan pengembangan investasi, pariwisata, dan pengembangan potensi ekonomi pada umumnya serta pengembangan etos kerja semangat kewirausahaan dan kemitraan dalam rangka menciptakan perluasan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan untuk meningkatkan kekuatan perekonomian.

Dalam usaha mendorong peran masyarakat dalam pembangunan perekonomian daerah terutama dalam rangka pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lokal lainnya. Pengelolaan sumber daya alam dilakukan dengan prinsip-prinsip memperhatikan kelestarian alam. Potensi ekonomi Kabupaten Kubu Raya yang memiliki sumber daya alam dan lahan pertanian yang semakin berkurang karena perubahan pemanfaatan lahan, sebenarnya masih terdapat lahan tidur yang belum dimanfaatkan dengan maksimal. Oleh karena itu upaya untuk mendorong pertumbuhan perekonomian disamping

sektor pertanian harus terus dilaksanakan dengan mendorong pembangunan di beberapa sektor potensi lainnya, yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran, jasa-jasa, pengangkutan dan komunikasi, bangunan konstruksi, persewaan dan jasa perusahaan serta jasa lainnya. Dengan potensi yang dimiliki usaha untuk mendorong pertumbuhan perekonomian sangat dipengaruhi oleh pengaruh eksternal yaitu kebijakan pemerintah pusat dalam bidang ekonomi, kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat khususnya kebijakan pengembangan ekonomi wilayah, serta perkembangan perekonomian daerah sekitar Kabupaten Kubu Raya. Faktor internal yang diupayakan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yaitu kebijakan fiskal/APBD dalam bidang perekonomian antara lain upaya penguatan kemandirian perekonomian melalui pembinaan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) dan Koperasi, penyediaan infrastruktur pertanian, penyediaan modal usaha dengan bunga rendah bagi UMKM dan koperasi, perbaikan atau pemeliharaan pasar-pasar, dan lain-lain. Selain dari pada itu faktor non ekonomi yang berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan perekonomian yaitu kondisi sosial dan politik, kondisi sosial dan keadaan politik yang stabil diharapkan dapat mendukung upaya mendorong perekonomian daerah.

Arah dan kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Kubu Raya diselaraskan dengan pencapaian Pentahapan dalam RPJPD 2009-2025 meliputi :

1. Pembangunan dan penyiapan Sumber Daya Manusia yang berkualitas di bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial Budaya, Pemerintahan, Agama dan Mental Spritual.
2. Pembangunan, penyiapan dan pemeliharaan infrastruktur dasar di bidang Pekerjaan Umum, Perhubungan, Air Bersih, Energi/Listrik, Telekomunikasi dan Informatika, dalam menunjang pembangunan ekonomi, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan membuka isolasi daerah,
3. Pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi berbasis Sumber Daya Manusia yang berkualitas, mengembangkan kewirausahaan dan potensi ekonomi kerakyatan, secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
4. Penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang menerapkan prinsip *good governance* dan *clean government*.

Dalam menyusun arah kebijakan keuangan daerah, maka perlu dibagi menjadi 2 (dua) kebijakan, yakni kebijakan pendapatan daerah dan kebijakan belanja daerah. Kebijakan pendapatan daerah dianalisa

berdasarkan perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DAU, DBH, dan DAK), serta Pendapatan Lain – lain. Sedangkan Kebijakan belanja daerah dianalisis berdasarkan perkembangan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Arah kebijakan keuangan daerah menggambarkan pokok-pokok kebijakan suatu daerah dalam pengelolaan keuangannya. Secara umum pokok-pokok kebijakan keuangan daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014, didasarkan pada :

1. Tetap melaksanakan dan memperhatikan prioritas kegiatan-kegiatan yang mendukung *program pro growth, pro poor, pro job dan pro environment*
2. Pelaksanaan kebijakan keuangan didasarkan pada upaya mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan dan penggunaannya diarahkan kepada upaya mengatasi masalah pembangunan dengan intensitas keterdesakan tinggi, yang menjadi kendala utama pembangunan.
3. Kebijakan Keuangan Daerah mengedepankan keterpaduan dan sinkronisasi, kebijakan program/kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
4. Melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskal dengan menjaga tingkat defisit yang terkendali dari aspek pembiayaan daerah.
5. Keuangan daerah dikelola dengan dengan pendekatan kinerja (*performance oriented*) untuk seluruh pengeluaran maupun penerimaan.
6. Meningkatkan peran redistribusi dan alokasi anggaran Pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks ini, kebijakan fiskal dapat dipergunakan untuk mempengaruhi sektor-sektor ekonomi atau kegiatan tertentu, untuk menyeimbangkan pertumbuhan pendapatan antar sektor ekonomi, antardaerah, atau antar golongan pendapatan.
7. Pengelolaan keuangan daerah diarahkan kepada upaya menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
8. Keuangan daerah harus dapat memberikan keleluasaan kepada para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya secara berdaya guna dan berhasil guna.
9. Untuk seluruh siklus anggaran pengelolaan keuangan daerah harus taat azas dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam

pertanggung-jawabannya baik dalam kerangka hukum maupun dalam kerangka administrasi.

10. Penerapan *Performance Based Budgeting* dan *Medium Term Expenditure Framework*. Penerapan strategi ini sebagai upaya untuk lebih mengefektifkan dan mengefesienkan (restrukturisasi) program dan kegiatan pada masing-masing Unit Kerja (SKPD). Upaya restrukturisasi tersebut dimulai dengan tahapan penetapan visi dan misi SKPD sesuai dengan rencana strategis, tugas serta fungsi masing-masing SKPD, restrukturisasi program yang bersumber dari tugas dan fungsi di masing-masing Pejabat yang ada di masing-masing SKPD hingga penetapan indikator kinerja kegiatan yang akan dilakukan melalui pendekatan kuantitas, kualitas dan harga. Selain itu dengan penerapan MTEF akan tampak sejauh mana kebutuhan pendanaan yang lebih detail pada masing-masing SKPD dan seberapa jauh kebutuhan tersebut dapat dipenuhi, baik dalam jangka menengah maupun panjang. Mengoptimalkan pengumpulan sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja daerah serta peningkatan dan perbaikan manajemen keuangan daerah.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2015

Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Kubu Raya diarahkan untuk penggalan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan penuh kehati-hatian (karena sebagian besar sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan pengusaha/wajib pajak golongan kecil menengah) dan optimalisasi dana perimbangan (DAU, DAK, dan bagi hasil pajak dan bukan pajak) sehingga lebih proporsional serta menggali potensi pendapatan lain yang sah. Kebijakan anggaran pendapatan tahun 2015 tetap diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan yaitu meningkatkan pendapatan dengan laju pertumbuhan pendapatan diupayakan minimal 10 persen. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.8
Target & Realisasi Pendapatan Daerah
Kab. Kubu Raya Tahun 2009-2013

No.	Tahun Anggaran	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	2009	471.736.892.406,33	473.460.797.013,29	100,37

2.	2010	635.915.730.784,54	606.571.533.938,93	95,39
3.	2011	770.713.423.803,42	741.570.719.543,01	96,21
4.	2012	822.408.609.617,98	793.415.089.047,86	96,47
5.	2013	960.682.549.371,00	954.287.220.660,27	99,30

Sumber : DPPKAD Kabupaten Kubu Raya, 2014

Bila dilihat dari Tabel 3.8, rata – rata target pendapatan yang telah tentukan dalam setiap tahun anggaran dapat dicapai di atas angka 95%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya telah menentukan target yang cukup rasional dalam setiap tahun penganggaran. Adapun kenaikan pendapatan rata – rata per tahun adalah 20 %.

Tabel 3.9
Target & Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah
Kab. Kubu Raya Tahun 2009-2013

No.	Tahun Anggaran	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	2009	30.965.846.359,00	40.062.871.451,74	129,38
2.	2010	110.602.858.412,00	90.536.175.386,40	81,86
3.	2011	148.465.081.772,00	141.284.803.942,73	95,16
4.	2012	102.496.636.047,48	92.859.871.976,36	90,60
5.	2013	125.816.611.085,00	115.029.563.617,00	91,43

Sumber : DPPKAD Kabupaten Kubu Raya, 2014

Berdasarkan tabel diatas terjadi fluktuatif target capaian pendapatan yang sah Kabupaten Kubu Raya, bahkan terjadi penurunan realiasasi pendapatan yang mencolok tahun 2011 sebesar Rp. 117.216.333.582,73 turun menjadi Rp. 83.784.240.805,00 pada tahun 2012 dan kembali meningkat pada tahun 2013 sebesar 98.501.754.571,00, secara rinci pendapatan daerah berdasarkan sumbernya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10
REALISASI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2009-2013

NO.	URAIAN	JUMLAH (Dalam Ribuan Rupiah)				
		TA. 2009	TA. 2010	TA.2011	2012	2013
1	2	3	4			
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	9.545.348	13.679.129,524	55.577.649,588	44.201.933,899	64.277.117,327
1.1	Pajak Daerah	5.847.360	3.608.300,884	41.811.687,276	33.695.092,360	48.513.648,885
1.2	Retribusi Daerah	1.839.090	4.417.408,473	5.570.968,831	6.835.292,867	8.166.001,288
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	166.756,499

	Yang Dipisahkan					
1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	1.858.898	5.653.420,167	8.194.993,480	3.671.548,671	7.430.710,654
2	DANA PERIMBANGAN	426.063.501	502.356.229,028	568.776.736,372	656.353.283,172	774.980.539,716
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	32.048.561	39.358.362,028	41.684.074,372	40.032.847,172	48.162.438,716
2.2	Dana Alokasi Umum	375.546.940	414.760.167	460.516.762	535.464.386	627.894.391
2.3	Dana Alokasi Khusus	18.468.000	48.237.700	66.575.900	80.856.050	98.923.710
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	12.991.843,487	90.536.175,386	141.284.803,942	92.859.871,976	115.029.563.617
3.1	Hibah	5.000.000	2.841.000	2.500.000	0,00	0,00
3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	75.031.060,360		31.174.451,617
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi Dan Daerah Lainnya	7.991.843.487,00	10.354.578,254	23.275.728,222	32.346.190,167	10.724.000,00
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	38.385.959,132	0,00	0,00	0,00
3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	11.118.000	7.866.500,00		
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	27.246.226.530,00	448.600.692.487,00			

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kubu Raya, 2014

Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Beberapa sumber pendapatan daerah Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Asli Daerah
 - a. Hasil Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - d. Lain-lain PAD yang Sah
- Dana Perimbangan
 - a. Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU)
 - c. Dana Alokasi Khusus (DAK)
- Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
 - a. Pendapatan Hibah
 - b. Dana Darurat
 - c. Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya
 - d. Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi dan Pemda Lainnya
 - e. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
 - f. Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemda Lainnya
 - g. Tunjangan Guru PNS

Kemampuan pengelolaan keuangan sangat menentukan bagi proses penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan maupun pelayanan umum.

Kemampuan dalam pengelolaan keuangan terlihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang bersumber dari kemampuan dalam mengoptimalkan sumber pendapatan sendiri (PAD) maupun kemampuan dalam memperoleh penerimaan keuangan yang bersumber dari pemerintah Pusat maupun pemerintah Provinsi.

Selanjutnya akan diuraikan ikhtisar perkiraan Pendapatan Daerah, yang dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, Pasal 1, angka 18 telah dinyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Khusus dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, beserta peraturan pendukung lainnya dalam menentukan Peraturan Daerah yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang Undang Nomor 33 tahun 2004, Pasal 6, ayat (1) dan juga Peraturan Pemerintah Nomor nomor 58 tahun 2005, Pasal 22, ayat (1) berasal dari :

- i. Pajak Daerah;
- ii. Retribusi Daerah;
- iii. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- iv. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Yang termasuk komponen Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari hasil pengelolaan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Terkait dengan Pendapatan Asli Daerah, telah diterbitkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009, khususnya Pasal 2, ayat (2) dijelaskan bahwa jenis Pajak Daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;

- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pendapatan Asli Daerah juga merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Semakin baik kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan dengan Pemerintah Pusat semakin berkurang. Sedangkan Dana perimbangan merupakan sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Tabel 3.11

Target dan Realisasi PAD Kabupaten Kubu Raya 2009-2013 serta proyeksi PAD Tahun 2014 - 2015

No.	Tahun Anggaran	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	2009	11.600.422.000,00	10.332.817.590,55	89,07
2.	2010	18.150.911.325,54	13.679.129.524,53	75,36
3.	2011	51.468.327.031,42	55.577.649.588,28	107,98
4.	2012	58.903.525.000,00	55.164.870.125,86	93,65
5.	2013	60.625.474.000,00	64.277.117.327,00	106,02
6.	2014*	88.138.698.826,08		
7.	2015*	94.308.407.744,21		

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kubu Raya, (Data diolah 2014)

Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan PAD adalah :

- a. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
- b. Pengggalian potensi Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta memperhatikan prinsip realistik dan elastis (artinya dapat / mudah naik turun mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan masyarakat) serta adil dan merata secara vertical dan horisontal (vertikal artinya sesuai dengan tingkatan kelompok masyarakat dan horizontal artinya berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak).
- c. Menyederhanakan prosedur pengelolaan Pajak dan Retribusi menuju terpenuhinya kepuasan pelayanan public / wajib pajak

- d. Melakukan perluasan basis penerimaan pajak dan retribusi. Upaya-upaya yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru / potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
- e. Melakukan Penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat tentang arti pentingnya pajak bagi pembangunan daerah sehingga secara politis dapat diterima oleh masyarakat, yang kemudian akan menimbulkan motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak.
- f. Melaksanakan tertib administrasi pungutan Pajak dan Retribusi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pelaksanaan administrasi harus fleksibel artinya sederhana dan mudah dihitung.
- g. Mengoptimalkan jenis-jenis pendapatan yang dikendalikan oleh Pemerintah Daerah melalui perbaikan administrasi dan pelayanan pajak dan retribusi daerah.
- h. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui penyediaan sarana prasarana pelayanan, penyempurnaan sistem pungutan, peningkatan profesionalisme pegawai.
- i. Revitalisasi dan restrukturisasi Badan Usaha Milik Daerah agar memberikan kontribusi pendapatan daerah.
- j. Melakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pemungutan Pendapatan Daerah.

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antara Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DBH bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Sedangkan DAU dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional.

Sumber penerimaan dari Dana Perimbangan menjadi sumber pembiayaan terbesar bagi Kabupaten Kubu Raya dalam rangka operasional pemerintahan maupun kegiatan fisik pembangunan. Pada tahun 2012 target penerimaan dari dana perimbangan sebesar Rp. 661.008.448.570,50 dengan realisasi dana perimbangan Kabupaten Kubu Raya tahun 2012 sebesar Rp. 654.465.978.117,00 dan pada tahun 2013 target penerimaan dari dana perimbangan sebesar Rp. 774.240.464.286.00 dengan Realisasi sebesar Rp. 412.904.867.768.00 sedangkan penerimaan dana perimbangan untuk tahun

2014 sebesar Rp. 757.009.797.748,00 atau meningkat sebesar 13.04 persen dari target tahun 2013.

Tabel 3.12

Target & Realisasi Dana Perimbangan Keuangan
Kab. Kubu Raya Tahun 2009-2013

No.	Tahun Anggaran	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	2009	429.170.624.047,00	423.065.107.971,00	98,58
2.	2010	507.161.961.047,00	502.356.229.028,00	99,60
3.	2011	570.780.015.000,00	568.776.736.372,00	99,65
4.	2012	661.008.448.570,50	656.353.283.172,00	99,01
5.	2013	774.240.464.286,00	774.980.539.716,00	100,10

Sumber : DPPKAD Kabupaten Kubu Raya, 2014

Strategi pencapaian target Dana Perimbangan, dengan :

- Melakukan sosialisasi mengenai pungutan PBB, PPH dan BPHTB dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak
- Peningkatan akurasi data potensi pajak dan potensi sumber daya alam bekerjasama dengan Kanwil Pajak sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan keuangan
- Meningkatkan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam perhitungan sumber daya alam agar memperoleh proporsi pembagian sesuai dengan potensi
- Meningkatkan koordinasi dengan Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan dan Panitia Anggaran DPR RI untuk mengupayakan peningkatan besaran DAU

Tabel 3.13

Proyeksi Dana Perimbangan Keuangan
Kab. Kubu Raya Tahun 2014-2015

No.	Tahun Anggaran	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1.	2014	781.832.388.984,00	
2.	2015	921.201.263.400,00	

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang diterima Pemerintah Daerah meskipun kecil, akan tetapi keberadaannya sangat menunjang / mendukung kemampuan pendanaan bagi Daerah tersebut.

Beberapa kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebagai bentuk sinkronisasi penyalarsan program dan kegiatan yang harus disesuaikan dan dilaksanakan oleh daerah dalam belanja tidak langsung maupun belanja langsung seperti pemberian bantuan keuangan provinsi dan alokasi dana penyesuaian/kontijensi serta penerimaan lain-lain daerah yang sah dalam bentuk bagi hasil pajak, retribusi dan sumbangan pihak ketiga dari provinsi yang dapat dipergunakan oleh daerah untuk kebutuhan belanja sesuai dengan prioritas daerah tanpa diarahkan dan ditetapkan pengukurannya oleh provinsi.

Sumber dana dari APBN melalui Kementrian/Lembaga (KL) yang dialokasikan untuk menunjang kegiatan lembaga teknis di daerah merupakan bagian pembiayaan yang sangat membantu pelaksanaan kegiatan pembangunan di daerah. Ketersediaan dana dari sumber APBN, sebagian digunakan untuk pembangunan gedung kantor, pengembangan kelembagaan sektor pertanian dalam rangka mendukung program ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat tani, maupun rencana untuk pengembangan wilayah, terkait dengan kegiatan transmigrasi

Lain-lain pendapatan daerah yang sah diperkirakan mengalami penurunan seiring dengan telah berjalannya sistem pemerintahan di Kabupaten Kubu Raya. Sumber lain-lain pendapatan daerah yang sah pos ini berupa hibah, Dana Bagi Hasil Dari Propinsi dan Pemda Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemda Lainnya, Lain-lain Pendapatan daerah yang sah untuk tahun 2012 realisasinya sebesar Rp. 83.784.240.805,00 menurun dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 102.496.636.047,48 untuk tahun 2013 target dari pos ini Rp. 125.816.611.085.00 realisasinya sebesar Rp. 98.501.754.571,00.

Tabel 3.14
Target & Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah
Kab. Kubu Raya Tahun 2009-2013

No.	Tahun Anggaran	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	2009	30.965.846.359,00	40.062.871.451,74	129,38
2.	2010	110.602.858.412,00	90.536.175.386,40	81,86
3.	2011	148.465.081.772,00	141.284.803.942,73	95,16
4.	2012	102.496.636.047,48	92.859.871.976,36	90,60
5.	2013	125.816.611.085.00	115.029.563.617,00	91,43

Sumber : DPPKAD Kabupaten Kubu Raya, 2013

Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut di atas, maka untuk dapat merealisasikan perkiraan rencana penerimaan pendapatan (target) pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2015 diuraikan strategi pencapaiannya sebagai berikut:

1. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan
2. Melaksanakan tertib administrasi penerimaan pajak secara efektif dan efisien.
3. Mengoptimalkan perolehan PAD sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Mengoptimalkan pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperkirakan akan meningkat besarannya (sejalan dengan kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil) agar lebih efektif dan efisien pemanfaatannya bagi pembangunan di Kabupaten Kubu Raya.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diasumsikan akan tetap besarnya karena bersifat given (pengeluaran/ kegiatannya sudah ditentukan). Demikian juga dengan Dana Bantuan keuangan dari Propinsi Kalimantan Barat yang diasumsikan tetap karena bersifat given juga.
6. Mengoptimalkan Pengelolaan dan pemanfaatan Dana bagi hasil dari propinsi diharapkan akan meningkat rata-rata 5% per tahun atau lebih.
7. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta pemanfaatan pengelolaan asset daerah sebagai salah satu sumber potensial PAD yang dapat dikembangkan lebih lanjut.
8. Mengupayakan peningkatan pendapatan dari Dana Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, antara lain dengan cara meningkatkan aktivitas perekonomian Kabupaten Kubu Raya, melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penyehatan iklim ketenagakerjaan, penegakan hukum dan peraturan perundangan, serta meningkatkan keamanan dan ketertiban mulai dari tingkat terkecil di lingkungan kelurahan dan kecamatan.
9. Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah, termasuk di dalamnya optimalisasi sistem organisasi dan kelembagaan pendapatan daerah, memberikan reward secara proporsional terhadap kinerja aparatur daerah yang baik dan berprestasi dalam mengelola pendapatan daerah.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2015

Kebijakan Umum Anggaran Belanja Pembangunan Daerah diarahkan pada prinsip-prinsip keadilan yang dapat dinikmati seluruh masyarakat khususnya dalam hal pelayanan publik yang disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah. Kemampuan anggaran belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, dimana terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Belanja dapat diklasifikasikan menurut ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi untuk Pemerintah Pusat meliputi belanja operasi (belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja modal, belanja lain-lain). Sedangkan belanja menurut organisasi antara lain terdiri dari pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan dan perlindungan sosial, disesuaikan dengan tugas masing-masing Satuan Unit Kerja (SKPD). Oleh karena itu program SKPD harus diarahkan untuk mencapai hasil dan keluaran yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana kerja pemerintah daerah. Menurut fungsinya belanja digunakan sebagai dasar untuk penyusunan anggaran berbasis kinerja guna memperoleh manfaat sebesar-besarnya, selain

daripada itu fungsi belanja juga dapat digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.

Alokasi Belanja Daerah yang akan disusun dalam Belanja Tak Langsung dan Belanja Langsung harus efektif dan efisien dengan mempertimbangkan :

- a). Tujuan, sasaran, hasil dan manfaat harus dinyatakan dengan jelas.
- b). Indikator kinerja harus jelas
- c). Prioritas kegiatan harus jelas termasuk beban kerja dan harga satuan yang rasional.

Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2015 yang terdiri dari komponen Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung diperkirakan akan mengalami peningkatan secara signifikan, seiring dengan semakin besarnya pembiayaan pembangunan. Pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Kubu Raya tetap memprioritaskan program penanggulangan kemiskinan dan upaya memberikan pelayanan umum yang lebih maksima dan Pembukaan desa terisolir dengan prioritas kegiatan membuka akses desa melalui jalan poros antar desa dan antar kecamatan serta untuk memperkuat ketahanan pangan.

Panduan usulan anggaran belanja oleh SKPD harus berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya 2009-2014 dan RPJMD ke dua Tahun 2014 – 2019. Usulan anggaran belanja oleh SKPD harus memprioritaskan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing – masing SKPD, mempertimbangkan indikator kinerja yang ingin dicapai, dan diprioritaskan pada :

1. Upaya nyata pengembangan sumber daya manusia dengan sasaran utama untuk memperbaiki indikator pendidikan terutama untuk peningkatan sub indikator rata-rata lama sekolah, serta indikator kesehatan untuk peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH)
2. Peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi dengan sasaran utama pembangunan infrastruktur untuk menunjang distribusi arus barang dan jasa, peningkatan produktivitas, peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah serta pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada sumber daya lokal.
3. Pengurangan kuantitas dan kualitas kemiskinan, serta pembukaan lapangan pekerjaan baru.

4. Penguatan ketahanan pangan dengan sasaran pemantapan lokasi lahan pangan, diversifikasi pangan non beras, serta pengamanan distribusi pupuk khususnya untuk pupuk bersubsidi.
5. Pengembangan dan penguatan kelembagaan petani, UMKM, dan koperasi.
6. Penguatan kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta peningkatan investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja baru.
7. Pengembangan dan penguatan komoditas unggulan daerah.
8. Mendorong pengembangan industri hilir dari sumber—sumber daya lokal.

Tabel 3.15

Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2011 s/d 2014 dan Proyeksi Tahun 2015

URAIAN	2011 (Rp.)	2012 (Rp.)	2013 (Rp.)	2014 (Rp.)	2015 (Rp.)*
Belanja Tidak Langsung	371.003.661.969,00	413.084.562.651,74	472.801.325.541,00	500.146.718.679,00	547.533.901.589,00
Belanja Langsung	435.169.407.010,00	456.261.069.328,00	488.991.934.865,00	630.779.135.824,04	659.886.739.005,21
Total Belanja Daerah	806.173.068.979,00	869.345.631.979,74	961.793.260.406,00	1.130.925.854,50304	1.207.320.640,594,21

Sumber : DPPKAD Kabupaten Kubu Raya, (Data diolah 2014) *) Proyeksi

Arah kebijakan umum pengelolaan Belanja Daerah di Kabupaten Kubu Raya selama kurun waktu 2011-2015 akan diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Proporsional

Pengelolaan belanja daerah terutama belanja langsung Kabupaten Kubu Raya diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja daerah disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja daerah untuk pembangunan infrastruktur publik yang memungkinkan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta.

2. Efisien dan Efektif

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi

Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

3. Prioritas

Sesuai dengan arah kebijakan belanja daerah penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, ketersediaan bahan pangan, peningkatan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya dan diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan serta penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih.

4. Transparan dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.

Berdasarkan RPJMD Kubu Raya Tahun 2009-2014, arah kebijakan umum belanja daerah tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Belanja Daerah di Kabupaten Kubu Raya akan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- b. Pada tahun 2014 diasumsikan ada kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 10%. Besarnya penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan rekonsiliasi jumlah pegawai dan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Untuk tahun 2014 diprediksikan terjadi peningkatan/kenaikan gaji sebesar 10%. Perhitungan gaji untuk tiap tahunnya ditambah akses yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan).
- c. Belanja Langsung akan selalu disesuaikan dengan ketersediaan anggaran setiap tahun, dan akan diupayakan secara merata pada semua sektor
- d. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dianggarkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta setelah memprioritaskan pemenuhan Belanja Urusan Wajib terlebih dahulu.
- e. Stimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil menuju kemandirian perekonomian daerah dalam rangka mengatasi masalah ketenagakerjaan dan kemiskinan;

- f. Dalam upaya untuk memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik, belanja daerah diharapkan dapat lebih diarahkan dalam mendukung peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan. Beberapa sektor tersebut adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan (pendukung sektor jasa), sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor jasa-jasa dan sektor konstruksi.
- g. Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat khususnya bidang pendidikan dan kesehatan;
- h. Alokasi Belanja Pendidikan diupayakan tetap berkisar pada angka 20% tidak termasuk Belanja Pegawai.
- i. Belanja daerah diarahkan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) khususnya efektifitas dan Efisiensi pengelolaan anggaran;
- j. Belanja daerah diarahkan Peningkatan infrastuktur pendukung peningkatan perekonomian dan penataan lingkungan hidup;

Dalam upaya pelaksanaan kebijakan anggaran belanja secara proposional, efisien, efektif dan prioritas, transparan dan akuntabel upaya yang ditempuh antara lain :

1. Belanja Aparatur Daerah diprioritaskan untuk :
 - a. Membiayai belanja pegawai;
 - b. Membiayai kebutuhan setiap unit kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. Meningkatkan SDM dan kesejahteraan para pegawai dengan tujuan untuk mencegah korupsi dan menambah prestasi kerja.
2. Belanja Pelayanan Publik diprioritaskan untuk :
 - a. Penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja masyarakat;
 - b. Pengembangan Investasi dan Daya Saing Daerah, kemudahan berusaha dan penyertaan modal penduduk miskin perdesaan dan perkotaan;
 - c. Penguatan kelembagaan masyarakat di tingkat petani;
 - d. Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Kelautan, Kehutanan dan Perkebunan, pertambangan dalam rangka mendukung ketahanan pangan;

- e. Pembangunan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kesehatan serta perluasan cakupan pelayanan publik;
 - f. Peningkatan infrastruktur melalui peningkatan aksesibilitas masyarakat perdesaan-perkotaan, penyediaan sarana dan prasarana Air Bersih, Energi/Listrik, Energi Terbaharukan, dan Telekomunikasi untuk menunjang Pemerataan Pembangunan dan pembinaan wilayah transmigrasi;
 - g. Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Irigasi, Rawa, pengendalian banjir dan Jaringan Pengairan Lainnya;
 - h. Pengarusutamaan gender dan perlindungan ibu dan anak;
 - i. Penataan, Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme Birokrasi melalui Penerapan *E-Government* dan *Good Governance*.
3. Belanja Tidak Terduga dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial, kejadian luar biasa (KLB) dan pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan namun belum tertampung dalam program/ kegiatan dan dianggap mendesak dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Berikut adalah hasil analisis realisasi, plafon dan proyeksi belanja daerah Kabupaten Kubu Raya :

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun 2015

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih

besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Penerimaan pembiayaan mencakup:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA);
2. Pencairan Dana Cadangan
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
4. Penerimaan Pinjaman Daerah
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
6. Penerimaan Piutang Daerah
7. Penerimaan Dana Bergulir
8. Penerimaan Hasil Penarikan

Pengeluaran Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari:

1. Pembentukan dana cadangan;
2. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
3. Pembayaran pokok utang; dan
4. Pemberian pinjaman daerah;
5. Pemberian Dana Bergulir.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah berisikan uraian mengenai kebijakan penerimaan pembiayaan daerah yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah, dan kondisi keuangan daerah. Adapun arah kebijakan penerimaan pembiayaan untuk tahun anggaran 2015 adalah sebagai berikut:

1. Dalam menetapkan anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), agar disesuaikan dengan kapasitas potensi riil sesuai ketentuan yang ada untuk menghindari kendala pendanaan pada belanja yang telah direncanakan.
2. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, agar waktu penggunaan dan besarnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan. Sedangkan akumulasi penerimaan hasil bunga/deviden dari dana cadangan dianggarkan pada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

Sedangkan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagai upaya peningkatan sumber pembiayaan dengan meningkatkan manajemen

pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi, efektivitas dan profitabilitas. Sedangkan strategi yang diambil adalah sebagai berikut :

1. Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan Kas dalam bentuk giro, deposito, penyertaan modal atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.
2. Apabila APBD defisit, maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, dan melakukan efisiensi dan penghematan belanja.
3. Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD, maka ditutup dengan dana pinjaman.

BAB IV

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015

4.1. Sasaran Makro Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan disusun guna memadukan langkah para pemangku kepentingan untuk menangani berbagai permasalahan yang dihadapi oleh daerah. Dari masalah-masalah sebagaimana diungkapkan di dalam Bab II, maka disusunlah sasaran-sasaran yang pencapaiannya menunjukkan tingkat kinerja program-program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015. Pencapaian sasaran pembangunan pada tahun 2015 sebagai tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 memiliki arti strategis karena meletakkan landasan bagi pencapaian target-target pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.

Tabel 4.1
Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2013

1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,87 %	6,23 %	6,51 %	6,69 %	6,77 %
2	PDRB Harga Berlaku (Rp. juta)	7.614.573,31	8.782.341,00	9.968.601,17	11.204.861,88	12.608.827,76
3	PDRB Harga Konstan (Rp. juta)	4.647.308,00	4.936.652,99	5.258.029,09	5.609.791,26	5.989.616,98
4	Jumlah Penduduk (Jiwa)	490.410	500.970	511.240	522.170	
5	PDRB Perkapita (Rp.)	15.318.175,9	17.566.983,11	19.518.618,97	21.450.000,00	
6	Pengeluaran Perkapita/Bulan (Rp.)		619.720,00	621.300,00	626.220,00	
7	Angkatan Kerja (jiwa)	239.108	237.118	253.598	227.891	
8	Pengangguran (jiwa)	17.220	14.713	11.468	13.808	
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,20	6,20	4,52	6,06	
10	Penduduk yang bekerja (jiwa)	221.888	222.405	242.130	214.083	
11	<i>Incremental Capital Output Ratio</i> (ICOR)	3,97	3,51	3,46	3,37	

Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya 2013 *) Angka sementara

Dalam upaya mencapai target yang ditetapkan di atas, maka sasaran-sasaran pembangunan pada setiap bidang dirumuskan untuk menangani isu-isu strategis antara lain : (1) Peningkatan IPM (Pendidikan dan Kesehatan); (2) Pembangunan dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar; (3) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi.

4.2. Sasaran Menurut Bidang Pembangunan

Pencapaian sasaran-sasaran makro pembangunan pada dasarnya merupakan dampak dari ketercapaian sasaran-sasaran pada bidang-bidang pembangunan. Sasaran-sasaran pembangunan berdasarkan bidang/urusan pembangunan adalah sebagaimana berikut.

a. Bidang Pendidikan

- 1) Terwujudnya fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pendidikan
- 2) Terwujudnya penyebaran guru yang merata dan berkualitas
- 3) Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan dari tingkat PAUD sampai dengan Pendidikan Menengah yang memadai
- 4) Tercapainya peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), APK (Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi Murni) melalui penyelenggaraan pendidikan
- 5) Terselenggaranya pendidikan non formal dan luar sekolah

b. Bidang Kesehatan

- 1) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
- 2) Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan

c. Bidang Pekerjaan Umum

Sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai dalam urusan pekerjaan umum adalah sebagai berikut :

- 1) Tersedianya jaringan infrastruktur jalan, dan jembatan yang terintegrasi antar moda untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa.
- 2) Tersedianya infrastruktur sumber daya air, daerah rawa, dan daerah irigasi yang layak untuk mendukung upaya ketahanan air, pengendalian daya rusak air dan ketahanan pangan

d. Bidang Perhubungan

Adapun sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai dalam urusan perhubungan adalah sebagai berikut : Tersedianya infrastruktur transportasi udara, laut, darat, sungai, danau dan penyebrangan untuk mendukung pergerakan perhubungan orang, barang dan jasa.

e. Bidang Lingkungan Hidup

- 1) Menurunnya laju kerusakan lingkungan
- 2) Menurunnya beban pencemaran lingkungan

f. Bidang Perencanaan Pembangunan

Sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai dalam urusan Perencanaan Pembangunan daerah melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas.

g. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1) Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan kesetaraan gender.
- 2) Meningkatnya Upaya-upaya perlindungan anak.

h. Bidang Sosial

Sasaran yang akan dicapai pada bidang sosial adalah terlayani dan diberdayakannya masyarakat miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masyarakat Kesejahteraan Sosial (PMKS).

i. Bidang Ketenagakerjaan

- 1) Tersedianya tenaga kerja terampil sesuai pasar kerja
- 2) Meningkatnya pelatihan *entrepreneur*

j. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Adapun sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai dalam bidang koperasi dan usaha kecil menengah adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan tingkat keaktifan anggota koperasi;
- 2) Meningkatkan inovasi dan adopsi teknologi dalam pengembangan produk yang berdampak pada diversifikasi produk;
- 3) Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan usaha bagi UMKM
- 4) Mengoptimalkan jaringan pasar industri kecil dan kemitraan dalam usaha pemasaran;
- 5) Mengoptimalkan akses modal bagi UMKM

k. Bidang Penanaman Modal

Adapun sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai dalam bidang penanaman modal adalah sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan pengelolaan promosi investasi;
- 2) Meningkatkan iklim investasi yang kondusif khususnya dalam hal pelayanan peizinan;
- 3) Meningkatkan infrastruktur seperti jaringan listrik, air bersih, dan aksesibilitas wilayah.

1. Bidang Kebudayaan

Sasaran di bidang kebudayaan adalah meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal.

m. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

- 1) Meningkatnya peran kepramukaan dan pemuda dalam pembangunan
- 2) Meningkatnya prestasi olahraga

n. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

- 1) Diberdayakannya masyarakat dalam penciptaan ketentraman dan ketertiban
- 2) Meningkatnya koordinasi antara Satuan/Unit Kerja dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat
- 3) Terhindarnya daerah dari potensi konflik
- 4) Terciptanya ketentraman dan ketertiban lingkungan
- 5) Meningkatkan kualitas penegakan hukum dan perlindungan HAM

o. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

- 1) Terlayani dan diberdayakannya masyarakat miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- 2) Terselenggaranya manajemen pendidikan yang efektif dan efisien
- 3) Meningkatnya aktifitas dan kualitas kehidupan beragama masyarakat
- 4) Mengembangkan kerja sama pembangunan yang memberikan manfaat optimal bagi daerah
- 5) Kerja sama pembangunan antar daerah
- 6) Peraturan yang mendukung iklim investasi
- 7) Terwujudnya Sasaran Pembangunan daerah melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas
- 8) Meningkatnya kualitas SDM aparatur
- 9) Terwujudnya manajemen kepegawaian yang efektif dan efisien
- 10) Terwujudnya pembinaan dan perlindungan hukum bagi aparatur
- 11) Terwujudnya aparatur yang paham akan peraturan perundangan dalam mendukung *good governance* dan *clean governance*
- 12) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
- 13) Terkomunikasikannya kebijakan daerah kepada publik
- 14) Terwujudnya pelayanan publik
- 15) Terwujudnya sistem pengawasan yang efektif dan efisien
- 16) Terasilitasinya tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan

- 17) Terwujudnya Pelaksanaan Reformasi birokrasi di daerah
- 18) Tercapainya opini pemeriksaan Wajar Tanpa Pengecualian
- 19) Meningkatkan kualitas penegakan hukum dan perlindungan HAM
- 20) Tersedianya jaringan infrastruktur jalan dan jembatan yang terintegrasi antar moda untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa
- 21) Terwujudnya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam rangka pengurangan resiko bencana
- 22) Terwujudnya Penanganan darurat dan pendistribusian logistik bencana pada daerah terkena bencana
- 23) Terwujudnya pemulihan wilayah baik fisik maupun sosial ekonomi pada daerah pasca bencana
- 24) Meningkatnya pendapatan daerah

p. Bidang Ketahanan Pangan

Adapun sasarapembangunan daerah bidang ketahanan pangan adalah sebagai berikut:

- 1) Mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya untuk pengendalian waktu tanam, penyimpanan, dan pengelolaan, sehingga dapat membahayakan konsumen;
- 2) Mengoptimalkan diversifikasi produk pangan lokal;
- 3) Mengoptimalkan penegakan hukum distribusi pangan;
- 4) Mengoptimalkan pengelolaan lumbung pangan lokal.

q. Bidang Komunikasi dan Informatika

Adapun sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai dalam urusan Komunikasi dan Informatika adalah tersedianya sarana, prasarana, dan layanan komunikasi dan informatika yang merata diseluruh wilayah Kabupaten Kubu Raya.

r. Bidang Perpustakaan

Sasaran yang ingin dicapai melalui pembangunan di bidang perpustakaan adalah meningkatnya wawasan dan pengetahuan masyarakat yang berakhlak.

s. Bidang Pertanian

Adapun sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai dalam bidang pertanian adalah:

- 1) Mengoptimalkan sarana dan prasarana produksi pertanian;

- 2) Mengendalikan serangan hama dan penyakit pertanian;
- 3) Mengendalikan harga hasil produksi pertanian;
- 4) Meningkatkan kemampuan dalam pengolahan pasca panen dan pemasaran hasil produk pertanian;
- 5) Mengoptimalkan pengelolaan manajemen agribisnis;
- 6) Mengoptimalkan jaringan informasi pasar produk pertanian;
- 7) Mengoptimalkan kapasitas kelembagaan pertanian;
- 8) Pemerataan akses permodalan bagi petani;
- 9) Mengoptimalkan kepastian lahan usaha pertanian.

t. Bidang Kehutanan

Adapun sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai dalam bidang kehutanan adalah sebagai berikut;

- 1) Mengurangi dan pencegahan terhadap ancaman kerusakan hutan oleh pencurian kayu illegal;
- 2) Mengoptimalkan fungsi kelembagaan kelompok tani kehutanan;
- 3) Meningkatkan akses petani kehutanan terhadap sumber permodalan
- 4) Luas hutan rakyat semakin berkurang akibat dari kegiatan pemukiman dan penambangan;
- 5) Mengurangi lahan kritis.

u. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Sasaran yang ingin dicapai bidang energi dan sumber daya mineral adalah:

- 1) Menurunnya laju kerusakan lingkungan
- 2) Meningkatnya pemanfaatan sumber daya mineral bagi peningkatan ekonomi masyarakat
- 3) Meningkatnya penyediaan air bersih didaerah sulit air serta terpenuhinya pasokan ketenagalistrikan wilayah Kabupaten Kubu Raya dengan pengembangan energi berbasis energi baru dan terbarukan.

v. Bidang Kelautan dan Perikanan

Adapun sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai dalam bidang perikanan adalah sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan fungsi kelembagaan nelayan dan petani pembudidaya perikanan;
- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan ekosistem perairan umum;

- 3) Meningkatkan sarana dan prasarana tangkap (kauntitas, teknologi dan SDM);
- 4) Mengoptimalkan akses permodalan petani perikanan;
- 5) Mengurangi illegal fishing di perairan Kabupaten Kubu Raya.

w. Bidang Perindustrian dan Perdagangan

Adapun sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai dalam bidang Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan penguasaan dan penerapan teknologi bagi industri kecil;
- 2) Peningkatan inovasi produk sehingga mampu mengimbangi kebutuhan pasar;
- 3) Peningkatan ketersediaan bahan baku industri;
- 4) Mengoptimalkan kemitraan antar pelaku usaha;
- 5) Mengoptimalkan sarana infrastruktur (energi, air, dan jalan);
- 6) Peningkatan kualitas daya saing produk;
- 7) Meningkatkan kondisi sarana prasarana pasar tradisional.

BAB V

PRIORITAS DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015

5.1 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2015

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya 2009-2014, Prioritas pembangunan daerah dikelompokkan ke dalam 5 sasaran pembangunan yaitu : 1) sasaran pembangunan bidang Pendidikan, 2) sasaran pembangunan bidang kesehatan, 3) sasaran pembangunan bidang ekonomi, 4) sasaran pembangunan bidang Infrastruktur Wilayah dan 5) sasaran pembangunan bidang Tata kelola pemerintahan.

Dari Ke Lima sasaran pembangunan tersebut di jabarkan ke dalam 29 program prioritas daerah berdasarkan pencapaian misi daerah dalam RPJMD sebagai berikut :

Misi 1 : Menciptakan SDM yang berkualitas melalui peningkatan pendidikan dan kesehatan, mengembangkan tatanan kehidupan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, berbudaya & bertoleransi serta meningkatkan kesejahteraan sosial.

Dalam pencapaian misi ini ada 11 program prioritas daerah dimaksud antara lain :

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan yang terjangkau.
2. Meningkatnya mutu pendidikan & tenaga kependidikan.
3. Meningkatnya tata kelola pendidikan yang akuntabel.
4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
5. Meningkatnya kualitas kesehatan ibu, anak & masyarakat miskin.
6. Meningkatnya keluarga kecil yang berkualitas.
7. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat.
8. Meningkatnya kualitas & partisipasi pemuda & meningkatnya kesehatan & kebugaran jasmani masyarakat serta prestasi olah raga.
9. Meningkatnya pariwisata dengan memanfaatkan potensi budaya daerah.
10. Meningkatnya perlindungan & kesejahteraan sosial serta pemberdayaan masyarakat.
11. Terwujudnya percepatan pembangunan di wilayah transmigrasi.

Misi 2 : Meningkatkan perekonomian kerakyatan yang berbasis kompetensi sejalan dengan tuntutan kebutuhan teknologi dan kemitraan serta meningkatkan dan mengembangkan iklim investasi yang kondusif,

memperluas kesempatan kerja dan membangun sistem pelayanan perizinan yang prima.

Dalam pencapaian misi ini ada 5 program prioritas daerah dimaksud antara lain :

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluh pertanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan.
2. Berkembangnya perdagangan daerah.
3. Berkembangannya UMKM, Industri kecil dan menengah serta koperasi.
4. Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar.
5. Terwujudnya percepatan pembangunan di wilayah perbatasan dalam suatu wilayah pengembangan ekonomi yang terintegrasi dan strategis.

Misi 3 : Meningkatkan, mengembangkan dan memberdayakan potensi SDA yang berkelanjutan dengan tetap menjaga & mempertahankan kualitas & kelestarian fungsi lingkungan hidup melalui konsep & mekanisme perencanaan yang menjaga keseimbangan, keterkaitan, & keadilan kepentingan kegiatan-kegiatan pembangunan daerah secara menyeluruh.

Dalam pencapaian misi ini ada 6 program prioritas daerah dimaksud antara lain :

1. Meningkatnya produktivitas dan kualitas produk komoditi unggulan bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, dan perikanan, keanekaragaman hayati, kehutanan dan pertambangan energi serta ESDM.
2. Meningkatnya produktivitas dan kualitas komoditas produk unggulan bidang kehutanan dan perkebunan.
3. Terwujudnya perlindungan sumber daya hutan dan perkebunan.
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan usaha pertambangan.
5. Meningkatnya pembinaan dan pengendalian usaha pertambangan rakyat, bahan bakar dan energi.
6. Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup.

Misi 4 : Meningkatkan kinerja dan profesionalisme aparatur pemerintah melalui reformasi birokrasi (kelembagaan) selaras dengan pemenuhan prinsip-prinsip *good governance* berikut ketaatan pada sistem hukum yang berlaku serta meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah yang merata, berkualitas dan berkelanjutan.

Dalam pencapaian misi ini ada 7 program prioritas daerah dimaksud antara lain :

1. Meningkatnya profesional aparatur.

2. Meningkatnya pelayanan prima kepada aparatur untuk mendorong terciptanya pelayanan kepada masyarakat.
3. Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif dengan dukungan optimalisasi penerimaan daerah.
4. Meningkatnya kinerja aparatur, pengawasan yang berdaya guna untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
5. Tersedianya sarana dan prasarana wilayah, transportasi darat, sungai, penyeberangan dan laut secara memadai dengan dukungan pos, informasi dan komunikasi serta telekomunikasi yang mantap.
6. Tersedianya pelayanan kehumasan untuk kepentingan publik.
7. Meningkatnya penghayatan dan pengamalan nilai-nilai mental spiritual.

Memperhatikan Kabupaten Kubu Raya yang memasuki tahapan RPJMD ke dua tahun 2014-2019 yang saat ini dalam tahap penyusunannya, oleh karena itu penyusunan RKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 harus berpedoman pada RPJMD terdahulu dan RPJPD Kabupaten Kubu Raya 2009-2029 dan RPJMD Kalimantan Barat 2013-2018.

Prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2013-2018 dikelompokkan kedalam 7 prioritas pembangunan yaitu : 1) Peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat 2) peningkatan kecerdasan sumber daya manusia 3) peningkatan derajat kesehatan masyarakat 4) peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, manajemen pemerintah dan pelayanan publik 5) Peningkatan pembangunan infrastruktur dasar 6) peningkatan kemampuan pembiayaan pembangunan dan 7) peningkatan pemerataan pembangunan, keadilan, keamanan, kedamaian serta ketahanan budaya.

5.2 Program-program Prioritas Pembangunan Daerah

Program-program prioritas pembangunan daerah disusun berdasarkan visi dan misi pembangunan dengan memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Program-program pembangunan tersebut dikelompokkan menurut urusan pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam uraian berikut :

1.1. Pendidikan

Urusan wajib pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya dengan rencana program sebagai berikut:

- 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini
- 2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
- 3) Program Pendidikan Menengah

- 4) Program Pendidikan Non Formal
- 5) Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
- 6) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
- 7) Program Penyediaan Operasional Sekolah
- 8) Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Pendidikan
- 9) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1.2. Kesehatan

Urusan wajib kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, dengan program prioritas sebagai berikut:

- 1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
- 2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- 3) Program Pengawasan Obat dan Makanan
- 4) Program Media Promosi dan Promosi Sadar Hidup Sehat
- 5) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- 6) Program Lingkungan Sehat
- 7) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- 8) Program Pengawasan Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) Berpotensi Wabah
- 9) Program Pencegahan Penyebaran Penyakit Kelamin dan HIV/AIDS
- 10) Program Pemberantasan Penyakit Kusta dan Mengurangi Stigma di Masyarakat
- 11) Program Penemuan, Pengobatan dan Pengawasan Penyakit TB Paru
- 12) Program Penyakit Malaria Dengan Malaria Malaometrik
- 13) Penanggulangan Penyakit DBD
- 14) Program Pengobatan Massal Filaria dan Home Care
- 15) Program Penanggulangan Penyakit Kecacangan Pada Anak SD
- 16) Program P2D2ML
- 17) Program Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah
- 18) Program Peningkatan Imunisasi
- 19) Program Peningkatan Surveilence Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
- 20) Program Matra
- 21) Program Penyakit Tidak Menular
- 22) Program Penyakit Air Bersih dan Sanitasi Dasar
- 23) Program Pengawasan Kualitas Lingkungan
- 24) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
- 25) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

- 26) Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- 27) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
- 28) Program Penyusunan Sistem Informasi Kesehatan
- 29) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
- 30) Program Pengembangan dan Manajemen Kesehatan
- 31) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1.3. Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Penataan Ruang

Urusan wajib pekerjaan umum, perumahan, dan penataan ruang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan, dengan program prioritas sebagai berikut:

1.3.1. Bina Marga dan Pengairan

- 1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
- 2) Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
- 3) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- 4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
- 5) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
- 6) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya
- 7) Program Pengendalian Banjir
- 8) Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku

1.3.2. Cipta Karya, Tata ruang, dan Kebersihan

- 1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
- 2) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
- 3) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- 4) Program Pengembangan, Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
- 5) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
- 6) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
- 7) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Lingkungan
- 8) Program Lingkungan Sehat Perumahan
- 9) Program Perencanaan Tata Ruang
- 10) Program Pemanfaatan Ruang
- 11) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- 12) Program Pemeliharaan Lampu Penerangan
- 13) Program Peningkatan Penerangan
- 14) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

15) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

16) Program Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan

1.4. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan merupakan salah satu urusan wajib yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), dengan program prioritas sebagai berikut:

- 1) Program Perencanaan Tata Ruang
- 2) Program Pengembangan Data atau Informasi
- 3) Program Kerjasama Pembangunan
- 4) Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah
- 5) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- 6) Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
- 7) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
- 8) Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
- 9) Program Perencanaan prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
- 10) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

1.5. Perhubungan

Urusan wajib perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan program prioritas sebagai berikut:

- 1) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
- 2) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
- 3) Program Peningkatan dan Pengamanan LL Perairan Daratan
- 4) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
- 5) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
- 6) Program Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
- 7) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLASD

1.6. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan salah satu urusan wajib yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup, dengan program prioritas sebagai berikut:

- 1) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- 2) Program Kapasitas Sumberdaya Aparatur
- 3) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelola Keuangan Daerah
- 4) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

- 5) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
- 6) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
- 7) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
- 8) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- 9) Program Peningkatan Pengendalian Polusi
- 10) Program Pengendalian Kebakaran Hutan
- 11) Program dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

1.7. Kependudukan dan Catatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertugas untuk melaksanakan urusan wajib kependudukan dan catatan sipil, dengan program prioritas sebagai berikut:

- 1) Program Penataan Administrasi Kependudukan

1.8. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Urusan wajib pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga berencana dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, dengan program prioritas sebagai berikut:

- 1) Program Keserasian Kebijakan dan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
- 2) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
- 3) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
- 4) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
- 5) Program Keluarga Berencana
- 6) Program Kesehatan Reproduksi Remaja
- 7) Program Pelayanan Kontrasepsi
- 8) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
- 9) Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat
- 10) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KKR
- 11) Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
- 12) Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
- 13) Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
- 14) Program Pengembangan Modal Operasional BKB Posyandu Padu.

1.9. Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi melaksanakan beberapa urusan wajib yaitu sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi, dengan beberapa program prioritas sebagai berikut:

- 1) Program Pembinaan Anak Terlantar dan Para Cacat/Taruma
- 2) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya)
- 3) Program Pemberdayaan dan Bantuan Jaminan
- 4) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan
- 5) Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
- 6) Program Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial
- 7) Program Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial
- 8) Program Peningkatan Kapasitas Pengurus Kelembagaan Sosial
- 9) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
- 10) Program Peningkatan Kesempatan Kerja
- 11) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
- 12) Program Transmigrasi Lokal
- 13) Program Transmigrasi Regional
- 14) Program Pengembangan Wilayah KTM Rasau Jaya

1.10. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Dinas Koperasi dan UMKM bertugas untuk melaksanakan urusan wajib koperasi dan usaha kecil menengah dengan program prioritas sebagai berikut:

- 1) Program Penciptaan Iklim Yang Kondusif Bagi UMKM
- 2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Bagi UMKM
- 3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM
- 4) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM
- 5) Program Penciptaan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi UMKM
- 6) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

1.11. Penanaman Modal

Urusan wajib penanaman modal dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT), dengan program prioritas sebagai berikut:

- 1) Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi
- 2) Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
- 3) Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah

- 4) Program Peningkatan Pelayanan Akta Perijinan
- 5) Program Peningkatan Pelayanan di Bidang Perizinan Jasa Usaha
- 6) Program Peningkatan Pelayanan Perizinan di Bidang Perizinan Tertentu
- 7) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1.12. Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olah Raga

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olah Raga melaksanakan beberapa urusan wajib yaitu kebudayaan, pariwisata, pemuda, dan olah raga, dengan beberapa program prioritas sebagai berikut:

- 1) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 2) Program Pengembangan Nilai Budaya
- 3) Program Pemberian Dukungan dan Kerja Sama dibidang Budaya
- 4) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
- 5) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
- 6) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kepemudaan
- 7) Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
- 8) Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
- 9) Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga
- 10) Program Pengembangan Sarana dan Prsarana Olahraga
- 11) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
- 12) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- 13) Program Pengembangan Kemitraan

1.13. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan Perlindungan Masyarakat melaksanakan urusan wajib kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, dengan prioritas sebagai berikut:

- 1) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- 2) Program Pemeliharaan Kantribnas dan Pencegahan Tindak Kriminal
- 3) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- 4) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- 5) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.
- 6) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
- 7) Program Pendidikan Politik Masyarakat

1.14. Pemerintahan Umum

Urusan wajib Pemerintahan Umum dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah, Inspektorat Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, Satuan Polisi Pamong Praja.

1.14.1. Sekretariat Daerah

1.14.1.1. Bagian Pemerintahan

- 1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- 2) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala/Wakil Kepala Daerah
- 3) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
- 4) Program Penataan Daerah Otonomi Daerah
- 5) Program Penataan Kecamatan/Kelurahan
- 6) Program Pemberdayaan Kecamatan

1.14.1.2. Bagian Hukum dan HAM

- 1) Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
- 2) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

1.14.1.3. Bagian Pertanahan

- 1) Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
- 2) Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
- 3) Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

1.14.1.4. Bagian Perekonomian dan Pembangunan

- 1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- 2) Program Peningkatan Kerja Sama antar Pemerintah Daerah

1.14.1.5. Bagian Kesejahteraan Sosial

- 1) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- 2) Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- 3) Program Pengembangan Lingkungan Sehat
- 4) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
- 5) Program Pendidikan Menengah

1.14.1.6. Bagian Ketahanan Pangan

- 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan
- 2) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Program Aksi Mandiri Pangan
- 3) Program Pengembangan Agribisnis

1.14.1.7. Bagian Organisasi

- 1) Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, dan Aparatur Pemerintah Daerah

1.14.1.8. Bagian Hubungan Masyarakat

- 1) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik

1.14.1.9. Bagian Administrasi

- 1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 2) Program Penyclamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah

1.14.1.10. Bagian Umum

- 1) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

1.14.2. Sekretariat DPRD

- 1) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
- 2) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD
- 3) Program Penataan Kapasitas Lembaga DPRD

1.14.3. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah

- 1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

1.14.4. Inspektorat Daerah

- 1) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 2) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3) Program Peningkatn Sistem Pengawasan Interen dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
- 4) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

1.14.5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- 1) Program Peningkatan Kapasitas
- 2) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
- 3) Program Peningkatan Kesigapan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
- 4) Program Pelayanan Darurat
- 5) Program Perencanaan dan Pembangunan Daerah

1.14.6. Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

- 1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
- 2) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Peternakan Lapangan
- 3) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
- 4) Program Pengembangan Budidaya Perikanan

- 5) Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
- 6) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
- 7) Program Pengembangan Kemitraan Usaha Agromina
- 8) Program Pengembangan SDM Pelaku Usaha/Pelaku Utama
- 9) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
- 10) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
- 11) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan
- 12) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
- 13) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- 14) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

1.14.7. Satuan Polisi Pamong Praja

- 1) Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 2) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3) Program Peningkatan Keamanan, dan Kenyamanan Lingkungan

1.15. Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah diberi tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan urusan wajib kepegawaian, dengan program prioritas sebagai berikut:

- 1) Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 3) Program Pembinaan

1.16. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa bertugas untuk melaksanakan urusan wajib pemberdayaan masyarakat dan desa, dengan program prioritas sebagai berikut:

- 1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 2) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
- 3) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
- 4) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
- 5) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- 6) Program Pembimbingan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan ADD
- 7) Program Pengembangan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa
- 8) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan PNPM
- 9) Program Penataan Wilayah Pemerintahan Desa

1.17. Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah

Urusan wajib kearsipan dilaksanakan oleh Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah, dengan program prioritas sebagai berikut:

- 1) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
- 2) Program Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Dokumen/Arsip Daerah
- 3) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
- 4) Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
- 5) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan
- 6) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
- 7) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan

1.18. Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika bertugas untuk melaksanakan urusan wajib komunikasi dan informatika, dengan program prioritas sebagai berikut:

- 1) Program Pengembangan dan Implementasi e-Government
- 2) Program Implementasi LPSE
- 3) Program Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Berbasis E-Gov
- 4) Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
- 5) Program Piranti Keras dan Jaringan Pengembangan Jaringan Komunikasi
- 6) Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

1.19. Dinas Pertanian Perternakan

Dinas Pertanian dan Peternakan bertugas untuk melaksanakan urusan pilihan pertanian, dengan program prioritas sebagai berikut:

- 1) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
- 2) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Peternakan
- 3) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
- 4) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
- 5) Program Peningkatan Produksi Peternakan
- 6) Program Sistem Informasi/Database Pertanian
- 7) Program Pengembangan Agribisnis
- 8) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan
- 9) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produksi Tanaman Hortikultural Berkelanjutan
- 10) Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian

- 11) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasaranan dan Sarana Pertanian
- 12) Program Pencapaian Swasembada Daging dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani Yang Asuh
- 13) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasaranan dan Sarana Peternakan

1.20. Perkebunan, Kehutanan, Energi, dan Sumberdaya Mineral

Dinas Perkebunan, Kehutanan, dan Pertambangan bertugas untuk melaksanakan beberapa urusan pilihan yaitu perkebunan, kehutanan, energi, dan sumberdaya mineral, dengan program prioritas sebagai berikut:

- 1) Program Pengadaan Peralatan Khusus Kehutanan
- 2) Program Peningkatan Produksi Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
- 3) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani/Pekebun
- 4) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan
- 5) Program Pengembangan Agribisnis
- 6) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
- 7) Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- 8) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
- 9) Program Pembinaan Ketenagalistrikan Masyarakat

1.21. Kelautan dan Perikanan

Urusan wajib kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan, dengan program prioritas sebagai berikut:

- 1) Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat
- 2) Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
- 3) Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar
- 4) Program Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Perikanan
- 5) Program Pengembangan Pemukiman Masyarakat Pesisir
- 6) Program Pengembangan Perikanan Tangkap
- 7) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Ikan
- 8) Program Pengembangan Budidaya Perikanan

- 9) Program Konservasi/Reklamasi Hutan Mangrove Kawasan Pesisir
- 10) Program Pemberdayaan Ekonomi
- 11) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Hasil Perikanan
- 12) Program Peningkatan Kesadaran Hukum
- 13) Program Pemberdayaan Pengelolaan Hasil Produksi Perikanan

1.22. Perdagangan dan Perindustrian

Dinas Perindustrian dan Perdagangan bertugas untuk melaksanakan urusan pilihan perdagangan dan perindustrian dengan program prioritas sebagai berikut:

- 1) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
- 2) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
- 3) Program Penataan Struktur Industri
- 4) Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
- 5) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
- 6) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
- 7) Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

5.3 Rencana Program dan Kegiatan Indikatif Tahun 2015

Dalam rancangan awal RKPD ini, dikemukakan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 berdasarkan rencana strategis (Renstra) SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu. Rencana Program dan kegiatan tersebut masih bersifat indikatif dan akan terus dilakukan penyempurnaan pada tahap selanjutnyadalam penyusunan RKPD ini, Tabel berikut ini menyajikan rencana program dan kegiatan indikatif sebagaimana dimaksud diatas.

BAB VI

PENUTUP

Keberhasilan pembangunan daerah selain ditentukan oleh kualitas produk perencanaan, juga sangat ditentukan oleh sikap, mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin para pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam mengimplementasikan rencana. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan diharapkan mampu menjawab dan mengurangi permasalahan yang ada, dan memanfaatkan serta mengelola potensi sumberdaya yang dimiliki, yang semuanya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 adalah sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahunan yang mengacu pada isu-isu strategis yang kemudian diprioritaskan pada rencana pembangunan tahun 2014 dalam program dan kegiatan bagi pencapaian visi dan misi serta Tahapan Pembangunan Kabupaten Kubu Raya 2009-2014.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 yang juga merupakan penjabaran dari tahapan kelima atau tahapan terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2014 dan tahun pertama pelaksanaan RPJMD kedua Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 yang akan menjadi pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015, Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Pelaksanaan kegiatan, baik dalam rangka regulasi maupun dalam kerangka investasi pemerintah daerah dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu SKPD dan antar SKPD, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing SKPD.

RKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 akan menentukan keberhasilan serta kesinambungan pelaksanaan kinerja Bupati beserta perangkat daerahnya, maka untuk menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan

tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), RKPD ini disusun dengan pendekatan dalam penganggaran keuangan daerah, yaitu Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
2. RKPD Tahun 2015 tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah dan seluruh stakeholders pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program RKPD Tahun 2015 dengan sebaik-baiknya.
4. Masyarakat luas dapat berperan serta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya dituangkan dalam bentuk perundang-undangan. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan dunia usaha dapat berperanserta dalam pelaksanaan program-program pembangunan berdasarkan rancangan peranserta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.
5. Agar dapat dicapai sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD maupun dari APBN, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah agar menyusun rencana kegiatan Tahun 2015 dengan mendasarkan RKPD 2015.
6. Guna tercipta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran dan sinergitas RKPD tahun 2015 ke dalam rencana kegiatan SKPD dan Kebijakan Umum Anggaran APBD tahun 2015 serta prioritas dan plafon anggaran Tahun 2015.

RKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015, berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, sebagai acuan bagi

seluruh SKPD beserta seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Kubu Raya, untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan secara sinergis dan terintegrasi.

BUPATI KUBU RAYA,

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 28 Mei 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


HUSEIN SYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TANUN 2014 NOMOR 17


RUSMAN ALI